PENGANTAR PEMAHAMAN PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN (PKB) DI INDONESIA

Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik

YPB

UNEP
United Nations Environment Programme

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UN Decade of Education for Sustainable Development

PENGANTAR PEMAHAMAN PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN (PKB) DI INDONESIA
(Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik)

Penguatan Kelembagaan dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan
Meningkatkan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan
Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia

©Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB) dalam
Kemitraan bersama
United Nations Environment Programme (UNEP)

2014

PENGANTAR PEMAHAMAN PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN
Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik

Penulis Utama & Editor
Darwina Widjajanti
(Yayasan Pembangunan Berkelanjutan)

Penulis Pendukung
Stien J Matakupan
(Universitas Siswa Bangsa Internasional)

Robert J Didham
(Institute for Global Environment Strategies)

Disain Tata Letak
Dwi Martan dan Andik Hidayat
(Universitas Siswa Bangsa Internasional)

Diterbitkan Januari 2014 oleh:
Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kemitraan dengan
United Nations of Environment Programme (UNEP)

Reproduksi atau kutipan penuh maupun sebagian dari publikasi ini harus menyebutkan judul publikasi dan menunjuk penerbit di atas sebagai pemilik hak cipta.

ISBN: 978-979-1487-30-6

Publikasi ini adalah adaptasi dari buku UNEP berjudul
" Here and Now! Education for Sustainable Consumption - Recommendations and Guidelines."
Isi dari publikasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab
Yayasan Pembangunan Berkelanjutan.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih I
Kata Pengantar II
Pendahuluan III
Ringkasan V
Daftar Istilah Kunci X
Singkatan XIII
Daftar Boks, Gambar, Bagan dan Tabel XV

Bab 1. Menjawab Tantangan: Kondisi di Indonesia 1
- Jasa Lingkungan Menopang Kehidupan Manusia 2
- Tantangan Masa Kini dan Masa Depan 2
- Konsumsi Berkelanjutan - Merawat Sumber Daya Alam,Mengedepankan Manusia 8
- Solidaritas Sosial: Dua Dunia yang Berbeda 13

Bab 2. Pengantar Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) 15
Tema Utama Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan
- Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan 16
- Tanggung Jawab Kita: Solidaritas Global dan Aksi Lokal 29
- Pedagogi: Pendidikan Merupakan Proses Transformasi 22
- Adaptasi Pendekatan Astrolabe dalam Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan 23

Bab 3. Merancang Materi Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia: Langkah ke Depan 25
- Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia 31
- Kerangka Kerja Kurikulum Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Pendidikan Formal 35
- Inisiatif Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Pendidikan Non-Formal 57
- Rekomendasi untuk Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan 65

Bab 4. Memanfaatkan Peluang Secara Optimal: Meningkatkan PKB di Indonesia 67
- Kebijakan Pemerintah: Peluang Jalan Masuk Pelaksanaan Pendidikan 68
Konsumsi Berkelanjutan 72
- Meningkatkan PKB dalam Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal 73
- Peran Penting Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Bab 5. Pembangunan Berkelanjutan dan PKB di Indonesia dan Asia Pasifik: Sekarang dan Masa Depan 77
- Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia 78
- Tantangan Konsumsi Berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik 80

Daftar Pustaka 91
Lampiran
- Lampiran A: Latihan untuk Tujuan Pendidikan 99
- Lampiran B: Latihan Memetakan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (Pendidikan & Pelatihan) 100

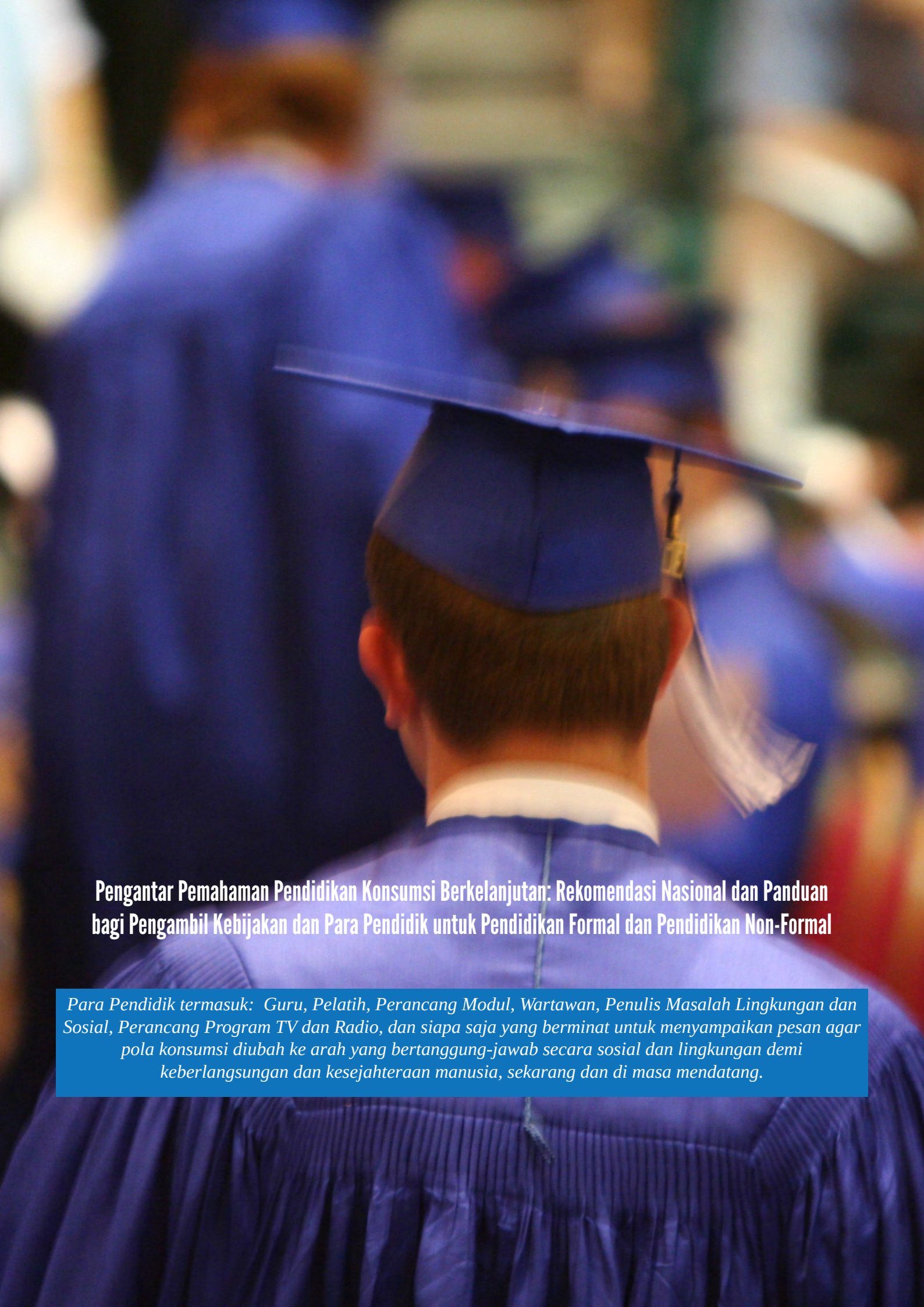

Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan: Rekomendasi Nasional dan Panduan bagi Pengambil Kebijakan dan Para Pendidik untuk Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal

Para Pendidik termasuk: Guru, Pelatih, Perancang Modul, Wartawan, Penulis Masalah Lingkungan dan Sosial, Perancang Program TV dan Radio, dan siapa saja yang berminat untuk menyampaikan pesan agar pola konsumsi diubah ke arah yang bertanggung-jawab secara sosial dan lingkungan demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia, sekarang dan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB) dan United Nations Environment Programme (UNEP) sangat menghargai atas waktu dan upaya oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan dan masukan yang diberikan terhadap *Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia (Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik).*

Publikasi ini adalah bagian dari proyek percontohan UNEP *Institutional Strengthening of Education for Sustainable Consumption – Advancing ESC Policy and Implementation Strategies* yang dilaksanakan di Chili, Tanzania dan Indonesia. Koordinator proyek ini adalah UNEP Division of Technology, Industry and Economics (DTIE), dengan dukungan finansial dari Kementerian Lingkungan Italia, untuk Daratan dan Laut. Publikasi ini dibangun dalam kerangka kerja *Marrakech Task Force on Education for Sustainable Consumption* sebagai kontribusi terhadap Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan atau *UN Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD, 2005-2014)*. Penulisan publikasi ini dilaksanakan dengan kerjasama erat bersama mitra utama yaitu *Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL) dan Institute for Global Environmental Strategies (IGES).*

Di tingkat nasional, dalam hal ini di Indonesia, proyek ini dilaksanakan oleh Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, dalam supervisi dan koordinasi oleh Darwina Widjajanti. Di UNEP di bawah *Division of Technology, Industry and Economics (DTIE),* proyek ini di bawah koordinasi dan dukungan Khairoon Abbas, dengan supervisi dari Fanny Demassieux, Koordinator dan Ketua dari *UNEP Resource Efficiency Sub programme, Responsible Consumption Unit, dan Fabienne Pierre, Programme Officer.*

Publikasi ini tidak dapat terjadi tanpa kontribusi tulisan karya dari Stien Matakupan (Universitas Siswa Bangsa Internasional) dan Robert Didham (IGES). Terima kasih khusus ditujukan pada Victora Thoresen (PERL) yang memberi saran berharga dalam hal substansi, juga kepada Khairoon Abbas (UNEP DTIE) yang sangat teliti dalam koordinasi dan teknis editing. Saya beruntung dengan bantuan Irina Utami Dewi yang menerapkan standar kutipan dan memastikan validasi data, serta Latipah dari Yayasan Detara dengan pengalamannya bekerja bersama guru dan generasi muda di komunitasnya. Tidak lupa terima kasih juga kepada Lisa Savitri yang membantu logistik pelaksanaan lokakarya dan pendistribusian buku ini pada berbagai lembaga terkait.

Terima kasih terutama ditujukan pada mereka yang secara aktif terlibat dalam proses penulisan dokumen ini, melalui konsultasi dan masukan, secara khusus ditujukan pada: Husna Zahir dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, David Artes Setiady dari Yayasan Kail, Latipah Hendarti dari Detara Foundation, dan kelompok guru dari Sampoerna Teachers Institute. Tidak lupa terima kasih kepada perancang tata letak dari publikasi ini, Dwi Martan dan Andik Hidayat. Terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memungkinkan publikasi ini dapat diterbitkan.

Saya berharap bahwa rekomendasi dan panduan pendidikan konsumsi berkelanjutan ini, dapat mendorong tumbuhnya gerakan baru untuk pendidikan konsumsi berkelanjutan. Semoga akan berkembang publikasi-publikasi baru dengan pesan yang sama dalam bentuk materi spesifik berfokus pada tindakan nyata, yang disesuaikan dengan karakter unik dari tiap kelompok sasaran. Saya percaya bahwa pembaca akan kreatif dalam merancang materi pendidikan konsumsi berkelanjutan, untuk kesejahteraan Indonesia, sekarang dan masa depan.

Jakarta, Januari 2014

Darwina Widjajanti
Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk tertinggi di dunia dengan 237.6 juta penduduk di tahun 2010 serta proyeksi penduduk sejumlah 300 juta pada tahun 2032. Dalam abad 21 Indonesia tentu sangat berbeda dengan Indonesia pada abad 20 karena kepadatan penduduk dan tingkat urbanisasi yang lebih besar. Namun kenaikan jumlah penduduk dibarengi dengan naiknya jumlah kelas menengah dapat menjadi pemicu meningkatnya konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Sementara konsumsi adalah hal penting bagi ekonomi Indonesia, dan seringkali dipandang sebagai motor pertumbuhan dan pembangunan, hal itu juga memiliki konsekuensi yang merugikan. Konsumsi tidak berkelanjutan dan pola produksi telah berkontribusi dalam masalah lingkungan, ekonomi dan sosial yang kita hadapi, seperti perubahan iklim dan hilangnya keaneka-ragaman hayati. Konsumen perlu menyadari bahwa pilihan yang mereka tentukan ketika membeli produk atau jasa sangatlah krusial, tidak hanya menunjukkan soal suka atau tidak suka, tetapi juga menyampaikan pesan pada pemerintah dan sektor swasta tentang bentuk dunia yang mereka inginkan untuk hidup. Ketika kelompok muda memahami kaitan antara konsumsi dan dampak yang ditimbulkannya, mereka dapat berkembang menjadi orang yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta menentukan dunia yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pendidikan adalah salah satu cara yang penting dan berpengaruh, mendukung dan memberdayakan individu untuk membuat keputusan secara bertanggung jawab yang mengarah pada gaya hidup lestari *(sustainable lifestyle)*. Lebih khusus, pendidikan konsumsi berkelanjutan (PKB) adalah komponen inti dari pendidikan pembangunan berkelanjutan (PPB), yang membantu memberi pengetahuan, membentuk sikap dan mempromosikan kecakapan yang diperlukan untuk membuat masyarakat masa kini berfungsi penuh. Dilengkapi dengan informasi yang memadai tentang konsekuensi dari pilihan sehari-hari dan solusi yang dapat dijalankan, tiap individu dapat mengerti dan mengelola dampak sosial dan lingkungan, serta berpartisipasi dan mendorong debat publik mengenai nilai yang dianggap penting, kualitas kehidupan, serta tanggung jawab dan akuntabilitas.

Publikasi ini, Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia: Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik, bertujuan untuk memberi pedoman bagi pengambil kebijakan dan pendidik dalam pelaksanaan PKB secara nasional dan lokal, baik di dalam pendidikan formal dan non-formal. Rekomendasi nasional dan pedoman ini adalah bagian dari proyek percontohan yang dilaksanakan oleh the *United Nations Environment Programme (UNEP)* dalam kerjasama dengan mitra utama, termasuk *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* and *the International Task Force on ESC* yang dipimpin oleh pemerintah Italia. Publikasi ini adalah karya Yayasan Pembangunan Berkelanjutan *(Foundation for Sustainable Development)*, pelaksana proyek di tingkat nasional, sebuah kontribusi yang bernilai dalam Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *The United Nations Decade on Education for Sustainable Development* (2005-2014).

Buku pedoman ini terdiri dari 5 bab: dua bab pertama memberikan informasi umum tentang Indonesia dan tantangan yang dihadapi, juga mengenai PKB; dua bab berikutnya memberikan pedoman bagi pembaca bagaimana membangun materi PKB dan bagaimana memajukan PKB di Indonesia; dan bab terakhir memberikan gambaran yang lebih luas dengan melihat kebijakan pembangunan berkelanjutan dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia, juga tentang tantangan dari konsumsi berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik, sekaligus mengidentifikasikan peluang untuk mengintegrasikannya ke dalam PKB di tingkat regional.

Diharapkan dengan berkontribusi dalam memahami lebih jauh PKB dan pentingnya PKB, peserta dapat dilengkapi dengan cara-cara *(tools)* yang membantu mereka mengambil peran pemimpin dalam membangun Indonesia yang lestari, adil dan sejahtera, Indonesia yang dapat menjawab tantangan pembangunan.

Januari 2014

Emil Salim
Founder
Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

Sylvie Lemmet
Director, UNEP Division of Technology,
Industry and Economics

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara, kita makin menyadari dampak negatif tindakan manusia pada lingkungan, khususnya di Indonesia sebagai negara kedua terkaya di dunia dari segi keaneka-ragaman hayati yang sedang dalam ancaman serius. Gaya hidup kita dan pilihan konsumsi telah memberi tekanan pada lingkungan dan sumber daya alam, dan karenanya menjadi krusial bagaimana sistem pendidikan kita mengedepankan realitas ini. Secara internasional konsumsi berkelanjutan masih belum menjadi tema utama dalam sistem pendidikan sekarang ini. Kenyataannya, mengarusutamakan pendidikan konsumsi berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan fomal dan dalam pendidikan non formal tetap merupakan tantangan, karena pendidikan konsumsi berkelanjutan (PKB) secara umum masih belum menjadi prioritas baik di negara berkembang maupun negara maju.

Pengantar pada pendidikan konsumsi berkelanjutan (PKB) di Indonesia menyumbangkan rekomendasi nasional dan pedoman, yang terbagi atas 5 bab:

Bab 1: Menjawab Tantangan: Kondisi di Indonesia

Bab ini memberi informasi mengenai penduduk,lingkungan, tumbuhnya kelas menengah dan pola konsumsi, masalah kemiskinan, dan berbagai isu pembangunan di Indonesia yang menunjukkan kritisnya masalah konsumsi berkelanjutan.

Bab 2: Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Dalam bab ini dijelaskan tentang kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, pendidikan pembangunan berkelanjutan, dan pendidikan konsumsi berkelanjutan, dan konsekuensi dari pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi, yang dapat memberi pemahaman lebih jauh.

Bab 3: Merancang Materi PKB di Indonesia - Melangkah Kedepan

Untuk merancang PKB, para pendidik perlu mempertimbangkan keragaman populasi (usia, jenis kelamin, kelas sosial, peran di masyarakat, suku bangsa dan budaya) serta kondisi geografis (desa atau kota, pedalaman atau pesisir, dsbnya). Bab ini memberikan informasi tentang metodologi dalam melakukan adaptasi PKB dalam pendidikan formal dengan berbagai pendekatan, dan mendorong kreativitas dalam membangun PKB dalam pendidikan non formal, terinspirasi oleh berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai aktor (LSM, media massa, kelompok kepentingan, dsbnya). Bab ini juga memperlihatkan keuntungan dari pemanfaatan media sosial untuk menyebarluaskan PKB.

Bab 4: Memanfaatkan Peluang Secara Optimal - Memajukan PKB di Indonesia

Bab ini memperlihatkan kebijakan dan rencana pemerintah Indonesia terkait PKB, dan berbagai inisiatif PKB dari masyarakat umum dan media massa. Hal ini merupakan jalan masuk yang diperlukan untuk membangun PKB lebih lanjut secara lebih kreatif. Bab ini juga menunjukkan peran pemerintah yang dibutuhkan untuk membantu mendorong terciptanya konsumsi berkelanjutan di Indonesia.

Bab 5: Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia dan Asia Pasifik: Sekarang dan Masa Depan

Di kawasan Indonesia dan kawasan Asia Pasifik, naiknya jumlah penduduk dengan cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan jumlah kelas menengah mengarah dengan pola konsumsi berlebihan. Di kawasan yang sama jumlah populasi miskin yang besar yang tercabut dari kesejahteraan yang mendasar. Kedua masalah ini memberi tekanan yang lebih besar pada ketersediaan sumber daya alam dan keadilan. Pendidikan pembangunan berkelanjutan dan pendidikan konsumsi berkelanjutan merupakan perangkat yang berharga dalam menangani kedua masalah tersebut. Pendidikan pembangunan berkelanjutan dan pendidikan konsumsi berkelanjutan menyediakan cara untuk mendorong orang membuat keputusan konsumsi secara bertanggung jawab dan melakukan tindakan nyata, dengan cara-cara praktis.

Tujuan dari publikasi

1. Menyediakan pemahaman umum kepada pengambil kebijakan dan pendidik tentang pentingnya PKB yang diharapkan akan menuju pada tingkah laku yang bertanggung jawab dan upaya yang membawa kualitas kehidupan bagi mereka yang miskin.
2. Memberi rekomendasi pada pengambil kebijakan untuk mendukung PKB melalui pendidikan formal dan mendorong pengembangan lebih lanjut dari inisiatif yang ada dalam pendidikan non formal; melakukan kampanye PKB lebih intensif; membuat peraturan bagi produksi berkelanjutan dalam dunia bisnis, pemasaran yang etis, dan memberlakukan *eco label;* mengarusutamakan dan memadukan PKB dalam kurikulum yang ada dalam pendidikan formal, dan mendorong lebih lanjut upaya PKB dalam pendidikan non formal.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai PKB sebagai konsep kerja kepada para pendidik dalam berbagai hal: mengintegrasikan PKB ke dalam kurikulum pendidikan formal yang ada dengan berbagai pendekatan, merancang lebih banyak berbagai inisiatif dalam pendidikan non formal, dan menjangkau lebih banyak peserta serta agen perubahan strategis, sambil menyesuaikan materi PKB ke dalam lingkup konteks lokal yang spesifik (guna mengetahui tantangan dan peluang), serta profil dari kelompok sasaran pendidikan, serta memanfaatkan hadirnya media sosial sebagai cara untuk menyebarluaskan pesan PKB.

PKB adalah bagian penting dari Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan. Publikasi ini adalah adaptasi dari *UNEP's Here and Now! ESC Recommendations and Guidelines,* yang telah diterbitkan dengan dukungan *Marrakech Task Force on Education for Sustainable Consumption,* dipimpin oleh Pemerintah Italia. YPB beruntung memiliki kesempatan untuk menerbitkan buku ini dengan bantuan dari *Division of Technology, Industry and Economics (DTIE), UNEP Resource Efficiency Sub programme, Responsible Consumption Unit.*

Darwina Widjajanti, Penulis Utama

RINGKASAN

Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia ditopang oleh jasa lingkungan seperti udara, air, pangan, berbagai hasil hutan, laut dan tambang, yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang. Diperlukan jasa lingkungan dari sumber daya alam yang cukup dan berkualitas agar kehidupan dapat terus berlangsung. Planet bumi hanya satu, belum ditemukan planet lain yang memberikan sumber alam yang cocok untuk kehidupan manusia. Karenanya, manusia perlu memastikan bahwa sumber alam akan tetap tersedia.

Penduduk Indonesia tumbuh sekitar 60 juta pada tahun 1930 dan diperkirakan akan menjadi sekitar 270 juta pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mengandung konsekuensi kebutuhan akan sumber daya alam yang cukup tinggi, baik bagi mereka yang mata pencahariannya langsung bergantung pada sumber daya alam maupun pada kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Bagaimana pola konsumsi dari penduduk, dan bagaimana kondisi sumber alam Indonesia, akan turut menentukan apakah penduduk Indonesia dapat terus memperoleh manfaat kekayaan alamnya secara berkesinambungan.

Penemuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi sumber daya alam Indonesia mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mata air yang kering dan daerah aliran sungai yang tercemar mengurangi pasokan air serta membahayakan penduduk dan kegiatan perekonomian. Data lain menunjukkan bahwa telah terjadi konversi lahan pertanian dan hilangnya benih padi unggul, pembalakan liar dan penyusutan hutan yang digantikan perkebunan, pertambangan dan industri kayu, kerusakan terumbu karang yang mengurangi cadangan ikan, serta terancamnya kekayaan hayati yang belum sempat dipelajari untuk dimanfaatkan. Menteri Pertanian Suswono pada Januari 2013 menyatakan bahwa konversi sawah menjadi lahan non-pertanian adalah sebesar 100.000 hektar per tahunnya. Menurut laporan WWF dalam *The Living Planet Report 2012*, tutupan hutan Kalimantan akan menjadi kurang dari sepertiganya pada tahun 2020 dibandingkan kondisi tahun 1950, bila kecenderungan konservasi hutan terus berlangsung. Laporan Badan Pangan Dunia yang berjudul *State of the World's Forest* memuat, laju hilangnya hutan Indonesia dari tahun 2000-2010 mencapai 498.000 hektar/tahun atau sekitar 0,5 persen/tahun. Hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tinggal sekitar 30% terumbu karang yang dalam kondisi baik (26,95%) dan kondisi sangat baik (5,58%). Padahal terumbu karang adalah rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Kehidupan modern menghasilkan sampah yang tidak terolah, terutama di perkotaan, dimana jumlah sampah tidak terolah terus meningkat yang menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air. Akibatnya, dengan berkurangnya sumber daya alam dan menurunnya kualitas sumber daya alam, maka sumber daya alam tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduk.

Bila dilihat dari pola konsumsi penduduk, maka ditemukan bahwa pola konsumsi kelas menengah Indonesia cenderung berlebihan (konsumtif) yang artinya menguras lebih banyak sumber alam yang sudah dalam kondisi kritis. Jumlah kelas menengah Indonesia tumbuh dari 45.4 juta penduduk pada tahun 1999 menjadi 95.31 juta pada tahun 2009 dengan pengeluaran per orang per hari antara USD 2 – USD 20. Dilihat lebih jauh, kelas menengah ini mengkonsumsi di luar batas kebutuhan dasar. Pembelian barang sekunder seperti perangkat elektronik, kosmetik impor, mobil dan motor meningkat cukup tinggi sejak 2010. Kelas menengah ini akan terus meningkat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi terus berlangsung (GDP sekitar 6% sejak tahun 2007). Bila jumlah kelas menengah terus meningkat dan kecenderungan pola konsumsi yang berlebihan ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan sumber daya alam yang terbatas semakin cepat terkuras. Selain itu gaya hidup berlebihan ini menghasilkan sampah dalam waktu cepat, seperti plastik, berbagai kemasan, sampah elektronik, dan pencemaran udara dari penggunaan kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Di lain pihak, pola konsumsi dari kelompok miskin dengan pendapatan kurang Rp 10.000 per hari yang jumlahnya mencapai 30 juta orang, sangat memprihatinkan. Berbeda dengan kelas menengah, pola konsumsi kelompok miskin ini masih sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pemenuhan pangan yang sehat,

mendapatkan akses air bersih, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hunian layak, dan pendapatan yang memadai agar dapat bertahan hidup dan berkembang sebagai manusia secara utuh. Mereka yang bekerja pada awal mata rantai perdagangan seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, umumnya memperoleh pendapatan paling kecil dengan upaya yang paling besar. Praktek ketidak adilan perdagangan ini membuat kelompok marjinal ini sulit bergerak maju.

Terbatasnya pengetahuan tentang keamanan dan nutrisi pangan membuat kelompok ini terancam masalah kesehatan. Kalaupun mereka menyadari tentang makanan sehat, karena keuangan terbatas, mereka belum tentu dapat membeli makanan yang bergizi dan aman. Keterbatasan pendidikan terkadang membuat mereka tidak memikirkan secara matang prioritas penggunaan dana yang terbatas. Bisa terjadi kelompok ini terbujuk oleh iklan agresif yang memberi janji palsu dan tidak mementingkan keuntungan investasi jangka panjang (seperti pendidikan) sebagai prioritas, atau mereka terjebak dalam hutang karena membeli produk yang tidak terlalu penting.

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) adalah pendidikan yang memungkinkan manusia memahami dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumsi, yang kemudian diterjemahkan dalam tindakan kehidupan sehari-hari.

Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk mendorong pengambil keputusan dan pendidik guna merancang kebijakan atau materi pendidikan konsumsi berkelanjutan secara kreatif sesuai dengan karakter dan konteks dari kelompok sasaran yang unik untuk mengubah sikap konsumen menjadi konsumen yang bertanggung-jawab secara lingkungan dan sosial.

Kelompok Sasaran

Pengantar pemahaman pentingnya PKB ini ditujukan kepada pengambil kebijakan publik dan kelompok pendidik. Pengambil kebijakan publik diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dan memperluas daya jangkau pendidikan konsumsi berkelanjutan kesegala lapisan dengan berbagai cara. Buku ini juga ditujukan kepada pendidik yang diharap merancang materi pendidikan seperti: para guru di sekolah, pelatih *(trainer)*, pembuat program acara di TV dan radio, wartawan atau penulis yang membawa pesan pendidikan bagi publik.

Institusi utama untuk pendidikan konsumsi berkelanjutan termasuk lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga swadaya masyarakat yang peduli lingkungan, kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan; kelompok pencinta lingkungan dan budaya; kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok ibu; lembaga media massa, termasuk pelatihan dari perusahaan, dan lembaga lainnya yang dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya pola konsumsi berkelanjutan.

Hasil yang Diharapkan

Diharapkan panduan ini dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum, kegiatan luar sekolah, berbagai macam bentuk pelatihan dan kegiatan tertentu, artikel untuk majalah dan koran, program radio dan TV, diskusi publik, dan sebagainya, yang pada akhirnya bisa merubah tingkah-laku konsumen menjadi konsumen yang rasional, lebih bertanggungjawab dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Lingkup Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang stabil sejak tahun 2009 telah menumbuhkan kelas menengah di Indonesia, akan tetapi kemiskinan tetap merupakan masalah. Kedua kelompok tersebut, kelas menengah dan kelompok miskin, mempunyai tantangan tersendiri yang menentukan bentuk PKB yang tepat. Kelas menengah cenderung mengkonsumsi dalam jumlah besar, atau *over consumption.* Kelompok miskin sebaliknya mengkonsumsi kurang dari seharusnya, atau *under consumption.*

Dua dunia ini, kelompok kelas menengah dan kelompok miskin, memiliki tantangan konsumsi yang berbeda. Kelompok yang mengkonsumsi berlebihan *(over consumption)* perlu lebih bertanggung jawab dalam mengkonsumsi karena sumber daya alam yang makin berkurang dari segi kuantitas dan menurun dari segi kualitas. Kelompok miskin *(under consumption)* perlu memenuhi standar pangan yang bernutrisi dan aman, serta mempunyai kualitas hidup memadai, pendapatan yang cukup, rumah yang memadai, air bersih, dan mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Mereka yang hidup lebih dari berkecukupan hendaknya memiliki rasa solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.

Selain kelas sosial, kondisi geografis, demografis, dan ragam budaya adalah lingkup yang unik, yang berbeda antara tempat satu dari tempat lainnya. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dalam merumuskan PKB, baik untuk pendidikan formal maupun pendidikan non-formal: kondisi geografis dari dataran tinggi pegunungan sampai dataran rendah pesisir, daerah pedalaman hutan dengan penduduk asli; wilayah perkotaan dengan penduduk padat dengan lahan terbatas, dan penduduk desa dengan penduduk terbatas dan sumber alam yang lebih tinggi dari wilayah perkotaan; berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan adat sosial yang beragam; daerah yang keaneka-ragaman hayatinya kaya dan daerah savana, dsbnya. Tiap konteks menyuguhkan perbedaan tantangan dan peluang untuk membentuk pesan tersendiri dari PKB.

Adanya arus informasi yang deras yang menyorot gaya hidup konsumtif dalam media massa dan iklan agresif dalam berbagai bentuk (papan iklan, pameran, pesan di telpon genggam, iklan di internet, tenaga pemasaran yang datang, dsb) sangat menggoda dan mendorong konsumen untuk berbelanja lebih banyak. Konsumen perlu mempunyai kemampuan mencari dan menyaring informasi yang akurat sebagai dasar dari pengambilan keputusan untuk berbelanja atau mengkonsumsi. Di sisi lain adanya perkembangan teknologi media sosial memberi manfaat sebagai saluran komunikasi pendidikan bagi PKB *(website, blog, facebook)*, karena dapat lebih banyak menjangkau orang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PKB akan mengarah pada gaya hidup bertanggung jawab, memastikan adanya mata pencaharian berkelanjutan, integritas pada lingkungan, mendorong kohesi sosial yang lebih kuat bagi kualitas hidup yang baik, untuk sekarang dan masa depan.

Publikasi ini menjelaskan bagaimana pendidikan konsumsi berkelanjutan dapat diterapkan dalam pendidikan formal di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan yang setara, dan dalam pendidikan non-formal. Dalam pendidikan formal dijelaskan bahwa materi pendidikan konsumsi berkelanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem sekolah secara menyeluruh. Pendekatan ini sangat memperhatikan pengembangan aspek pengetahuan, sikap, keterampilan dan juga nilai-nilai, sehingga diharapkan pendidik mendapatkan gambaran yang utuh tentang implementasi PKB di sekolah. Strategi untuk menerapkan PKB melalui pendekatan tematik yang disertai dengan contoh rencana pembelajaran serta penilaiannya juga disajikan dalam publikasi ini.

Dalam pendidikan non-formal berbagai bentuk pendidikan konsumsi berkelanjutan dapat secara kreatif dibangun untuk kelompok yang jauh lebih bervariasi dan dengan pendekatan yang beragam di luar sekolah. Kelompok sasaran menjangkau berbagai profil berdasarkan usia (misalnya kelompok anak muda perkotaan), peran atau pekerjaan (seperti ibu rumah tangga, petani, nelayan, dsb), suku bangsa, tempat tinggal atau geografi (di pesisir, dataran tinggi, pedalaman) dan berbagai kelompok lainnya. Pendekatan PKB pada pendidikan non-formal beragam, selain di kelas, yang mencakup antara lain melakukan observasi, penelitian, aksi nyata, pertunjukan seni budaya, kampanye, diskusi publik dan sebagainya. Sarana pendidikan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media massa dan media sosial sehingga PKB dapat menjangkau lebih banyak orang dan lebih cepat. Tumbuhnya kelompok netizen (pengguna internet) dapat dipertimbangkan sebagai kelompok sasaran penyebarluasan PKB.

Tantangan di Indonesia

Populasi Penduduk Yang Tinggi dan Kemiskinan

Di akhir publikasi ini diperlihatkan berbagai kemungkinan untuk mengembangkan PKB dari sisi kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong pelaku pendidikan formal maupun pendidikan non-formal di Indonesia. Dalam mendorong PKB pemerintah perlu mengingat profil penduduk Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, dengan penduduk 237 juta pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut terdapat penduduk miskin sekitar 30 juta jiwa. Sebanyak 40% dari penduduk Indonesia sangat rawan terhadap tekanan atau ancaman yang mendorong mereka ke batas kemiskinan. Lebih dari 63% orang miskin tergantung hidupnya pada sektor pertanian untuk menutupi kebutuhan sendiri, sedangkan 80% dari tenaga kerja Indonesia dikelompokkan sebagai pekerja di usaha mikro dan usaha kecil menengah. Dari segi kesehatan data menunjukkan angka kematian ibu dalam melahirkan adalah 228 orang per 100,000 kelahiran hidup di tahun 2007.

Tumbuhnya Kelas Menengah yang cenderung konsumtif

Hal lain dari profil penduduk Indonesia adalah kelas menengah meningkat dari 45.4 juta orang pada tahun 1999 menjadi 93.31 juta orang pada tahun 2009 (laporan ADB), dimana pengeluaran kelompok ini USD 2–USD 20/orang/hari. Data tersebut menunjukkan peningkatan kelas menengah lebih dari 2 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Diperkirakan jumlah ini akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6% per tahun tetap stabil. Kelompok ini adalah konsumen yang mengkonsumsi di luar kebutuhan pokok. Mereka adalah konsumen dari barang-barang sekunder seperti produk elektronik, kendaraan sepeda motor dan mobil, serta barang impor seperti kosmetika dan fesyen merek-merek terkenal dunia.

Potensi Keaneka-ragaman dan Ancaman

Di luar masalah di atas, Indonesia masih memiliki potensi keaneka-ragaman hayati yang belum dimanfaatkan optimal. Dengan kekayaan hayati tertinggi kedua di dunia, masih banyak yang dapat dikembangkan untuk ketahanan pangan, *bio medicine*, wisata alam, dan beragam manfaat lainnya.

Indonesia antara lain memiliki 31 ribu spesies tumbuhan berkayu, 60% terumbu karang terdapat di Indonesia, 6000 spesies fauna dan flora menghasilkan pangan, obat, kerajinan tangan, bahan bakar, dan materi bangunan. 40 juta penduduk pedesaan tergantung pada keaneka-ragaman hayati sebagai sumber kehidupan. Sayangnya, ancaman terhadap keaneka-ragaman hayati cukup tinggi seperti pembalakan kayu secara liar dari hutan lindung, praktek penangkapan ikan yang merusak terumbu karang tempat biota laut berkembang, konversi lahan subur menjadi daerah non pertanian, dan sebagainya. Karenanya, perlu tindakan penegakan hukum yang efektif agar kekayaan hayati dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Keamanan Konsumen dan Kesadaran Konsumen

Beragam produk yang ada di pasar konsumen perlu mendapat kepastian tentang keamanan produk. Tanda penganan yang sehat, *eco label* sebagai tanda produk ramah lingkungan, logo *fair trade* yang menandakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (hak buruh dan pengusaha kecil), pentingnya etika pemasaran karena sifat pemasaran modern yang agresif, serta perlunya penegakan hukum yang serius adalah beberapa pesan penting yang dapat dicakup dalam materi PKB.

Tantangan di Kawasan Asia Pasifik

Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan Asia-Pasifik telah mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa dekade kedepan. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi ini telah memunculkan kelas konsumen baru (kelas menengah) di kawasan ini yang sudah lebih dari seperempat penduduk, dan yang dalam waktu dekat akan tumbuh menjadi lebih dari setengah total kelas konsumen dunia. Pada gilirannya, hal ini akan membawa perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi di kawasan ini dengan banyak orang berubah dari konsumsi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bergerak kearah pola konsumsi berlebihan yang akan meniru pola konsumsi tidak berkelanjutan yang saat ini sedang mendapat lebih banyak perhatian.

Kawasan Asia-Pasifik sebenarnya tidak homogen, dan di kawasan ini tinggal lebih dari setengah penduduk dunia yang miskin. Jumlah mereka yang kurang mendapat akses pada pangan, air bersih dan fasilitas sanitasi masih tinggi. Kawasan ini juga menghadapi tekanan karena perubahan iklim dan bencana alam. Dua tantangan ini – jumlah yang besar dari mereka yang tidak mendapat kebutuhan dasar untuk hidup sejahtera dan tumbuhnya kelompok konsumen kelas menengah yang menggerakkan gaya hidup konsumsi yang tinggi, menyebabkan tekanan lebih besar pada ketersediaan sumber daya alam dan kesetaraan – yang menghendaki justifikasi perhatian yang sama pada kedua hal tersebut.

Dua area yang sedang diprioritaskan di kawasan ini adalah Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (PPB) dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB). PKB berperan sebagai cara yang berharga dalam mengkaitkan dari dua tujuan kedua area tersebut sehingga dapat ditemukan peluang berharga untuk meningkatkannya dengan memadukan kedua mandat yang ada. Baik PPB dan PKB seringkali terhenti karena diawali dengan diskusi keberlanjutan perspektif yang kompleks, teknis atau ideal. PKB merupakan cara belajar yang sangat bermanfaat karena secara langsung melibatkan murid dalam tindakan nyata dalam konsumsi berkelanjutan dan melalui proses belajar dari pengalaman, serta keinginan tahu yang dibangun bersama hingga ke prinsip yang membumi dari konsumsi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian PKB menjadi cara yang penting dalam menanggapi tantangan di kawasan ini dengan membuat siapapun secara nyata dalam mewujudkan konsumsi berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan.

DAFTAR ISTILAH KUNCI

Istilah	Penjelasan
Daya Dukung Ekosistem *(Biocapacity)*	Daya dukung ekosistem adalah kapasitas untuk menghasilkan material bermanfaat dan menyerap material buangan yang dihasilkan oleh manusia, menggunakan skema manajemen dan teknologi.
Eco Label	*"Eco Label"* adalah tanda/label bahwa produk dan jasa yang tersedia dinyatakan ramah dan aman secara lingkungan, melalui proses sertifikasi sukarela atau diwajibkan (tergantung pada negara ybs atau permintaan pasar) dilakukan oleh pihak independen atau yang ditunjuk pemerintah, secara bertanggung jawab. Cara ini membantu konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli/ mengkonsumsi produk dan jasa dengan adanya informasi akurat dari aspek lingkungan.
Ekosistem *(eco system)*	Ekosistem adalah kaitan yang kompleks dari sumber-sumber yang hidup, habitat, dan penghuni dari sebuah wilayah, termasuk di dalamnya fauna, flora, mikro organisma, air, tanah, dan manusia. Tiap bagian mempunyai fungsi tertentu di alam, dan segala sesuatu di dalam ekosistem saling tergantung. Bila ada bagian dari ekosistem rusak atau hilang maka akan berdampak pada bagian yang lain.
Jasa Ekosistem atau Jasa Lingkungan	Manfaat yang diperoleh dari lingkungan / *ecosystem* seperti jasa udara, air, pangan; jasa pengaturan yang mengendalikan banjir dan penyakit; jasa pendukung unsur hara yang menjaga keberlangsungan bumi, dan jadi budaya (untuk kepentingan rekreasi dan kegiatan spiritual). Jasa ekosistem (sering disederhanakan menjadi jasa lingkungan), adalah landasan dari kesejahteraan - namun tindakan manusia yang keliru dapat mengurangi fungsi jasa ekosistem sehingga kemampuan ekosistem memproduksi terganggu.
Fair Trade	*Fair Trade* adalah kemitraan perdagangan berbasis dialog, keterbukaan dan saling menghormati, yang menghargai keadilan pada setiap pelaku dalam mata rantai perdagangan internasional, terutama produsen yang kerapkali paling dirugikan. *Fair trade* berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik dan melindungi hak dari produser dan pekerja marjinal. *Fair Trade Organization* didukung oleh konsumen, terlibat secara aktif dalam mendukung produsen, peningkatan kesadaran melalui kampanye, untuk perubahan dalam peraturan dan praktek perdagangan konvensional. Produk *Fair Trade* diproduksi dan diperdagangkan menurut prinsip tersebut sedapat mungkin dan dipastikan melalui sistem yang kredibel dan independen.
Jejak/ Tapak Ekologis	Jejak/tapak ekologis menunjukkan berapa sumber daya alam yang dikonsumsi individu, populasi atau kegiatan tertentu, dan untuk menyerap buangan yang terjadi, dengan menggunakan teknologi dan pengelolaan sumber daya.
Keaneka-ragaman Hayati	Keragaman organisme hidup, termasuk spesies, dari semua ekosistem (air, darat, laut dan lainnya).
Kebutuhan Dasar	Kebutuhan dasar berdasarkan *International Labour Organization* menetapkan standar hidup minimal yang terbagi atas dua hal. Pertama, tersedianya kebutuhan pokok minimum sebuah keluarga untuk konsumsi pribadi seperti pangan, papan dan sandang; kedua, kebutuhan mendasar akan jasa yang disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti tersedianya air minum yang aman, sarana sanitasi, transportasi publik, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Kelas Menengah	Untuk publikasi ini (data tahun 2010) Kelas Menengah yang dimaksud adalah: Penduduk dengan pengeluaran per hari USD 2- USD 20 per orang. Pendapatan tersebut dianggap memungkinkan orang dapat memenuhi lebih dari kebutuhan dasarnya. Ukuran di atas dapat berubah sesuai dengan perubahan standar kebutuhan dasar pada waktu tertentu.
Konsumsi Berkelanjutan	Konsep konsumsi berkelanjutan mempunyai elemen sebagai berikut: • Memenuhi kebutuhan manusia, • Mengutamakan kualitas hidup yang baik melalui standar hidup layak, • Berbagai sumber daya antara yang kaya dan miskin, • Bertindak dengan mempertimbangkan generasi mendatang, • Memperhatikan dampak mulai "dari barang diproduksi sampai dibuang" *(from cradle to grave)* dalam mengkonsumsi apapun, dan • Meminimalkan penggunaan sumber daya, sampah dan polusi.
Masyarakat Adat	Ada berbagai definisi namun secara umum masyarakat adat ditandai dengan karakteristik berikut: Sekelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat sendiri (nilai, norma, kebiasaan, aturan, hukum, bahasa dsbnya), mewarisinya dari leluhur, terikat pada habitat tertentu, dan hidup dari sumber daya setempat. Masyarakat adat hidup dalam tata caranya sendiri yang berbeda dari tata cara masyarakat mayoritas yang dominan. Secara umum mereka terpisah dari masyarakat luas, dalam area geografis tertentu, yang seringkali terasing dari penduduk umumnya di suatu negara.
Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Pendidikan Konsumen	• Fokus pada pertumbuhan ekonomi, keuangan, dan keamanan. • Konsumen adalah agen ekonomi utama. • Nilai dari pasar menguasai masyarakat: orang melayani pasar. • Memperhatikan efisiensi, kelangkaan dan kompetisi. • Fokus pada kepentingan dan hak konsumen.
Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan	Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) adalah pendidikan yang memungkinkan orang untuk memahami dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumsi, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan • Fokus pada pembangunan manusia dan masyarakat, potensi, kemajuan dan keamanan, termasuk ekonomi. • Manusia adalah konsumen dan warga masyarakat. • Ekonomi dan pasar melayani orang dan masyarakat. • Memperhatikan efektifitas. • Fokus pada kepentingan setara dan tanggung-jawab warga / tanggung-jawab manusia pada manusia lain, juga planet bumi, ketika mengkonsumsi.
Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan	Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (PPB) bertujuan untuk memberi kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan manusia melalui pendidikan, dan mensyaratkan adanya tanggung-jawab untuk menciptakan masa depan yang berkesinambungan. Ia melibatkan semua orang dari berbagai bidang pekerjaan, di seluruh dunia, yang membawa perubahan ke arah dunia yang lebih baik. Semua pemangku kepentingan dari sektor yang berbeda memainkan peranan dalam merubah cara kita menyampaikan pendidikan dan memastikan bahwa kita membuat keputusan yang tepat untuk masa yang akan datang.

Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan (PKB atau SCP) mendorong pemakaian yang efisien dari sumber daya alam dan energi, menciptakan pasar baru dan menumbuhkan lapangan kerja yang hijau dan memadai, seperti pasar untuk produk organik, *fair trade*, perumahan berkelanjutan, energi berkesinambungan, transpor dan wisata yang berkelanjutan. PKB secara khusus menguntungkan negara berkembang karena ia menyediakan peluang untuk mereka melakukan "lompatan katak" untuk melakukan kegiatan yang efisien dari segi energi, searah lingkungan, ramah lingkungan dan kompetitif dari segi teknis, memungkinkan mereka melintasi inefisiensi dan fase polusi/pencemaran dari kegiatan pembangunan. Tujuan akhir dari produksi dan konsumsi berkelanjutan adalah kesejahteraan manusia.
Sumber Daya Alam	Materi dari alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti tanah, air, udara, flora fauna, mineral, tambang, termasuk seluruh isi hutan dan laut.
Solidaritas Sosial	Solidaritas sosial yang dimaksud disini adalah empati pada pihak lain yang kurang beruntung, menyadari dampak dari pola konsumsi berlebihan dapat mempengaruhi kehidupan bersama, dan kemauan untuk mengelola pola konsumsi secara bertanggung jawab dan kemauan berbagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang miskin. Definisi solidaritas sosial ini berlaku dalam publikasi ini.

Catatan: penjelasan di atas adalah penjelasan umum yang bersifat bebas guna memudahkan pemahaman, serta untuk kepentingan mengerti istilah yang dipakai dalam penerbitan ini. Keterangan lebih rinci dan ketat *(rigid)* dapat dicari dari berbagai sumber, yang bisa lebih kompleks dari penjelasan di atas.

SINGKATAN

ACDP	*Analysis Capacity Development Program*
BSNP	*Badan Standar Nasional Pendidikan / National Education Standard Agency*
CSL	*Climate Smart Leaders*
CSRO	*The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*
DSB	*Developing Sustainable Business*
DTIE (of UNEP)	*Division of Technology, Industry and Economics*
ESC	*Education for Sustainable Consumption*
ESD	*Education for Sustainable Development*
EU	*European Union*
GBIM	*Garis-garis Besar Isi Materi*
GDP	*Gross Domestic Product*
GEO	*Global Environmental Outlook*
IDR	*Indonesian Rupiah*
IGES	*Institute for Global Environmental Studies*
IPA	*Ilmu Pengetahuan Alam / Science*
IPS	*Ilmu Pengetahuan Sosial / Social Science*
INOTEK	*Inovasi Teknologi / Technology Innovation*
IUCN	*International Union for Conservation Nature*
JPL	*Jaringan Pendidikan Lingkungan / Environmental Education*
KD	*Kompetensi Dasar / Basic Competency*
KI	*Kompetensi Inti / Core Competency*
KPB / SCP	*Konsumsi Produksi Berkelanjutan / Sustainable Consumption and Production*
KTSP	*Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan / First Grade Education Curricula*
LAT	*LEAD Associate Training*
LEAD	*Leadership for Environment and Development*
MoC	*Ministry of Commerce*
MoE	*Ministry of Environment*
MoEC	*Ministry of Education and Culture*
MoEMR	*Ministry of Energy and Mineral Resources*
MoI	*Ministry of Industry*
NGO	*Non-Governmental Organization*
PERL	*Partnership for Education and Research about Responsible Living*
PKB/ESC	*Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB)/Education for Sustainable Consumption*
PKN	*Pendidikan Kewarganegaraan / Civic Education*
PP	*Peraturan Pemerintah / Government Regulation*
PLH	*Pusat Studi Lingkungan Hidup / Center of Environmental Study*
PPB	*Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan /Education for Sustainable Consumption*
PMPTK	*Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan / Increasing Education Quality of the Educators*
P4TK	*Pusat Pengembangan, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/Center for Educator and Education Personnel Development and Empowerment*
PUP3B	*Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan dan Pembangunan Berkelanjutan*

RAMP	*Recognition and Mentoring Program*
RCE	*Regional Center of Expertise*
SCP	*Sustainable Consumption and Production*
SD	*Sustainable Development*
TK	*Tenaga Kependidikan / Education Personnel*
UNCSD	*United Nations Commission on Sustainable Development*
UNDESD	*United Nations Decade of Education for Sustainable Development*
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
UNEP	*United Nations Environment Programme*
UNIDO	*United Nations Industrial Development Organization*
UU	*Undang Undang*
USD	*United States Dollar*
WWF	*World Wild Life Fund for Nature*
YLKI	*Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*
YPB	*Yayasan Pembangunan Berkelanjutan / Foundation for Sustainable Development*

DAFTAR BOKS, GAMBAR, BAGAN, DAN TABEL

No	Judul	Halaman
Bab I		
Boks 1.1	Indonesia, Negara Kepulauan	4
Boks 1.2	Status Lingkungan Global *(Global Environment Outlook)* 2012	5
Boks 1.3	Kekayaan Keaneka-ragaman Hayati Indonesia	6
Boks 1.4	Gaya hidup berkelanjutan	14
Tabel 1.1	Perkembangan penduduk Indonesia dan jumlah penduduk dunia 2010	2
Tabel 1.2	Strata kelas menengah Indonesia (dalam juta orang) – Pengeluaran USD 2 – USD 20 per orang per hari	2
Tabel 1.3	Presentase kelas menengah Indonesia dalam wilayah	3
Gambar 1.1	Kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi ancaman bagi sumber daya alam	3
Gambar 1.2	Pembalakan liar makin memprihatinkan	8
Gambar 1.3	Contoh *Eco Label*	9
Gambar 1.4	Cintailah produk-produk lokal	10
Gambar 1.5	*Junk Food*, makanan yang tidak sehat bagi tubuh	10
Gambar 1.6	Logo *Fair Trade*	11
Gambar 1.7	Godaan diskon pada konsumen	12
Bab II		
Bagan 2.1	Pilar pembangunan berkelanjutan	16
Bagan 2.2	Faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen	20
Boks 2.1	Konsep konsumsi berkelanjutan	17
Boks 2.2	Pendidikan konsumsi berkelanjutan: Tema inti pembangunan berkelanjutan	17
Boks 2.3	Apa yang membedakan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dengan pendidikan lain?	19
Tabel 2.1	Hubungan antara PKB dan Tantangan pembangunan berkelanjutan	18
Tabel 2.2	Hasil *(outcomes)* dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan	21
Gambar 2.1	Siswa-siswa berjalan ke sekolah	17
Gambar 2.2	Siswa belajar di alam terbuka	17
Gambar 2.3	Konsumsi berkelanjutan peduli terhadap kesehatan ibu dan anak	18
Gambar 2.4	Para Ibu berbelanja sayur segar di pasar tradisional	19
Gambar 2.5	Guru: Tokoh sentral dalam reorientasi pendidikan	24
Bab III		
Bagan 3.1	Sistem pendidikan di Indonesia	37
Bagan 3.2	Tahapan Pembelajaran *Inquiry*	40
Bagan 3.3	Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan Guru	40
Bagan 3.4	Contoh pertanyaan panduan yang dapat diajukan Guru pada siswa kelas 10 Ilmu Pengetahuan Alam	42
Bagan 3.5	Topik Lintas Mata Pelajaran untuk siswa Kelas 8	45

Bagan 3.6	5 Elemen Pendekatan Menyeluruh dari Sekolah *(Whole School Approach)* untuk pendidikan lingkungan hidup / pendidikan pembangunan berkelanjutan	53
Bagan 3.7	Tangga Partisipasi	54
Bagan 3.8	Hasil Nyata dari Implementasi Pendekatan Menyeluruh	55
Boks 3.1	Konsumsi Berkelanjutan: Perilaku yang lebih bertanggung jawab	35
Boks 3.2	Prinsip pengembangan kurikulum	36
Boks 3.3	Deklarasi Bandung, Keterlibatan Kaum Muda dalam Gaya Hidup Berkelanjutan	52
Boks 3.4	Ciri-ciri Pendekatan Menyeluruh di Sekolah	54
Boks 3.5	Ekonomi Pemenuhan Kebutuhan Sendiri: Skema Berbeda dari Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	64
Boks 3.6	Matapencaharian Berkelanjutan dengan masalah Pangan sebagai contoh: Beberapa saran untuk membangun PKB	66
Tabel 3.1	Prinsip Penting dalam Kurikulum	37
Tabel 3.2	Standar Kompetensi Tahun ke 8 berbasis kurikulum 2013	43
Tabel 3.3	Tema Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan yang dapat diajarkan kepada siswa	44
Tabel 3.4	Identifikasi Standar Kompetensi, Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap yang memuat PKB	46
Tabel 3.5	Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap terhadap gaya hidup manusia di Kelas 8, Semester 1	47
Tabel 3.6	Contoh Format Rencana Pembelajaran	49
Tabel 3.7	Penyusunan Pelajaran di Kelas 8 agar berkaitan dengan visi dan prinsip dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan	50
Gambar 3.1	Anak muda Indonesia membersihkan lingkungan	26
Gambar 3.2	Ada lebih dari 3000 kelompok etnis di Indonesia, dengan sekitar 50-70 juta penduduk asli, dengan kebudayaan masing-masing	28
Gambar 3.3	Keluarga Indonesia	29
Gambar 3.4	Diskon untuk produk mewah	30
Gambar 3.5	Makanan di udara terbuka cenderung terkontaminasi	31
Gambar 3.6	Indonesia kaya akan beragam jenis ikan	32
Gambar 3.7	Pertanian tetap menjadi kegiatan utama	33
Gambar 3.8	Siswa berdiskusi di dalam kelas	39
Gambar 3.9	Siswa sedang membersihkan sungai	42
Gambar 3.10	Siswa sedang mewawancarai tokoh desa	43
Gambar 3.11	Bekerja dengan komunitas untuk membersihkan lingkungan	48
Gambar 3.12	Anak-anak belajar tentang alam lingkungan	48
Gambar 3.13	Anak-anak sedang mengecat toilet	48
Gambar 3.14	Siswa sedang mempresentasikan hasil belajarnya	48
Gambar 3.15	Siswa memamerkan hasil produk mereka	51
Gambar 3.16	Siswa belajar di luar kelas	51
Gambar 3.17	Hindari 5 P demi kesehatan bersama	51
Gambar3.18	Kedai Kewirausahaan SMKN 2 Boyolangu	51
Gambar 3.19	Siswa sedang menikmati makanan	51
Gambar 3.20	Beberapa jenis tempat sampah	52
Gambar 3.21	Sepeda siswa, transportasi tanpa polusi	52

Gambar 3.22	Kompos Toyo SMPN 1 Balikpapan	52
Gambar 3.23	Siswa menari tarian daerah	52
Gambar 3.24	Berhenti memakai formalin	52
Gambar 3.25	Siswa sedang menggambar lingkungan	52
Gambar 3.26	Bercocok tanam di lahan terbatas	52
Gambar 3.27	Siswa sedang bereksperimen	55
Gambar 3.28	Siswa sedang belajar di dalam kelas	55
Picture 3.29	Hasil karya siswa dalam belajar	55
Picture 3.30	Program Adiwiyata	55
Picture 3.31	Pengaplikasian program Adiwiyata di sekolah	56
Picture 3.32	Pelatihan guru	57
Picture 3.33	Pasar tradisional	58
Picture 3.34	Kreasi yang terbuat dari bahan daur ulang	58
Picture 3.35	Anak-anak belajar menanam makanan lokal	60
Picture 3.36	Contoh majalah tentang lingkungan	61
Picture 3.37	Tradisi budaya untuk menghormati hasil panen (Bali)	62
Picture 3.38	Pemenang CSL 2012	63
Picture 3.39	Batik tulis dengan pewarna alami	64
Picture 3.40	Eco-label pada produk Java Furniture	64
Picture 3.41	Anak-anak Masa Depan: Konsumsi Berkelanjutan untuk kehidupan generasi mendatang	65
Picture 3.42	Melestarikan makanan tradisional	66
Bab IV		
Tabel 4.1	Potensi peningkatan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam kerangka kebijakan pemerintah	68
Gambar 4.1	PKB dapat diterapkan dalam pendidikan formal di sekolah	72
Gambar 4.2	Program kesehatan masyarakat yang didukung oleh perusahaan dan individu	74
Gambar 4.3	Beragam gadget dan komputer dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi PKB	75
Gambar 4.4	Menghargai makanan lokal sebagai bagian dari PKB	75
Bab V		
Bagan 5.1	Tema PPB dalam pendidikan formal di 6 negara di Asia Timur dan Asia Tenggara	84
Tabel 5.1	Tantangan pembangunan di kawasan Asia Pasifik	80
Tabel 5.2	Perkiraan Pertumbuhan Kelas Menengah di kawasan Asia Pasifik	81
Tabel 5.3	Jenis promosi pasar hijau di Asia Timur dan Asia Tenggara	83
Tabel 5.4	Langkah-langkah dalam proses penguatan kelembagaan bagi PKB dengan kasus Indonesia	89

BAB I:

MENJAWAB TANTANGAN: KONDISI DI INDONESIA

- Jasa Lingkungan Menopang Kehidupan Manusia
- Tantangan Masa Kini dan Masa Depan
- Konsumsi Berkelanjutan - Merawat Sumber Daya Alam,Mengedepankan Manusia
- Solidaritas Sosial: Dua Dunia yang Berbeda

Jasa Lingkungan Menopang Kehidupan Manusia

Manusia menggunakan jasa lingkungan dari sumber alam untuk kehidupannya (udara, air, matahari, tanah, berbagai penganan dari flora dan fauna, kayu, tambang dll). Planet bumi yang hanya satu, diharuskan memberi pelayanan jasa lingkungan bagi penduduk yang terus meningkat, padahal eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung dan pencemaran terus meningkat, sehingga ketersediaan jasa lingkungan bagi manusia terganggu.

Bila kebutuhan akan jasa lingkungan telah melebihi kapasitas sumber alam untuk memenuhinya, maka perlu dilakukan langkah solusi dalam cara pemanfaatan nya. Langkah solusi ini penting karena ketersediaan sumber alam yang cukup dan berkualitas merupakan hal yang tidak bisa ditawar untuk keberlangsungan hidup manusia terutama mereka yang mata pencaharian nya secara langsung tergantung pada sumber daya alam dan bagi bergeraknya pembangunan ekonomi. Tanpa sumber alam maka kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi terancam.

Tantangan Masa Kini dan Masa Depan

Jumlah Penduduk Meningkat

Penduduk Indonesia melaju pesat. Pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia sekitar 60 juta, menjadi sekitar 237 juta pada 2010 (*Statistics* Indonesia, 2011b, p. 11) dan diperkirakan mencapai sekitar 270,5 juta pada tahun 2025 atau meningkat 4,5 kali lipat sejak tahun 1930 (BPS, Bappenas & UNFPA Indonesia, 2008, p. 25).

Di dunia pada tahun 2010 Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar ke-4, setelah China (1, 341 milyar), India (1,225 milyar) dan Amerika Serikat (310 juta). Penduduk dunia yang pada tahun 2000 mencapai 6,1 milyar diprediksi akan menjadi 8,9 milyar pada tahun 2050 (*Department of Economic and Social Affairs of United Nations Secretariat*, 2004, p. 3).

Penduduk Indonesia berjumlah 60 juta pada tahun 1930, dan meningkat menjadi 237 juta pada tahun 2010, dan diperkirakan mencapai 270,5 juta pada tahun 2025. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia.

Tabel 1.1:
Perkembangan Penduduk Indo nesia dan Jumlah Penduduk Tertinggi 2010

Tahun	Populasi (Juta)	
1930	60,700	
1960	95,259	
1990	178,379	
2010	237,641	
2025	2780,538	
Negara	**Populasi 2010 (Miliar)**	**Persentase**
China	1,36	20%
India	1,21	17%
USA	0,31	5%
Indonesia	0,24	3%
Brazil	0,20	3%
World	**6,92**	**100%**

Catatan: Populasi Indonesia th 2010 pada tabel di atas berbeda karena sumber kutipan berbeda. Mengingat kecilnya perbedaan maka hal ini dapat diterima (jumlah populasi sekitar 240 juta)

Sumber:
Statistics Indonesia. (2011). Trends of the selected socio economics indicators of Indonesia. Retrieved from http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2012.pdf.
Department of Economic and Social Affairs of United Nations. (2011). World population prospects, the 2010 revision. Retrieved from http://esa.un.org/wpp/Analytical-Figures/htm/fig_11.htm.

Tumbuhnya Kelas Menengah – Kecenderungan Pola Konsumsi Berlebihan

Dari hasil penelitian, Indonesia telah masuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah, dengan pendapatan kotor per kapita USD 3,700 di tahun 2009 dari pendapatan USD 2200 pada tahun 2000 (World Bank, 2013 c). Jumlah penduduk dengan pengeluaran per hari USD 2- USD 20 per orang dianggap sebagai kelas menengah, yang pada tahun 2009 berjumlah 93.31 juta, meningkat dari 45.4 juta pada tahun 1999, atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun seperti terlihat dari tabel 1.2.

Tabel 1.2:
Strata Kelas Menengah di Indonesia (dalam juta orang)
Pengeluaran USD 2 – USD 20 / per orang /hari

Pengeluaran		1999	2009
Menengah Bawah	(USD 2-4)	3.75	68.80
Menengah	(USD 4-10)	7.5	22.28
Menengah Atas	(USD 10-20)	0.4	2.23
Total		45.4	93.31

Sumber:
Asian Development Bank. (2010). The rise of Asia's middle class. Key indicators for Asia and the Pacific 2010 (41st ed.). Retrieved from http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2010. hal 6.

Data dari *Asian Development Bank* lebih lanjut menunjukkan bahwa pengeluaran per-hari per-orang USD 2 - USD 20 di Indonesia secara nasional meningkat dari 25,0% di tahun 1999 menjadi 42,7% pada tahun 2009. Data sekaligus menunjukkan peningkatan kelompok ini di pedesaan menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun (lihat tabel 1.3)

Tabel 1. 3: Presentase Kelas Menengah Indonesia dalam Wilayah (1999 dan 2009)

Dengan Pengeluaran per Hari per orang USD 2 – USD 20 Berdasarkan Wilayah		
	1999	**2009**
Nasional	25%	42.7%
Perkotaan	44%	62.0%
Pedesaan	13.6%	28.7%

Sumber:
Asian Development Bank. (2010). The rise of Asia's middle class. Key indicators for Asia and the Pacific 2010 (41st ed.). Retrieved from http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2010. hal 7.

Dengan pertumbuhan GDP sekitar 6% seak 2007 (pertumbuhan GDP 6,3% tahun 2007, dan 6,5% tahun 2011) (World Bank, 2013 b), maka diperkirakan kelas menengah akan tetap menjadi bagian yang besar dari total populasi.

Jumlah pengeluaran dari kelas menengah ini menunjukkan ada pola konsumsi yang berubah kearah konsumsi bahan kebutuhan pokok (standar minimum pangan, sandang, papan)[1]. Data di bawah ini menggambarkan pola konsumsi tersebut :

- Penjualan mobil meningkat 17% dari tahun 2010 ke 2011, kehampir 900,000 mobil, dan peningkatan 11% untuk kwartal pertama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya pada waktu yang sama. Sebanyak 8 juta sepeda motor terjual tahun 2011, dengan prediksi terjual 9 juta pada tahun 2012 (The Economist, 2012).

- Elektronik diprediksi terjual dengan nilai USD 10,7 *billion* pada tahun 2012, dan diprediksi menjadi USD 17,8 *billion* pada tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 60% dalam waktu 4 tahun. Nilai jual komputer individu (*personal computer*) pada tahun 2010 adalah USD 3,1 *billion*, yang pada tahun 2011 menjadi USD 3,8 *billion* dan diperkirakan penjualan akan mencapai USD 4,3 *billion* pada tahun 2012 atau penjualan yang meningkat sebanyak 40% dari tahun 2010 (Market-Research.com, 2012).

- Dalam penjualan kosmetika, data menunjukkan peningkatan penjualan kosmetika impor sebesar 30% pada tahun 2012, dengan nilai IDR 2,44 triliun atau sekitar USD 253,7 milyar, sedangkan pada tahun 2011 nilai tersebut adalah RP. 1,87 triliun (Saksono, 2012).

Dengan jumlah penduduk yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka kelas menengah dengan potensi pola konsumsi berlebihan dikhawatirkan dapat mengancam ketersediaan sumber alam yang ada.

Gambar 1.1: Kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi ancaman bagi sumber daya alam

[1] Kebutuhan dasar berdasarkan International Labour Organization menetapkan standard hidup minimal yang terbagi atas dua hal. Pertama, tersedianya kebutuhan pokok minimum sebuah keluarga untuk konsumsi pribadi seperti pangan, papan dan sandang; kedua, kebutuhan mendasar akan jasa yng disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti tersedianya air minum yang aman, sarana sanitasi, transportasi publik, pelayanan kesehatan, dan pendidikan (UN Intellectual History Project, Briefing Note, Number 8, 2009, hal 3).

Populasi 2010	237 juta penduduk
Suku Bangsa	> 1300
Jumlah Pulau	17,000, dengan 6000 pulau dihuni
Panjang Pantai	54, 716 km
Luas daratan lebih dari	1.8 km^2
Luas perairan	5.8 km^2

Boks 1.1: Indonesia, Negara Kepulauan

Sumber:
Statistics Indonesia. (2011). Trends of the selected socio economics indicators of Indonesia.Retrieved from http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2012.pdf. Ministry of Environment. (2009). Fourth national report, the Convention on Biological Diversity. Retrieved from http://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-04-en.pdf.

Menurunnya Kualitas Lingkungan

Kondisi Global

Seiring berjalannya waktu, jumlah dan kualitas dari jasa sumber daya alam menurun. Bila sumber daya alam tidak lagi dapat menyediakan jasanya maka kelangsungan hidup manusia menjadi taruhan, kegiatan ekonomi tidak dapat berkembang, khususnya bagi mereka yang sumber kehidupannya secara langsung terkait sumber daya alam, dan dalam jangka panjang kondisi semacam ini memiliki potensi untuk mengguncang kedaulatan suatu negara.

Manusia memanfaatkan sumber daya alam sekitar 50% lebih banyak dibanding 30 tahun lalu, yakni 60 ton triliun bahan mentah tiap tahunnya. Mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan sekarang ini, maka ekstraksi sumber daya alam dapat menjadi 100 triliun ton pada tahun 2030. Penduduk negara kaya mengkonsumsi sumber daya alam 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan mereka di negara-negara termiskin. Rata-rata konsumsi sumber alam per orang per hari di Amerika Serikat 90 kg, di Eropa 45 kg, dan di Afrika 10 kg (SERI, GLOBAL 2000 & Friends of the Earth Europe, 2009, p. 3). Bila tiap orang hidup seperti cara hidup rata-rata penduduk Amerika Serikat, maka diperlukan 4 planet bumi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia atas sumber daya alam (WWF, Global Footprint Network & ZSL, 2012, p. 6).

Kondisi Di Asia Pasifik

Naiknya jumlah penduduk disertai pertumbuhan ekonomi yang berkembang di wilayah Asia Pasifik menunjukkan pola konsumsi kelas menengah yang meningkat yang dapat menyebabkan tekanan yang makin besar pada planet bumi. Pada tahun 1990 kelas menengah adalah 21% dari penduduk negara berkembang di Asia, yang menjadi 56% di tahun 2008 atau meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu kurang dari 2 dekade (KPMG, 2012, pp. 3-4). Menurut laporan UNEP, *Keeping Track of Our Changing Environment* (yang disiapkan sebagai proses *Global Environment Outook*),

Boks 1.2:
Status Lingkungan Global (*Global Environment Outlook*) 2012

Seperti tertulis dalam *Fifth Global Environment Outlook: Environment for the Future We Want* (UNEP, 2012a) dan *Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to Rio+20* (UNEP, 2011a) berikut ini adalah kondisi lingkungan terakhir yang membuat konsumsi berkelanjutan menjadi penting (*imperative*):

- **Konsumsi Daging serta Ikan**
  Antara tahun 1992 sampai 2007 penduduk telah meningkat 22%, jumlah konsumsi daging naik menjadi 26%, dan konsumsi ikan laut menjadi 32% lebih tinggi.
- **Kondisi Air**
  Penggunaan air secara global meningkat tiga kali lipat dalam 50 tahun terkahir. 80% dari penduduk tinggal di daerah yang terancam keamanan airnya, yang mempengaruhi 3,4 miliar orang, terutama mereka yang tinggal di negara berkembang. Persediaan air secara global menurun lebih dari dua kali lipat sepanjang 1960-2000.
- **Kondisi Hutan**
  Hutan primer telah menurun sebanyak 300 juta hektar sejak 1990.Kurang dari 10% hutan di dunia mempunyai sertifikat tata kelola hutan dari lembaga sertifikasi dunia yang utama.
- **Kondisi Laut**
  Kurang dari 1,5% wilayah laut dilindungi, dengan target 10% wilayah laut akan dilindungi pada tahun 2020.
- **Ancaman CO2**
  Meningkatnya kegiatan industri dan standar hidup yang lebih tinggi di banyak negara menyebabkan meningkatnya emisi gas COC2 sebesar 66% antara tahun 1992-2008.
- **Ancaman Plastik**
  Produksi plastik: 1992 sejumlah 116 ton telah meningkat menjadi 225 ton di tahun 2007 dan mencapai 265 ton pada tahun 2010.
- **Kondisi Umum**
  Hilangnya habitat alami dan keanekaragaman akuatik, pertanian tidak berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, polusi, konversi lahan, hilangnya hutan tropis – semuanya menyebabkan meningkatnya ancaman ketahanan pangan, dan kemiskinan, juga menurunnya kesehatan dan kesejahteraan manusia.

The living planet Index (kesehatan dari ekosistem bumi) telah menurun sebesar 12% secara global dan menurun 30% dalam ekosistem tropis antara tahun 1992 sampai tahun 2007 (UNEP, 2011a, p. 45). Itulah sebabnya sangat penting untuk melakukan pendidikan konsumsi berkelanjutan demi masa depan yang berkesinambungan.

Menurut laporan *The Living Planet* 2012, lebih dari 40% terumbu karang dan bakau di wilayah Asia telah hilang dalam 40 tahun terakhir sehingga menyebabkan berkurangnya cadangan ikan dan sumber daya laut lainnya bagi kehidupan. Padahal Asia Timur lebih dari 75% penduduk (hampir 2 milyar orang) tinggal di wilayah pesisir. 80% penduduk dunia menggunakan lebih banyak sumber daya alam dari kemampuan yang dapat dipenuhi dalam wilayah mereka (ADB & WWF, 2012, pp. 23, 28 & 37).

Manusia memanfaatkan sumber daya alam sekitar 50% lebih banyak dibanding 30 tahun lalu, yakni 60 ton triliun bahan mentah tiap tahunnya. Mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan sekarang ini, maka ekstraksi sumber daya alam dapat menjadi 100 triliun ton pada tahun 2030.

***The living planet Index* (kesehatan dari ekosistem bumi) telah menurun sebesar 12% secara global dan menurun 30% dalam ekosistem tropis antara tahun 1992 sampai tahun 2007**

Kondisi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keaneka-ragaman hayati yang tinggi di dunia, yang belum sepenuhnya dipelajari untuk digunakan, namun sebagian telah punah, dan sisanya terancam punah. Selain itu, Indonesia mengalami turunnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dari berbagai data sebagai berikut:

Keaneka-ragaman Hayati Indonesia yang Berlimpah

Indonesia merupakan negara terkaya keaneka-ragaman hayatinya setelah Brazil. Dengan wilayah daratan lebih dari 1,8 juta km2 (Kementerian Dalam Negeri, 2005 seperti dikutip Kementerian Lingkungan, 2009, hlm. 2) dan daerah perairan 5,8 juta km2 (Divisi Hidrologi Kelautan Indonesia, 1987 seperti dikutip Kementerian Lingkungan Hidup, 2009, hlm. 2), Indonesia memiliki flora dan fauna yang kaya serta sumber genetika lainnya. Laporan nasional ke-4 tentang keaneka-ragaman hayati yang ditulis oleh Kementerian Lingkungan tahun 2009 menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu dari 5 negara di dunia dalam keragaman spesies. Laporan tersebut juga mencatat bahwa Lembaga Pengetahuan Indonesia mencatat ada 31 ribu spesies tumbuhan berkayu dan lebih dari 12% spesies mamalia hidup di Indonesia.

Keaneka-ragaman hayati Indonesia ditemukan dalam ekosistem yang kaya di hutan, tanah basah, karst, danau, sungai dan lainnya.

Indonesia adalah satu dari 5 negara di dunia dalam keragaman spesies. Ada 31 ribu spesies tumbuhan berkayu dan lebih dari 12% spesies mamalia hidup di Indonesia. Keaneka-ragaman hayati Indonesia ditemukan dalam ekosistem yang kaya di hutan, tanah basah, karst, danau, sungai dan lainnya.

Pada tahap ini, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan keaneka-ragaman hayati yang dimiliki. Keaneka-ragaman pangan dapat mendukung penduduk Indonesia bila sebagian spesies telah punah. Selalu ada opsi lain untuk memastikan ketahanan pangan. Keaneka-ragaman hayati membuka kesempatan untuk melakukan eksplorasi biomedicine atau obat alami, yang akan sangat penting buat masa depan dan dapat mengobati berbagai penyakit yang sekarang belum ditemukan solusinya, atau untuk mengatasi penyakit baru. Keaneka-ragaman hayati juga sumber bahan bagi kosmetika, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Bagi industri, bahan mentah mungkin dapat ditemukan dalam keaneka-ragaman hayati yang belum disentuh, yang dapat membantu manusia untuk mengambil manfaat darinya, yang kini belum diketahui. Penelitan dan inovasi merupakan hal penting untuk mencari kegunaan dari berbagai spesies baik dari fauna maupun flora, di pegunungan maupun dataran rendah, di daratan atau di lautan, di sungai-sungai atau di savana. Mereka perlu dipelajari untuk kepentingan kesejahteraan manusia.

Boks 1.3:
Kekayaan Keaneka-ragaman Hayati Indonesia

- Ekosistem Laut
  Menurut Suharsono dan N. Purnomohadi, ekosistem laut Indonesia merupakan "rumah dari lebih 480 spesies terumbu karang keras di wilayah Timur yang merupakan sekitar 60% dari terumbu karang keras di dunia " (seperti dikutip di Winter, 2009, hlm. 35).
- Produk Non-Kayu (Non-Timber)
  Keaneka-ragaman hayati Indonesia tidak hanya penting untuk keseimbangan ekosistem tetapi juga menyediakan nilai ekonomi yang signifikan seperti obat dan produk non-kayu lainnya. Diprediksi bahwa 6000 spesies tanaman dan binatang secara bersama menghasilkan pangan, kerajinan tangan, obat, bahan bakar, dan materi bangunan" (World Bank, 1996, para. 2).
- Sumber Kehidupan
  Sebagai tambahan, keaneka-ragaman hayati memberikan pelayanan sebagai sumber kehidupan di pedesaan dan masyarakat yang tinggal di hutan. Diperkirakan 40 juta orang Indonesia adalah masyarakat pedesaan yang sangat tergantung pada keaneka-ragaman hayati untuk kehidupan yang mencukupi diri sendiri atau *self substence* (World Bank, 1996, para. 2). Keaneka-ragaman hutan Indonesia memainkan peran penting tidak hanya dari segi jasa ekosistem tetapi juga untuk peran sosial, budaya dan ekonomi bagi banyak masyarakat lokal.

Ancaman yang Terjadi Pada Keaneka-ragaman Hayati

Untuk melindungi keaneka-ragaman hayati Indonesia, kita perlu memahami apa yang dimiliki Indonesia, bagaimana melindunginya, dan bagaimana mengambil manfaat darinya secara optimum demi konsumsi berkelanjutan serta ancamannya. Kekayaan hayati Indonesia merupakan potensi untuk konsumsi berkelanjutan karenanya perlu ditingkatkan pemanfaatannya, dilindungi dan ditekan ancaman pada keaneka-ragaman hayati.

Hutan dan laut Indonesia merupakan sumber begitu banyak spesies yang belum sempat dipelajari untuk bisa digunakan seluruhnya. Namun sebelum sempat digunakan secara optimal, ternyata kerusakan yang terjadi sangat memprihatinkan. Menurut laporan Badan Pangan dan Pertanian dunia yang berjudul *State of the World's Forest*, laju hilangnya hutan Indonesia dari tahun 2000-2010 mencapai 498.000 hektar/tahun atau sekitar 0,5%/tahun (2011, p. 113). Sedangkan terumbu karang sebagai rumah berbagai biota laut, terutama ikan, juga mengalami kerusakan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa pada 1.076 lokasi kawasan terumbu karang di Indonesia, 30,76% di antaranya dalam kondisi rusak berat, 36,90% mengalami kerusakan dengan kondisi sedang, dan 26,95% masih dalam kondisi baik, serta hanya tinggal 5,58% dalam kondisi sangat baik (Kemenko Kesra, 2012). Dari sisi pertanian terdapat beberapa masalah serius, seperti hilangnya benih asli padi dan lahan sawah subur yang dikonversi untuk penggunaan lain seperti lahan industri, perumahan, jalan dan sebagainya.

Menteri Pertanian Suswono pada Januari 2013 menyatakan bahwa konversi sawah menjadi lahan non-pertanian adalah sebesar 100.000 hektar per tahunnya (Maliara, Tiap tahun 100 ribu hektar lahan pertanian hilang , 2013). Situasi ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan tindakan nyata untuk memastikan keamanan keaneka-ragaman hayati dan sumber daya alam bagi kehidupan generasi Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.

Degradasi Lingkungan

Data berikut menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan yang cukup memprihatinkan.

- Sumber Air menurun (mata air, kualitas sungai, konversi lahan)

  Berbagai wilayah di Indonesia menghadapi persoalan semakin kritisnya sumber air dengan keringnya mata air. Hal ini dihadapi misalnya oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam periode antara 1985 sampai 2009, mengalami pengurangan 75% dari sumber-sumber mata airnya. Di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 1985, masih dapat ditemukan keberadaan 702 titik sumber mata air. Akan tetapi jumlah ini terus berkurang, sehingga pada tahun 2009 hanya dapat ditemukan adanya 178 titik sumber mata air (Antara, 2009).

  Masalah tersebut merupakan cermin dari masalah yang dihadapi oleh sungai-sungai dan daerah-daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. Dari keseluruhan jumlah daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia yang terus diamati, dari 458 DAS, pada tahun 1996 terdapat 22 DAS yang dinilai dalam kondisi sangat kritis. Dengan terus memburuknya kondisi berbagai sungai dan DAS, pada tahun 2009, jumlah DAS yang berada dalam kondisi sangat kritis telah meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 62 DAS (Kementerian Kehutanan 2009, seperti di kutip Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, p. 81).
- Berkurangnya hutan alami, serta meluasnya lahan kritis (lahan yang mengalami kerusakan, sehingga tidak lagi menjalankan perannya dalam siklus hidrologis, maupun perannya sebagai sumber produksi hayati). Dari laporan Kementerian Kehutanan pada tahun 2009, di antara tahun 2000 hingga tahun 2005, 7 wilayah pulau-pulau besar di Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku dan Papua) diperkirakan telah mengalami deforestasi seluas 5,3 juta hektar sehingga rata-rata setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun tersebut, Indonesia mengalami deforestasi seluas 1 juta hektar (Kementerian Kehutanan, 2010).

  Deforestasi merupakan salah satu penyebab utama dari semakin luasnya lahan kritis. Lahan kritis di Indonesia, yang pada tahun 1989 tercatat luasnya 13,3 juta hektar, pada tahun 2006 telah tercatat seluas 30 juta hektar (Statistics Indonesia, 2011a).

Gambar 1.2: Pembalakan liar makin memprihatinkan

Sejak tahun 1990 sampai tahun 2010, wilayah hutan Indonesia menurun sebesar 20% atau sekitar 24 juta hektar (ADB & WWF, 2012, p. 35). Di wilayah Heart of Borneo (Pulau Kalimantan) rata-rata 850,000 hektar hutan hilang tiap tahun karena adanya perkebunan kelapa sawit, penambangan, dan usaha produksi kayu. Bila kecenderungan ini berlanjut, tutupan hutan pada tahun 2020 akan anjlok sampai kurang dari sepertiganya dibanding kondisi tahun 1950 (ADB & WWF, 2012, p. 12).

- Menurunnya kualitas lingkungan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampah yang tidak terolah di berbagai kota di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Seperti dikemukakan dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut: "Timbunan sampah terbesar terjadi di Pulau Jawa, di mana kota-kotanya memiliki populasi penduduk yang padat. Pada tahun 2007 timbunan sampah mencapai hampir 65.000 m^3 / hari dan mendekati 70.000 m^3 /hari pada tahun 2008. Volume ini sangat kontras dengan pulau-pulau lain dengan luas lahan yang lebih besar, seperti Sumatera yang hanya mencapai kurang dari sepertiga volume sampah di Jawa, sedang daerah-daerah lain di Indonesia umumnya tidak mencapai 10.000 m3/hari. Dari total volume sampah tersebut, hanya sekitar 70% dapat terangkut ke *landfill*, yang mengindikasikan masalah pencemaran udara dari sampah yang tak terangkut, sehingga cara pemusnahan dengan dibakar, dibuang ke badan air atau lahan lain kemungkinan semakin meningkat." Timbunan sampah yang tidak dikelola dengan semestinya menimbulkan persoalan kualitas udara.

  Sebagai contoh, untuk wilayah Bandung Metropolitan (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi) secara total data pada tahun 2004, sampah yang tak terangkut rata-rata sekitar 55% (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, p. 46).

Konsumsi Berkelanjutan - Merawat Sumber Daya Alam, Mengedepankan Manusia

Dari data-data di atas tampak situasi yang memerlukan perhatian serius karena terdapat ketimpangan antara ketersediaan sumber alam *(biocapacity)* dan kebutuhan manusia. Meningkatnya jumlah penduduk, ditambah dengan kondisi sumber daya alam yang menurun, dan potensi tumbuhnya pola konsumsi berlebihan dari berkembangnya kelas menengah, menunjukkan pentingnya pendidikan konsumsi berkelanjutan *(critical)*. Pendidikan konsumsi berkelanjutan (PKB) bertujuan untuk:

- **Pada dimensi lingkungan:**
  PKB memberikan pemahaman tentang perlunya melakukan tindakan penghematan sumber daya alam, dan meminimalkan dampak negatif pada alam.
- **Pada dimensi sosial:**
  Pilihlah produk yang memiliki sedikit dampak negatif pada lingkungan. Perhatikan skala dampak kontaminasi, kuantitas, dan area cakupan polusi (contoh, polusi sungai berdampak pada banyak pihak)

Secara ringkas dapat disimpulkan, PKB membuat manusia menjadi konsumen yang punya rasa tanggung jawab lingkungan dan tanggung-jawab sosial, bahkan tanggung-jawab moral, demi kehidupan manusia untuk saat ini dan untuk masa mendatang.

Dimensi Lingkungan dalam Konsumsi Berkelanjutan

Dengan tingginya kebutuhan jasa lingkungan dari sumber daya alam yang terbatas serta menurunnya kualitas sumber daya alam, maka konsumen perlu membuat keputusan yang bertanggung-jawab ketika hendak melakukan transaksi konsumsi. Pertimbangan rasional dalam mengkonsumsi perlu menjadi pertimbangan utama, juga mengalihkan konsumsi emosional yang tanpa melihat implikasi dari pola konsumsi. Dari dimensi lingkungan pertimbangan yang dilakukan dapat mencakup hal berikut:

- Penggunaan jasa lingkungan dari sumber alam secara efisien (tapak ekologis rendah: jumlah pemakaian sumber daya alam yang rendah). Pilihlah produk yang seminimum mungkin menggunakan sumber alam seperti air dan energi, kayu, dan sebagainya (efisiensi). Dengan kata lain, tapak ekologis dari produk yang dipilih adalah yang rendah. Bandingkan produk yang sama dari berbagai merek atau sumber.
- Dampak negatif yang rendah pada lingkungan. Pilihlah produk yang dampak pada lingkungannya rendah dengan memperhatikan tingkat pencemaran yang dihasilkan: tingkat bahaya, jumlah dan lingkup akibat pencemaran (misalnya pencemaran sungai mempunyai dampak jauh lebih luas karena mencakup seluruh pengguna air sungai di sepanjang daerah aliran sungai).
- Pilihlah produk bertanda *eco-label* yang diakui. Pilihlah produk bertanda *eco-label*, yakni poduk yang diproduksi dengan *inputs* dan proses yang ramah lingkungan dan produknya juga ramah lingkungan (efisien penggunaan sumber alam, minimum sampah, minimum polusi, dan upaya penanganan kemasan, dll). Tanda *eco-label* tidak umum terdapat dalam produk Indonesia, karena masih dalam proses untuk menuju ke arah ini.

Gambar 1.3: Contoh *Eco-Label*

Sejumlah produk impor mempunyai *eco-label*, tetapi membeli produk impor tidak ramah lingkungan karena memerlukan energi yang tinggi untuk dikirim ke Indonesia. Sejumlah produk kayu dan mebel mempunyai tanda *eco-label* seperti *Java Lestari Furniture* dengan sertifikat dari *Rain Forest Alliance* (*Forest Stewardship Council eco-label*). Sertifikat *eco-label* ini menunjukkan bahwa kayu untuk mebel berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Berbagai *eco-label* dapat diperoleh seperti untuk produk pertanian, jasa industri, dan sebagainya. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai berbagai *eco-label* silahkan mengunjungi: www.rainforest-alliance.org, www.ecolabel.index.com, www.globalecolabelling.net, www.lei.or.id

- Belilah Produk sesuai kebutuhan – tidak berlebihan bahkan untuk produk *eco-label*. Untuk semua jenis produk konsumen seyogyanya membeli secukupnya, dan tidak berlebihan, yang berarti turut mengerem pemakaian sumber daya alam. Prinsip ini juga berlaku untuk produk bertanda *eco-label*, yang hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan.
- 3 R (*reduce*, *reuse*, *recycle* – mengurangi jumlah sampah, memakai ulang, dan mendaur ulang). Tujuan dari 3 R adalah pemakaian sumber alam dapat dikurangi dan dampak negatif pada lingkungan dikurangi karena sampah dapat diminimalkan. Mengurangi jumlah sampah dengan berbagai cara seperti membeli produk baru hanya untuk yang seringkali dipakai, produk dengan sesedikit mungkin kemasan (bukan berlapis), pergi bersama rombongan dalam satu mobil dan bukan satu mobil sedikit orang, membaca koran dan majalah *online* daripada membeli koran dan membuangnya, dan sebagainya.

Produk tertentu bisa digunakan kembali dan bukan segera dibuang sehingga mengurangi penggunaan sumber daya alam guna memproduksi barang serupa, sekaligus mengurangi jumlah sampah. Misalnya menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang daripada memakai tas plastik dari toko yang sekali pakai lantas dibuang; baju, tas, sepatu lama yang masih baik, diberikan pada keluarga yang membutuhkan, atau rumah yatim piatu; berbagai botol selai dapat dipakai lagi untuk menyimpan gula, kopi, atau bumbu berbentuk bubuk.

Berbagai macam produk dapat didaur ulang sehingga masih bisa dimanfaatkan dalam bentuk baru sehingga mengurangi pemakaian sumber alam, dan mengurangi jumlah sampah. Misalnya, daur ulang plastik menjadi biji plastik yang siap digunakan untuk produk baru; kemasan plastik berbagai produk diolah menjadi tas, dompet, dan penyimpan alat tulis; koran dan kertas bekas diproses sehingga menjadi kertas daur ulang siap pakai; sampah organik dikomposkan sehingga menjadi pupuk alami, dan sebagainya.

- Belilah produk setempat.
  Sedapat mungkin gunakan produk setempat untuk memenuhi kebutuhan. Sikap ini memastikan penghematan pemakaian sumber alam (untuk transportasi, kemasan, dsb), mengembangkan potensi alam setempat, menumbuhkan pengetahuan dan keahlian komunitas dalam pemanfaatan sumber alam setempat, dan bahkan meningkatkan daya tahan atau kedaulatan dari komunitas atau negara.

Gambar 1.4: Cintailah produk-produk lokal

Dimensi Sosial dalam Konsumsi Berkelanjutan

Konsumsi berkelanjutan meliputi pengetahuan tentang keamanan pangan demi kesehatan, serta sifat menghormati hak asasi manusia, keadilan dalam perdagangan, dan rasa solidaritas dari kelompok yang mampu kepada mereka yang miskin merupakan hal yang dipertimbangkan dari sisi dimensi sosial.

Makanan Sehat/Keamanan Pangan (Food Safety)

Di pasar banyak dijumpai makanan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Beberapa makanan mengandung boraks untuk mengawetkan makanan agar tahan lama, yang lain mengandung pewarna sintetis (kimia) yang murah dan membuat warna pangan lebih menarik.

Gambar 1.5: *Junk Food*, makanan yang tidak sehat bagi tubuh

Sejumlah makanan mengandung lemak/kolesterol berbahaya, atau kandungannya melebihi batas ambang yang ditetapkan sebagai makanan yang aman. Beberapa makanan dimasak dengan cara yang tidak sehat seperti menggunakan minyak terlalu banyak, memakai alat masak yang tidak aman untuk makanan. Selain itu, penyajian yang tidak bersih menyebabkan makanan dan minuman menjadi tidak sehat. Makanan yang mudah dihinggapi lalat dan debu karena tidak ditutup pelindung makanan, jadi tercemar. Demikian juga makanan dan minuman yang ditempatkan di wadah yang tidak bersih, dan menggunakan peralatan makan kotor, disentuh langsung oleh tangan telanjang, juga menyebabkan penganan menjadi tidak bersih. Bila orang selalu mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, tidak terlindungi dari kotoran, maka akan mudah menjadi sakit.

Konsumsi berkelanjutan meliputi pengetahuan tentang keamanan pangan demi kesehatan, serta sifat menghormati hak asasi manusia, keadilan dalam perdagangan, dan rasa solidaritas dari kelompok yang mampu kepada mereka yang miskin merupakan hal yang dipertimbangkan dari sisi dimensi sosial.

Keadilan Perdagangan (Fair Trade)

Harga dari produk dan jasa tidak selalu mencerminkan adilnya harga pada semua yang terlibat dalam rantai perdagangan, terutama pada asal mula dari rantai perdagangan. Penghasil produk atau jasa mendapat yang paling sedikit dari penjualan, sedangkan pedagang antara (distributor dan pengecer) mendapat yang paling banyak keuntungan. Dalam banyak hal, produk dari pertanian dan perikanan yang dijual tidak menghargai hasil kerja keras petani dan nelayan, mereka menerima harga termurah, sedangkan pedagang antara mendapat harga sampai 4 atau 5 kali lebih mahal. Produk kerajinan tangan yang memerlukan kreatifitas dan proses yang panjang dalam pembuatannya oleh pengrajin, mendapat harga sangat rendah di banyak negara, padahal di toko barang kerajinan di perkotaan barang tersebut dijual dengan harga berkali lipat.

Ketika membeli produk dan jasa maka konsumen dapat mempertimbangkan apakah telah menghargai hak pekerja yang menghasilkannya. Meski harga murah dan barang berkualitas baik merupakan hal yang diinginkan konsumen, tetapi bisa jadi harga murah berarti memberi kompensasi yang rendah kepada para pekerja. Penghasil batik tulis yang bekerja berbulan-bulan dengan ketekunan luar biasa tentu perlu mendapat penghargaan yang pantas atas batik tulis yang dikerjakan dengan tangan, sehingga pembeli diharapkan membeli dengan harga yang layak.

Gambar 1.6: Logo *Fair Trade*

Bila diketahui satu pabrik mempekerjakan anak sebagai buruh yang dibayar murah, maka konsumen mempunyai pilihan untuk tidak membeli produk tersebut kecuali pemilik pabrik memenuhi peraturan hak asasi buruh. Informasi dapat berasal dari laporan tahunan perusahaan, informasi di website perusahaan, dan rating perusahaan yang akuntabel, dan dengan memperhatikan berita di media massa apakah perusahaan tertentu terlibat masalah hukum, berkonflik dengan buruh, dan sebagainya. Biasanya produk perusahaan terkemuka dapat memberi informasi yang diperlukan.

Hak Asasi Manusia

Agar dapat lebih banyak keuntungan, pabrik seringkali menurunkan biaya operasi sebisa mungkin. Biasanya dalam biaya operasional, biaya untuk pekerja menempati urutan terbesar. Karena itu pengusaha seringkali berupaya untuk menekan biaya dengan mengurangi imbalan pekerja sebisa mungkin. Perusahaan kemudian tidak menerapkan hak asasi manusia (dalam hal ini hak buruh), seperti upah minimum buruh, tunjangan, eksploitasi buruh anak, dan hak lain seperti jumlah jam kerja maksimum (seharusnya tidak melebihi 8 jam per hari), cuti melahirkan, cuti haid bagi wanita, adanya mekanisme penyampaian keluhan dan mengakomodasi aspirasi dalam proses yang demokratis, dan sebagainya. Pekerja diharapkan bekerja dengan gaji serendah mungkin. Beberapa perusahaan bahkan mempekerja kan anak karena gaji mereka lebih kecil daripada orang dewasa. Bila informasi tersedia dan dapat diakses, konsumen dapat memillih produk dari perusahaan yang mematuhi peraturan hak buruh, yang bisa diketahui melalui serikat buruh, laporan tahunan, pernyataan pemerintah tentang kinerja perusahaan, dan media massa. Informasi yang diperoleh akan menjelaskan apakah perusahaan menghormati hak-hak buruh, tidak memiliki konflik dengan buruh, dan menghormati hak asasi manusia secara umum.

Pengaruh Derasnya Informasi dan Iklan Agresif

Dunia modern ditandai dengan arus informasi cepat dan meluas melalui berbagai media massa dan jaringan sosial (*social media*). Gaya hidup kelas menengah atas, film dan program TV tertentu, serta tumbuhnya mall atau *shopping center* yang mengekspos kehidupan mewah membuat konsumen tergiur untuk mengikuti. Ditambah iklan komersial yang sangat agresif, baik di berbagai media massa, media sosial dan melalui telepon untuk semua segmen pasar, tawaran berbagai hadiah yang merupakan barang atau jasa konsumtif (motor, mobil, *cellphone*, wisata ke luar negeri) , mudahnya mendapat kredit untuk pembelian berbagai barang dan jasa di luar kebutuhan pokok, adanya diskon dan *sale* yang terus-menerus diberitakan. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran konsumen sebelum membeli berbagai produk, sehingga konsumen tidak terjebak dalam situasi " Seharusnya saya tidak membeli barang yang tidak saya perlukan, saya membeli terlalu banyak. Seharusnya saya membeli apa yang betul-betul diperlukan."

Gambar 1.7: Godaan diskon pada konsumen

Konsumen perlu mewaspadai derasnya informasi tentang produk dan jasa yang diiklankan secara agresif: apakah memang barang yang ditawarkan benar-benar dibutuhkan, berkualitas baik, dan bukan sekedar untuk bergaya hidup mewah, demi status sosial, dan terperdaya oleh menariknya iklan, harga diskon dan harga murah; pandainya rayuan *salesman*, dan sebagainya. Manfaat dan kualitas dari produk perlu diteliti kebenarannya, prioritas belanja harus dikaji, walaupun kemampuan finansial memadai dan tidak menjadi beban untuk mengkonsumsi barang tertentu. Di lain pihak persoalan ini mensyaratkan adanya etika pemasaran yang perlu ditegakkan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi konsumen.

Produk yang dibeli berasal dari perusahaan dengan reputasi bertanggung-jawab.

Produk yang dibeli konsumen hendaknya berasal dari perusahaan tidak bermasalah secara hukum, memberikan informasi yang terbuka pada publik tentang cara kerja perusahaan dan kualitas produknya, dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa standar yang dapat tertera pada kemasan atau informasi produk antara lain seperti: memenuhi standar keamanan, standar mutu, informasi bahan yang digunakan, telepon yang dapat dihubungi bila ada masalah, ada alamat pabrik yang dapat dibuktikan, tanggal kadaluwarsa pada produk pangan, obat, kosmetika, dan sebagainya. Produk dari perusahaan besar umumnya mencantumkan info ini.

Banyak produk tersedia dalam keadaan segar atau diproduksi secara sederhana tanpa standar keamanan dan kesehatan, berasal dari industri kecil atau produk rumah-tangga, tanpa menerapkan prosedur standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Konsumen harus waspada bahwa produk bisa mengandung pengawet (formalin dan boraks misalnya), bahan pewarna bukan untuk pangan, sudah kadaluwarsa, busuk/basi, disajikan dalam kondisi tidak bersih dan mudah terkontaminasi. Pilihlah bahan pangan yang segar, tidak berbau, tidak mengandung pewarna pangan yang menyolok, perhatikan informasi dari pemerintah tentang makanan dan obat yang perlu dihindari, membeli di warung atau toko yang bersih, dan sebagainya.

Perusahaan mengeluarkan laporan tanggung-jawab sosial dan lingkungan (sustainability report).

Konsumen diharapkan untuk membeli produk dari perusahaan yang memiliki komitmen tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Hal ini berarti konsumen memilih produk mencerminkan tanggung-jawab sosial perusahaan dimana perusahaan menerapkan hak asasi manusia (antara lain): setidaknya memberikan gaji minimum standar pemerintah, tidak mempekerjakan buruh anak, ruang untuk buruh mengungkapkan aspirasi, menyediakan fasilitas keamanan kerja dan lingkungan kerja yang nyaman, memberi kesempatan pengembangan potensi dan minat individu, memperhatikan aspek keadilan diantara buruh, dan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas bagi konsumen.

Konsumen juga diharapkan membeli produk yang dihasilkan dari perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan: produk yang dihasilkan dari proses produksi yang aman dan efisien, dan telah memenuhi standar lingkungan.

Kedua tanggung jawab perusahaan tersebut seyogyanya dapat ditemui dalam Laporan Berkelanjutan perusahaan, yang dapat diakses oleh publik melalui laporan cetakan, website, publikasi gratis untuk publik dan lain-lain.

LOGO informasi singkat bagi konsumen

Logo merupakan simbol yang ditampilkan pada produk merupakan informasi singkat yang memberi petunjuk bagi konsumen untuk membuat keputusan secara mudah . Tanda logo khusus untuk produk *fair trade* mencerminkan perdagangan yang adil yang menghargai produsen pada titik awal dari rantai perdagangan, logo tertentu mencerminkan keamanan produk, seperti telah lolos dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), atau adanya tanda sertifikat halal yang penting bagi konsumen umat Islam, *eco label* mencerminkan produk yang diproses dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya.

Membeli Produk Lokal Meningkatkan Kesejahteraan

Selain menghemat penggunaan sumber daya alam, menggunakan produk lokal akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas setempat menghasilkan produk lebih berkualitas dalam jangka panjang, dan memungkinkan masyarakat menjadi mandiri, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

Bersikap Rasional

Pertimbangan rasional perlu dilakukan konsumen dalam membeli produk. Dalam hal ini konsumen perlu memiliki kesadaran penuh ketika berbelanja: membeli berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas, dan bukan karena terpengaruh godaan iklan, mempunyai informasi cukup dan akurat tentang produk yang akan dibeli, mengerti dampak produk bagi lingkungan dan konsekuensinya dalam jangka pendek dan panjang, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan memenuhi panggilan rasa keadilan dalam perdagangan.

Solidaritas Sosial: Dua Dunia Yang Berbeda

Planet bumi tempat kita hidup akan dalam kondisi genting bila kita terlalu banyak dan terlalu cepat mengkonsumsi, tanpa peduli pada orang lain dan pada keterbatasan daya dukung lingkungan. Negara-negara dengan pendapatan tinggi memiliki tapak ekologis (penggunaan sumber daya alam) 5 kali lipat dibandingkan negara-negara berpendapatan rendah (WWF, Global Footprint Network & ZSL, 2012). UNDP melaporkan bahwa 20% dari penduduk negara maju mengkonsumsi 86% dari USD 21,7 trilyun dari belanja konsumsi global pada tahun 1995 (UNDP, 1998, p. 56), sedangkan penduduk dunia lainnya mengkonsumsi sisanya. Bila pola konsumsi tinggi seperti ini berlanjut sehingga mencakup sejumlah besar dari penduduk negara berkembang, maka konsumsi manusia akan melebihi batas kapasitas planet bumi dan manusia memerlukan planet lain untuk mendukung selera konsumsi yang tumbuh dari kelas menengah, yang merupakan kelompok konsumen baru.

Di Indonesia, ada kelompok keluarga kelas menengah yang dapat menghabiskan USD 20 per-hari. Sebaliknya, ada keluarga miskin dengan jumlah 30 juta orang (Statistics Indonesia, 2011b, p. 48) hanya memperoleh kurang dari USD 1 per-orang per-hari (Ministry of National Development Planning & Ministry of Environment, 2012, p. 28). Keluarga miskin ini menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk pangan sebagai salah satu kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup.

Ini adalah dua dunia yang hidup dengan cara berbeda yang kontras, yang memerlukan rasa solidaritas sosial[1]. Mereka yang cenderung mempunyai pola konsumsi berlebihan, perlu menyadari konsekuensi dari konsumsi mereka yang dapat menguras sumber daya alam yang sudah terbatas dan membahayakan persediaan sumber alam secara global yang pada akhirnya dapat mengorbankan kehidupan seluruh penduduk dunia. Pada saat yang sama, kelompok kelas menengah perlu berempati dalam rasa solidaritas sosial pada kelompok yang kurang beruntung karena belum dapat mengkonsumsi dalam jumlah cukup dan berkualitas. Daripada memiliki pola konsumsi berlebihan, kelompok kelas menengah dapat berbagi sumber daya yang dimiliki dengan mereka yang membutuhkan.

2 Solidaritas sosial yang dimaksud disini adalah empati pada pihak lain yang kurang beruntung, menyadari dampak dari pola konsumsi berlebihan dapat mempengaruhi kehidupan bersama, dan kemauan untuk mengelola pola konsumsi secara bertanggung jawab dan kemauan berbagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang miskin. Definisi solidaritas sosial ini berlaku dalam publikasi ini.

Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia, dimana setiap orang dapat tumbuh dan hidup sebagai manusia layaknya dimana potensi mereka dapat berkembang sepenuhnya. Banyak cara untuk membantu mereka yang miskin, memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keahlian, membuka lapangan kerja dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui pendidikan dan layaknya pekerjaan yang dimiliki, membuat kelompok ini memiliki harga diri, dan dengan kesehatan prima mereka bisa lebih produktif.

Dengan solidaritas sosial kedua dunia itu diharapkan menjadi satu dunia, dimana tiap orang menjadi produktif, mempunyai kesempatan untuk hidup dalam potentsi yang penuh dengan bersemangat, dan memiliki keinginan berkontribusi untuk kesejahteraan manusia.

Banyak cara untuk membantu mereka yang miskin, memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keahlian, membuka lapangan kerja dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui pendidikan dan layaknya pekerjaan yang dimiliki, membuat kelompok ini memiliki harga diri, dan dengan kesehatan prima mereka bisa lebih produktif. Kedua dunia itu harusnya menjadi satu dunia, dimana tiap orang memiliki kesempatan untuk hidup secara bersemangat, produktif dan berkontribusi untuk kesejahteraan manusia.

Dengan solidaritas sosial kedua dunia itu diharapkan menjadi satu dunia, dimana tiap orang menjadi produktif, mempunyai kesempatan untuk hidup bersemangat dalam potensi optimal, serta berkeinginan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan manusia.

Boks 1.4:
Gaya Hidup Berkelanjutan

Pilihan konsumen hari ini akan membawa dampak pada bagaimana orang hidup di kemudian hari.Konsumsi berkelanjutan berarti mengkonsumsi barang dan jasa tanpa membahayakan lingkungan atau masyarakat. Hidup dengan gaya hidup berkelanjutan adalah sangat mendasar untuk mengatasi kemiskinan dan melakukan konservasi dan melin dungi sumber daya alam sebagai fondasi dari semua kehidupan. (Sustainable Consumption, ©UNESCO, http://www.unesco.org)

- **Negara-negara dengan pendapatan tinggi memiliki tapak ekologis (penggunaan sumber daya alam) 5 kali lipat dibandingkan negara-negara berpendapatan rendah.**
- **Di Indonesia, ada kelompok keluarga kelas menengah yang dapat menghabiskan USD 20 per hari. Sebaliknya, ada keluarga miskin dengan jumlah 30 juta orang hanya memperoleh kurang dari USD 1 per orang per hari.**

" Pendidikan konsumsi berkelanjutan menekankan pentingnya mengkonsumsi yang lebih berkualitas (aman dan sehat), lebih bertanggung-jawab (lebih efisien menggunakan sumber daya alam, tidak mencemari sumber alam, menghormati hak asasi manusia, memiliki solidaritas pada yang kekurangan, dan adil dalam perdagangan), lebih minimalis (mengkonsumsi seperlunya, efisien dalam memakai sumber daya alam untuk hasil yang lebih banyak) demi kesejahteraan manusia."

BAB II:

PENGANTAR PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN (PKB)

Tema Utama Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan

- Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan
- Tanggung Jawab Kita: Solidaritas Global dan Aksi Lokal
- Pedagogi: Pendidikan Merupakan Proses Transformasi
- Adaptasi Pendekatan Astrolabe dalam Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Apakah yang dimaksud dengan Pembangunan Berkelanjutan ?

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang", seperti telah dinyatakan dalam laporan Brutland tahun 1987 (UNESCO, 2011, p. 1). Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan haruslah membawa kualitas hidup bagi seluruh manusia, sekarang dan seterusnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan diterjemahkan dalam tiga pilar, dimana pembangunan haruslah dapat mensejahterahkan secara ekonomi, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Dengan terpadunya ketiga pilar tersebut, maka pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh (holistik).

Bagan 2.1 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Apakah Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan?

Dalam publikasi Astrolabe: Panduan untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan di Asia Pasifik *(Astrolabe: A Guide to Educ ation for Sustainable Development Coordination in Asia and the Pacific)* disebutkan:

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (PPB) bertujuan untuk memberi kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memberdayakan manusia melalui pendidikan, dan mensyaratkan adanya tanggung-jawab untuk menciptakan masa depan yang berkesinambungan. Ini melibatkan semua orang dari berbagai bidang pekerjaan, di seluruh dunia, yang membawa perubahan ke arah dunia yang lebih baik. Semua pemangku kepentingan dari sektor yang berbeda memainkan peranan dalam merubah cara kita menyampaikan pendidikan dan memastikan bahwa kita membuat keputusan yang tepat untuk masa yang akan datang (UNESCO, 2011, pp. 1-2).

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan memungkinkan orang untuk tidak hanya menggunakan interpretasi mereka pada lingkungan, masyarakat, dan perekonomian, tetapi juga untuk melengkapi diri dengan kemampuan untuk memposisikan diri, mengevaluasi kondisi sekitar dan menjalankan kehidupan mereka dalam cara yang konsisten dengan prinsip keberlanjutan (UNESCO, 2011, p. 3).

Apakah Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) dan Bagaimana Kaitannya Dengan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (PPB)?

PKB mencerminkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) adalah pendidikan yang memungkinkan orang untuk memahami dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumsi, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan itu sendiri tidak dengan sendirinya merubah tindakan mereka dalam mengkonsumsi tetapi hal tersebut dapat mempercepat perubahan yang diharapkan. PKB adalah cara yang luar biasa sebagai langkah awal dalam Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan karena PKB bersentuhan langsung dengan masalah sehari-hari.

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) adalah pendidikan yang memungkinkan orang untuk memahami dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pilihan konsumsi, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Boks 2.1:
Konsep Konsumsi Berkelanjutan

Seperti telah disajikan dalam publikasi *Teaching and Learning for a Sustainable Future: A Multimedia Professional Development Programme* (UNESCO & UNEP, 2008, p.11) konsep konsumsi berkelanjutan mempunyai elemen sebagai berikut:	
•	Memenuhi kebutuhan manusia,
•	Mengutamakan kualitas hidup yang baik melalui standar hidup layak,
•	Berbagai sumber daya antara yang kaya dan miskin,
•	Bertindak dengan mempertimbangkan generasi mendatang,
•	Memperhatikan dampak mulai "dari barang diproduksi sampai dibuang" (*from cradle to grave*) dalam mengkonsumsi apapun, dan
•	Meminimalkan penggunaan sumber daya, sampah dan polusi.

Dalam aspek lingkungan, manusia dihadapkan pada masalah sumber daya alam dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti keamanan pangan, ketahanan pangan, ketersediaan air, kurangnya energi dan transportasi, polusi udara, perambahan kayu secara ilegal, penggunaan pestisida secara tidak tepat dalam pertanian, penangkapan ikan dengan bom yang merusak terumbu karang, dan bahkan dengan sampah yang dihasilkan dari gaya hidup masa kini, dan sebagainya. PKB membawa pesan agar masalah lingkungan perlu ditangani dengan pola konsumsi yang bertanggung-jawab sehingga manusia tetap dapat memperoleh sumber daya alam untuk menopang kehidupannya.

PKB berkaitan dengan aspek sosial dan aspek ekonomi dengan menekankan pentingnya pekerjaan yang layak, bersikap adil, dan memiliki empati dengan solidaritas sosial pada kelompok masyarakat miskin. Bila kelas menengah atas perlu mengurangi pola konsumsi berlebihan, maka kelompok miskin setidaknya perlu memenuhi standar kehidupan sejahtera yang minimal dan memperoleh hak hidup yang layak. Ringkasnya, PKB bertujuan menciptakan kehidupan berkualitas bagi manusia.

PKB tidak hanya memikirkan dampak konsumsi pada masa kini, tetapi melihat konsekuensi jangka panjang dari pola konsumsi yang ada, sebagai tanggung jawab pada generasi mendatang. Dengan pola konsumsi yang tepat PKB membantu menjadikan pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dikonsumsi pada masa sekarang namun tersedia untuk masa depan.

Gambar 2.1: Siswa-siswa berjalan ke sekolah

Boks 2.2: Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan: Tema Inti Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan adalah tema inti dari Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan, dan ia merupakan hal mendasar untuk mendidik warga dan konsumen agar menjadi bertanggung- jawab dalam gaya hidup yang adil secara sosial dan ekonomi, demi ketahanan pangan, integritas ekologis, mata pencaharian yang berkelanjutan, menghormati berbagai bentuk kehidupan, dan memiliki nilai yang kuat yang bisa mendorong kohesi sosial, demokrasi dan tindakan kolektif (UNESCO, 2009).

Kaitan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam publikasi *Here and Now! Education for Sustainable Consumption: Recommendations and Guidelines* (UNEP, 2010, p. 14), dijelaskan bahwa PKB membantu mempercepat kemajuan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan karena PKB terkait dengan masalah terkini dalam 2 tingkat yang saling terhubung yaitu individu dan publik.

Gambar 2.2: Siswa belajar di alam terbuka

Gambar 2.3: Konsumsi berkelanjutan peduli terhadap kesehatan ibu dan anak

Tabel 2.1:
Hubungan antara PKB dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Individu	Publik
PKB adalah mempelajari bagaimana mengkonsumsi secara berbeda dan efisien.	PKB adalah awal yang baik untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan karena ia berkaitan dengan isu dimana generasi muda memiliki kepedulian dalam kehidupan sehari-hari seperti identitas, makanan, air, perumahan, transportasi, komunikasi, pekerjaan, fesyen, wisata, dan sebagainya.
PKB adalah salah satu cara untuk belajar bagaimana mengumpulkan, menilai dan mempergunakan informasi.	PKB adalah cara untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mendorong warga yang reflektif, kritis dan aktif yang mampu untuk membuat keputusan memilih berdasarkan informasi yang tersedia.
PKB merupakan bagian penting dari perkembangan kesehatan mental dan fisik.	PKB adalah bagian dari debat nilai (values) yang terus-menerus untuk menjabarkan kualitas hidup.
PKB adalah cara untuk mencegah kondisi hutang berlebihan dan ketergantungan finansial.	PKB adalah kewajiban moral dan dimensi penting dari tanggung-jawab sosial.
PKB adalah cara untuk mendorong respon yang kreatif pada tingkat individu terhadap tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan.	PKB adalah cara untuk memperkenalkan standar hidup yang terhormat *(dignified)* bagi setiap orang.
PKB adalah bagian penting dari pengelolaan keluarga dan subjek pembelajaran utama antar generasi.	PKB adalah cara yang vital untuk mengurangi perubahan iklim.
	PKB adalah cara untuk berkontribusi pada perlindungan keaneka-ragaman hayati.
	PKB adalah instrumen untuk memastikan adanya kesadaran hak konsumen.

Sumber: UNEP. (2010). *Here and now! Education for sustainable consumption: Recommendations and guidelines*. Paris, France: UNEP DTIE SCP.

Tanggung Jawab Kita: Solidaritas Global dan Aksi Lokal

Beberapa Masalah

Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan yang ada sekarang ini belum terpadu dengan baik dan masih dapat dikembangkan dengan lebih banyak kreativitas dalam merancangnya. Kebanyakan pendidik dan murid belum dapat menangkap sepenuhnya gagasan dari konsumsi berkelanjutan karena bahan ajar tidak didukung oleh informasi terkini, dan kebanyakan masih belum dikaitkan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menemukan dirinya dalam situasi sulit untuk mengungkapkan substansi ajar yang dapat merangsang proses belajar dari konsumsi berkelanjutan (UNEP, 2010, p. 10).

Tantangan dalam Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan terletak pada upaya untuk memotivasi individu agar menyadari bahwa mereka dapat mengambil bagian untuk membentuk masa depan dengan menerapkan cara hidup yang berkelanjutan. Hal ini mecakup individu yang berpeluang mengetahui mekanisme yang terjadi dalam produksi barang dan jasa, dan dalam hal apa konsumen dapat melakukan agar proses tersebut lebih berkelanjutan. Lebih dari itu, perlu tersedia instrumen bagi konsumen untuk mengatasi masalah dan agar dapat mempengaruhi proses kebijakan. Pendek kata, tantangannya adalah bagaimana membuat "Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan sebagai instrumen yang membangkitkan kesadaran konsumen." (UNEP, 2010, p. 10).

Gambar 2.4: Para Ibu berbelanja sayur segar di pasar tradisional

Tantangan dalam Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan terletak pada upaya untuk memotivasi individu agar menyadari bahwa mereka dapat mengambil bagian untuk membentuk masa depan dengan menerapkan cara hidup yang berkelanjutan.

Boks 2.3:
Apa yang membedakan PKB dan Pendidikan Konsumen?

Menurut McGregor (2011) dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perbedaan antara Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumen adalah sebagai berikut:
Pendidikan umum bagi konsumen
• Fokus pada pertumbuhan ekonomi dan finansial, serta keamanan.
• Konsumen sebagai agen utama ekonomi.
• Nilai pasar mempengaruhi masyarakat dan orang melayani pasar.
• Fokus pada kepentingan dan hak konsumen.
Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan
• Fokus pada pembangunan masyarakat dan individu, potensi, kemajuan dan keamanan, serta ekonomi.
• Manusia adalah konsumen dan warga masyarakat.
• Kegiatan ekonomi dan pasar melayani manusia dan masyarakat.
• Peduli pada efektifitas dan efisiensi.
• Fokus pada kepentingan bersama dan tanggung jawab warga/individu pada orang lain serta pada planet bumi ketika mengkonsumsi.
• Fokus pada kepentingan dan hak konsumen

Sumber: McGregor (2011). United Nations Conference on Sustainable Development.

Memahami Bagaimana Konsumen Memilih

Dalam merancang PKB perlu dipahami bagaimana konsumen membuat keputusan membeli produk dan jasa. Proses pengambilan keputusan yang menentukan pola konsumsi individu yang secara keseluruhan *(aggregate)* mempengaruhi kondisi sumber alam dan mempunyai dampak sosial secara luas, bahkan ke masa depan.

Beberapa hal mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dapat bersifat rasional, emosional dan dipengaruhi oleh konteks dimana konsumen berada seperti dijelaskan dalam *The Consumption Dilemma: Leverage Points for Accelerating Sustainable Growth* (Deloitte Touche Tohmatsu & World Economic Forum, 2011, p. 13). Keputusan konsumen merupakan proses yang tidak sederhana karena ada keputusan rasional, emosional yang dipengaruhi oleh konteks dimana seseorang itu berada:

- **Keputusan Rasional**
  Keputusan yang diambil dikatakan rasional bila dibuat berdasarkan informasi mengenai harga, atribut dan penampilan produk dan jasa – mungkin menyangkut manfaat bagi individu, mungkin lebih menyangkut pada aspek sosial.

Meskipun harga merupakan faktor utama dalam keputusan yang diambil oleh konsumen, keputusan yang benar-benar rasional sebenarnya jarang. Kebanyakan informasi yang tersedia bagi konsumen adalah membingungkan.

- **Keputusan Emosional**
  Kepercayaan, emosi, citra merek *(brand)*, kebiasaan, pengaruh sosial dan mencoba – yang harus diputuskan dengan cepat – memainkan peranan penting. Sebagian besar dari keputusan konsumen tergantung pada emosi, intuisi dan kebiasaan. Sebagian konsumen adalah pembeli produk yang sama *(repeat purchases)*, yang memutuskan tidak berdasarkan kesadaran penuh akan adanya alternatif lain.

- **Konteks**
  Pilihan juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana konsumen membuat keputusan, baik lingkungan fisik dan lingkungan konteks sosial budaya yang lebih luas. Norma sosial penting, khususnya ketika pilihan untuk produk dan jasa tertentu bisa terekspos pada orang lain. Rekomendasi individu bisa sangat berpengaruh.

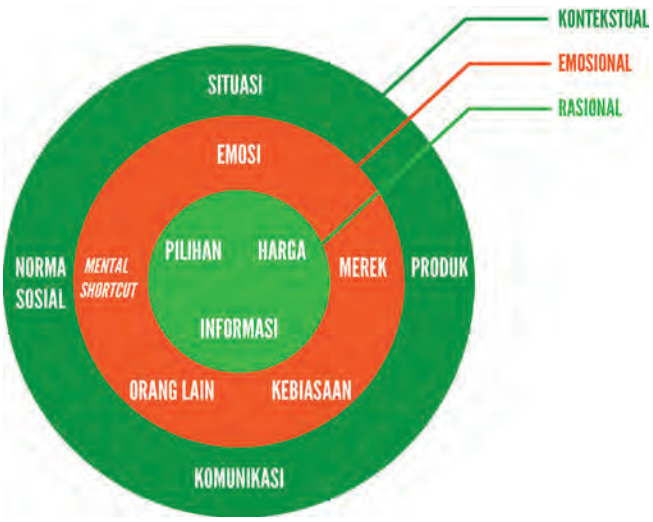

Bagan 2.2: Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Konsumen

Sumber: Deloitte Touche Tohmatsu & World Economic Forum. (2011, April). *The consumption dilemma: Leverage points for accelerating sustainable growth.* http://www3.weforum.org/docs/WEF_ConsumptionDilemma_SustainableGrowth_Report_2011.pdf.

Penjelasan bagaimana konsumen memilih memberi pengertian akan tingkah-laku manusia yang dapat dipengaruhi tidak hanya oleh harga, tapi juga oleh faktor emosi dan konteks yang melingkupi. Karena itu, Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan perlu mencakup pendekatan yang memperhatikan kepedulian individu dan tanggung-jawabnya pada lingkungan fisik, dan konteks sosial budaya, bahkan kepercayaan dan emosi.

Memahami pemikiran dari konsumen dapat membantu mereka yang akan merancang PKB. Pemikiran dari konsumen dapat dikategorikan sebagai berikut (Akenji, et al., p. 76):

- **Memenuhi syarat** – dimana konsumen membeli berdasarkan harga dan manfaat produk tanpa dipengaruhi oleh tindakan produsen dalam pilihan konsumen.
- **Efisiensi** - dimana konsumen lebih memilih produk menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi atau minimal dalam penggunaan sumber alam dan pengurangan emisi karbon, dan tetap memberi manfaat.
- **Keterkaitan** – dimana konsumen mengambil langkah untuk mempengaruhi produsen dalam keputusan mengkonsumsi, dan mengakui bahwa sukses mereka tergantung pada akses ke media sosial atau jaringan sosial , tingkat pendapatan, dan harga diri.
- **Kondisi Kritis (Langka)** – dimana keputusan konsumen difokuskan pada kebutuhan mempertahankan sumber alam yang tersisa *(critical natural capital shock)*. Mereka mengorbankan keuntungan jangka pendek dengan nilai keuntungan jangka panjang.

PKB dapat menjadi titik awal dari perjalanan menuju gaya hidup berkelanjutan, guna mengubah kebiasaan konsumen, dari konsumen yang tidak memiliki kesadaran konsumsi berkelanjutan menjadi konsumen yang bertanggung jawab, dengan gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini konsumen memiliki kesadaran kritis, memahami tanggung jawab sosial sebagai konsumen, dan memiliki solidaritas global sebagai warga dunia.

Apakah hasil *(outcomes)* dari PKB?

Sebagai hasil dari proses belajar dan kompetensi yang terjadi dari PKB, UNEP dalam *Here and Now! Education for Sustainable Consumption: Recommendations and Guidelines* (2010, pp. 24-25) memberikan pedoman yang bermanfaat, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2: Hasil *(outcomes)* dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Hasil Pembelajaran Mendasar dari PKB				
Kesadaran Kritis	Tanggung Jawab Lingkungan	Tanggung Jawab Sosial	Tindakan dan Keterlibatan	Solidaritas Global
Kompetensi-kompetensi Umum				
Kesadaran diria	Penghargaan pada alam.	Penghargaan pada keragaman manusia dan budaya.	Kemampuan mempraktekkan pengetahuan ke dalam aksi nyata.	Perhatian pada keadilan, perdamaian, dan kerjasama.
Memperhatikan kualitas.	Penghargaan pada hubungan antara manusia dan alam.	Penghargaan pada kaitan manusia dan masyarakat.	Kemampuan untuk mengatasi emosi.	Mampu memahami perspektif global.
Kemampuan untuk membuat keputusan kritis, reflektif.		Kemauan dan kemampuan untuk melayani orang lain.	Kapasitas menghasilkan gagasan baru.	Kapasitas untuk berempati atau rasa peduli.
Keahlian mengelola informasi.			Kapasitas untuk adaptasi pada situasi baru.	
Kompetensi-kompetensi spesifik PKB mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan				
Kemampuan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas hidup yang baik dan dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasarinya.	Kemampuan untuk memperoleh dan mengakses serta memanfaatkan informasi dalam konsekuensi konsumsi terutama pada lingkungan.	Pengetahuan tentang hak konsumen dan hukum perlindungan utama bagi konsumen	Pengetahuan dasar dari interaksi mekanisme harga dengan sikap dan tingkah laku.	Pengetahuan tentang jaringan sosial yang bertanggung-jawab dalam membentuk pola konsumsi (tekanan kelompok, sosial status dan sebagainya).
Menguasai pengetahuan dasar dari sistim pasar dan peran bisnis.	Kemampuan untuk mengelola sumber alam fisik (pengawasan efektif, pemeliharaan, penggunaan ulang/*reuse* dan penempatan kembali).	Pemahaman individu dan kolektif terhadap tanggung-jawab sosial konsumen dan kaitannya dengan tanggung-jawab sosial perusahaan.	Pengetahuan tentang proses produksi yang berkaitan dengan sistem konsumsi.	
Kesadaran karakter simbolik dan tak tampak *(intangible)* dari komoditas.		Pemahaman praktis dari aspek permintaan dan penawaran dalam rangkaian produksi dan konsumsi termasuk hubungan dengan pembangunan masyarakat di luar pasar *(outside-of-the-market relationships).*	Kesadaran akan kekuasaan masyarakat warga untuk berinisiatif tentang cara cara berpikir alternatif dan beraksi.	
Kemampuan untuk mengenal, dekoding, dan merefleksi secara kritis terhadap pesan dari media dan pasar.			Kemampuan untuk tidak hanya memikirkan masa depan alternatif, tetapi juga merancang langkah yang masuk akal untuk mencapainya.	
Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi (alokasi anggaran, menabung, investasi, pajak dan pungutan).			Konsumen memiliki pengetahuan tentang resolusi konflik yang bersifat umum dan juga spefisik, menyangkut keamanan produk, kewajiban, dan pengembalian.	
Kompetensi Saling Mengisi				
Kesadaran akan kompleksitas dan seringkali kontroversial yang alami dari isu konsumsi berkelanjutan				
Pemahaman ke dalam bagaimana gaya hidup individu mempengaruhi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan.				

Sumber: UNEP. (2010). *Here and now! Education for sustainable consumption: Recommendations and guidelines.* Paris, France.

Pedagogi: Pendidikan Merupakan Proses Transformasi

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia melihat PKB tidak hanya sebagai pedagogi atau pengetahuan baru, tetapi sebagai sebuah transformasi pemahaman yang akan mengarah pada tindakan yang bertanggung-jawab (sebagai individu dan warga negara), ketika hal tersebut telah dapat membangun empati dan simpati dari berbagai masalah sebagai langkah awal menuju kesadaran akan kebiasaan baru untuk menjadi orang yang bertanggung-jawab dan akuntabel (Indriyanto, 2012). Dengan demikian PKB akan dapat benar-benar efektif ketika pembelajar memperoleh pemahaman yang meliputi:

- Penghargaan dan dukungan bagi lingkungan.
  Manusia perlu mengakui bahwa lingkungan tidak tergantikan sebagai ekosistem penunjang kehidupan manusia dimana tiap mahluk hidup mempunyai sistem masing-masing yang harus terus ada, termasuk: daya dukung lingkungan, siklus kehidupan. Lingkungan perlu dirawat dan dipelihara oleh manusia.
- Penghargaan dan dukungan untuk keadilan sosial.
  Hal ini memerlukan kemampuan untuk memahami kehidupan masyarakat yang kurang beruntung, kehidupan generasi mendatang, pengetahuan dan kapasitas lokal.
- Penghargaan dan dukungan pada kesejahteraan ekonomi.
  Keterlibatan ini, kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dan menghormati hak buruh, meliputi dukungan dalam mata rantai perdagangan untuk menjadi *fair trade* atau perdagangan yang adil, dan peluang yang sama untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan dihormatinya hak buruh.

PKB tidak hanya sebagai pedagogi atau pengetahuan baru, tetapi sebagai sebuah transformasi pemahaman yang akan mengarah pada tindakan yang bertanggung-jawab (sebagai individu dan warga negara), ketika hal tersebut telah dapat membangun empati dan simpati dari berbagai masalah sebagai langkah awal menuju kesadaran akan kebiasaan baru untuk menjadi orang yang bertanggung-jawab dan akuntabel.

Hal penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli.

Dari hasil lokakarya PKB, sangat jelas PKB menekankan bahwa produksi dan konsumsi dari berbagai produk dan jasa akan membawa implikasi terhadap aspek berikut ini: (Widjajanti, 2012, p. 17):

- Aspek lingkungan termasuk efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengurangan pencemaran/polusi, sampah, karbon dioksida (CO2) dan dampak negatif lainnya pada lingkungan.
- Aspek sosial termasuk: kesetaraan, keadilan dalam perdagangan, hak buruh dan hak asasi manusia.
- Aspek lokal yang mencakup: penghormatan pada pengetahuan dan budaya lokal, kapasitas setempat, dan ketersediaan aset (misalnya keaneka-ragaman hayati, keahlian tertentu, dsb).

Catatan: Dalam kenyataan kerapkali orang membeli barang dan jasa dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan ketersediaan.

Pendekatan yang dapat dipertimbangkan.

Lokakarya PKB juga menyarankan beberapa pendekatan yang dapat memasukkan unsur nilai di dalamnya, sebagai berikut (Widjajanti, 2012, p. 17):

- Nilai ilustratif yang menjelaskan masalah yang kompleks atau rumit ke dalam bentuk yang sederhana dan mudah dimengerti.
- Nilai emosi menawarkan kaitan yang akrab dan personal ke dalam masalah dengan cara bertemu orang yang bersangkutan dan melalui pengalaman langsung.
- Nilai kesaksian termasuk melihat sendiri apa yang terjadi dan menyaksikan praktek yang terbaik *(witnessing best practices).*

Metodologi PKB dan cara-cara Penyebar luasan.

UNEP melalui buku *Here and Now! Recommendations and Guidelines to Develop ESC* telah mengidentifikasi berbagai proses belajar yang relevan dan menarik untuk pengembangan PKB (2010, pp. 26-28). Beberapa metodologi dijelaskan berikut ini, sebagai contoh, dengan tambahan info yang relevan sesuai dengan konteks Indonesia:

- **PKB sebagai wacana publik dan dialog bersifat umum.**
  PKB membangun kesadaran akan pentingnya konsumsi berkelanjutan melalui sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, dan menggunakan media massa

seperti TV dan radio, dan sebagainya, dengan berbagai cara misalnya seminar, *talk-show*, kampanye, dan bimbingan dasar.

- **PKB dalam penyampaian ilmiah.**
  Secara ilmiah PKB membangun indikator untuk konsumsi berkelanjutan dengan menggunakan *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Ecological Footprints* (Tapak Ekologis) dan sebagainya.
- **PKB sebagai aksi nyata.**
  Kegiatan di dalam proyek tertentu sebagai aksi nyata dimana pendidikan konsumsi berkelanjutan diterapkan sebagai proses pembelajaran.
- **PKB dalam bentuk kegiatan seni.**
  Pesan PKB disampaikan melalui kegiatan seni seperti musik, sastra, drama, dan permainan melalui cara belajar yang menyenangkan.
- **PKB sebagai proses belajar aktif di lapangan.**
  Mempelajari PKB dengan pengamatan dan keterlibatan dalam kelompok masyarakat tertentu atau terlibat dalam masyarakat yang mengatasi masalah terkait konsumsi, mempelajari nilai dan budaya yang terkait dengan konsumsi berkelanjutan dsb. Proses ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang masalah konsumsi berkelanjutan di suatu masyarakat dan wilayah tertentu.
- **PKB melalui media massa, jaringan/media sosial dan internet.**
  - Media massa dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan PKB: saluran TV dan saluran radio, (termasuk radio komunitas), majalah, dan koran. Seleksi media massa mana yang tepat tergantung pada kelompok sasaran PKB.
  - Memanfaatkan internet dan *Skype* menjangkau lebih banyak pendengar, dapat membantu PKB dengan cara lebih efisien. Materi PKB dapat disebarkan dengan memanfaatkan *email* dan *website* (materi *soft file*). *Webinar* atau seminar menggunakan internet, *training*, dan *e-learning* atau kursus via internet, merupakan opsi lain yang juga dapat dimanfaatkan dalam PKB.

Berbagai metodologi tersebut dapat dikombinasikan untuk satu kelompok sasaran sehingga hasilnya lebih effektif karena dimulai dengan pengetahuan, pemahaman, pengalaman lapangan, dan disampaikan melalui beragam media komunikasi.

Adaptasi Pendekatan Astrolabe dalam Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

PKB dirancang secara partisipatif.

Pendekatan lain untuk merancang PKB adalah dengan melakukan adaptasi kerangka yang dibangun oleh UNESCO untuk pendidikan pembangunan berkelanjutan *(A Decade on Education for Sustainable Developoment atau DESD)*. Dalam *Astrolabe: A Guide to Education for Sustainable Development in Asia and the Pacific,* UNESCO memposisikan PKB sebagai salah satu tema pendidikan dalam ESD. *Astrolabe* adalah "instrumen kuno yang digunakan untuk mengetahui letak matahari dan bintang" (UNESCO, 2011, p. iii), seperti halnya kompas yang akan memberi informasi posisi dalam perjalanan dan arah menuju daerah tujuan.

Astrolabe adalah kompas dalam perjalanan yang dilakukan PPB (Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan)berupaya untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra dalam pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, terutama kementerian pendidikan dan lingkungan, pemerintah daerah, pendidikan tinggi dan lembaga penelitian, perusahaan, masyarakat dan pemuda agar bersama sama mempromosikan diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Hal ini menyiapkan landasan pedoman diskusi untuk seperangkat tujuan (lihat Lampiran B Latihan untuk Tujuan Edukasi).

Perangkat *Astrolabe* untuk PPB dibangun oleh UNESCO Kantor Regional Asia Pasifik. Biro Pendidikan juga membantu mengembangkan panduan dan rekomendasi nasional bagi PKB, dimana dijelaskan "Siapa melakukan sesuatu, di suatu tempat, untuk menyelaraskan kebijakan dan inisiatif PPB (atau PKB) dikaitkan dengan pendidikan (formal) dan pelatihan", seperti berikut (UNESCO, 2011, p. 44):

- Reorientasi program pendidikan yang ada untuk memastikan isi kurikulum dan pedagogi (dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi) mendorong pengetahuan, keahlian, nilai dan perspektif terkait dengan perubahan untuk masa depan yang berkelanjutan. Penekanan terletak pada reorientasi kurikulum, dan bukan membuat kurikulum baru, sekaligus melakukan perbaikan kualitas dari program.
- Membangun pemahaman dan kesadaran publik tentang pembangunan berkelanjutan (atau konsumsi berkelanjutan) melalui pendidikan komunitas yang meluas, termasuk pendidikan non formal melalui media yang dapat dipertanggung-jawabkan yang berkomitmen untuk mendorong masyarakat yang aktif dan memiliki informasi.
- Menyediakan pelatihan praktis kepada dan dalam komunitas bisnis, lembaga masyarakat, guna membangun kapasitas yang diperlukan untuk mengambil keputusan serta memberikan kinerja secara berkelanjutan dan melaksanakan praktek keberlanjutan di tingkat lokal, provinsi dan internasional.

Lihat Lampiran B untuk Latihan Pemetaan.

Gambar 2.5: Guru: tokoh sentral dalam reorientasi pendidikan

Berkreasi dalam Metodologi.

Ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan terpadu: reorintasi dalam pendidikan formal, membangun kesadaran publik melalui pendidikan non formal, dan menyediakan panduan tindakan praktis. Dengan kata lain, seluruh lapisan masyarakat baik dapat terjangkau oleh PKB, dengan pengetahuan, pemahaman dan petunjuk perubahan tingkah laku yang diharapkan. Kreatifitas penyajian dapat sangat bervariasi sehingga meyakinkan pentingnya konsumsi berkelanjutan, disertai contoh-contoh praktis yang dapat dilakukan. Yang penting dari pendekatan *Astrolabe* adalah proses partisipatif melibatkan berbagai pihak terkait dan menggabungkan pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Sebagai contoh, PKB bagi generasi muda kelas menengah di perkotaan dapat dimulai dengan reorientasi kurikulum di sekolah, diikuti oleh kampanye yang luas (memanfaatkan berbagai media komunikasi) kemudian disertai tindakan nyata sebagai contoh gaya hidup berkelanjutan yang secara mudah diikuti.

BAB III:
MERANCANG MATERI PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN DI INDONESIA: LANGKAH KE DEPAN

- Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia
- Kerangka Kerja Kurikulum Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan Dalam Pendidikan Formal
- Inisiatif Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan dalam Pendidikan Non-Formal
- Rekomendasi untuk Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan Dalam Konteks Indonesia

Profil peserta PKB

Lokakarya pemangku kepentingan dalam PKB di bulan Maret 2012, menyoroti beberapa hal yang perlu mendapat pertimbangan dalam merancang topik yang relevan dengan materi PKB, baik pendidikan formal maupun non-formal sebagai berikut:

- Kelompok sasaran yang berbeda (usia, ibu, kelompok hobi dengan minat tertentu, kelompok relawan).
- Kelas sosial ekonomi (tinggi, menengah, rendah).
- Daerah geografis dimana kelompok sasaran bermukim (kota/desa, pesisir atau daratan, dsb).
- Kebudayaan dan pengetahuan lokal.
- Kekayaan keaneka-ragaman hayati Indonesia.

Keterangan berikut berisi informasi mengenai faktor tersebut di atas yang secara khusus menjelaskan kebutuhan akan pesan tertentu yang akan diintegrasikan ke dalam PKB.

Profil Individu dalam Kelompok Sasaran yang Berbeda

- **Usia**
  Semakin lanjut usia kelompok sasaran PKB, semakin kompleks pengetahuan yang dapat diberikan. Usia juga akan menentukan bagaimana PKB dapat diberikan, dimana kelompok yang muda dapat diberikan konsep dasar dan cenderung untuk melakukan tindak nyata *(action oriented)* sebagai proses belajar. Kelompok dewasa akan menghargai pengetahuan yang dalam dan kompleks menyangkut konsumsi berkelanjutan, diikuti oleh perubahan tingkah laku.
- **Generasi Muda** - Usia 19-35 tahun (Kelompok Khusus)
  Kelompok generasi muda adalah konsumen yang cenderung untuk banyak mengkonsumsi baik karena keperluan fisik (remaja) dan karena kepentingan sosial dimana remaja mengikuti pola konsumsi *peer group* (kelompok pertemanan) agar dapat diterima, dan ketika kelompok profesional memiliki daya beli dari hasil kerja dan keperluan untuk menunjukkan keberhasilan lewat pola konsumsi tertentu (selain konsumsi yang wajar). Akibatnya, kelompok ini mudah dipengaruhi dan dimanipulasi oleh iklan dan pemasaran agresif melalui media massa dan media sosial.

Khususnya karena anak-anak muda cenderung mengikuti trend terbaru tanpa berpikir panjang tentang dampaknya dalam jangka panjang. Tekanan kelompok dapat membuat anggota kelompok yang ingin diterima oleh kelompok, memutuskan untuk mengkonsumsi bukan karena alasan rasional tetapi "mengikuti aturan" dari kelompok pertemanan (*peer group*). Sedangkan mereka yang telah bekerja dapat tergoda untuk mengkonsumsi karena ingin diterima dalam status sosial yang lebih tinggi. Ini adalah peluang bagi PKB untuk membangun kesadaran akan pentingnya konsumsi berkelanjutan, dan mendorong kelompok generasi muda mempunyai gaya hidup berkelanjutan.

Kelompok ini juga merupakan kelompok yang cepat belajar, penuh energi untuk belajar sesuatu yang baru, dan seringkali sangat kreatif. Mereka dapat menjadi sasaran PKB sebab mereka dapat menjadi inovator dan agen perubahan melalui sekolah atau profesi mereka: sebagai peneliti, ahli farmasi, pendidik, politisi, pemimpin masyarakat, analis keuangan, aktivis lingkungan, dan sebagainya. Sekali mereka mendapat pendidikan yang cukup, dengan pikiran yang terbuka, maka mereka perlu mendapat dorongan untuk menjadi penggerak perubahan dalam komunitas mereka.

Gambar 3.1: Anak muda Indonesia membersihkan lingkungan

- **Ibu** – sebagai Pendidik
  Salah satu kelompok sasaran yang strategis adalah ibu, yang menjadi pengambil keputusan utama dalam banyak hal di rumah tangga. Ibu akan menentukan apa yang harus dibeli untuk makanan sehari-hari, apa yang harus dibeli untuk membersihkan rumah, untuk mencuci baju dan peralatan makan, berapa banyak harus dialokasikan untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bila kelompok ini sadar akan pentingnya konsumsi berkelanjutan, dan bersedia melakukan tindakan nyata, banyak hal akan berubah. Tidak hanya ibu yang berubah tetapi juga anggota keluarga akan berubah karena ibu adalah pendidik di rumah, yang dapat memberikan pengetahuan sekaligus contoh tindakan. Sebaiknya ibu dapat mengajarkan sikap yang baik kepada anaknya sejak dini.
- **Kelompok Hobi dan Relawan**
  Sejumlah kelompok hobi (dengan minat kegiatan tertentu) menjadi sasaran strategis bagi PKB. Diantaranya adalah kelompok pecinta alam (seperti klub pendaki gunung, penyelam, pemerhati burung), dan relawan yang biasanya bekerja pada lembaga nirlaba seperti membantu kelompok kurang mampu, melakukan pendidikan gratis, membantu petani atau kelompok perempuan, kelompok antar agama, dan sebagainya. Dengan misi sosial dari PKB untuk melindungi alam, memberlakukan keadilan, menolong orang lain, mempromosikan toleransi, maka kelompok ini menjadi mitra strategis untuk mempercepat PKB. Kegiatan mereka dapat mudah dikaitkan dengan misi PKB karena keduanya bekerja dengan nilai yang sama. Pertama kali tentu mereka sendiri harus belajar PKB, kemudian mereka yang akan mempromosikannya kepada pihak lain.

Keragaman Indonesia

Indonesia adalah negara yang beragam dari segi geografis, kekayaan keaneka-ragaman hayati, ragam budaya, berbagai etnis, dan tingkat status sosial. Tiap daerah dan kelompok memiliki tantangan dan peluang dalam melakukan konsumsi berkelanjutan.

Mereka yang hidup di pedalaman hutan mempunyai masalah yang berbeda dengan mereka yang hidup di daerah perkotaan. Masyarakat Bali memiliki budaya yang berbeda dengan orang Papua dalam menghormati alam; masyarakat suku Bajau yang hidup di kapal dan berlayar tanpa rumah di darat, tentu berbeda cara hidup dalam bermata-pencaharian dengan masyarakat di pegunungan Dieng.

Gambar 3.2: Ada lebih dari 3000 kelompok etnis di Indonesia dengan jumlah sekitar 50-70 juta penduduk asli dengan kebudayaan masing-masing.

- Bentang kepulauan Indonesia 54,716 km daratan lebih dari 1,8 juta km2 dan daerah perairan 5,8 juta km^2. Indonesia terdiri dari 17,000 pulau,, 6000 diantaranya dihuni.
- Terdapat lebih dari 1300 suku bangsa Indonesia. Jumlah masing-masing populasi bervariasi, dari wilayah yang jumlahnya bisa sekitar 10 juta penduduk seperti Jakarta dan wilayah yang penduduknya kurang dari 10.000 orang seperti, antara lain, suku Halmahera dan suku Wamok.
- Diperkirakan sekitar 50 sampai 70 juta masyarakat adat yang kehidupannya sepenuhnya tergantung pada hutan sebagai penyedia makanan dan obat yang mereka perlukan.

Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Mereka yang masuk kelompok kelas sosial tinggi dan menengah mempunyai tantangan yang berbeda dengan kelompok sosial rendah. Semakin kaya individu semakin ia memiliki gaya hidup yang jauh dari sekedar bertahan hidup, maka semakin besar pula pengeluaran di luar pemenuhan kebutuhan dasar (makan sehari-hari dan rumah). Mereka dapat membiayai pendidikan yang baik, rumah yang besar, kendaraan, peralatan hiburan, menikmati makanan mewah dan berlibur tiap tahun.

Isu utama dari kelas atas dan menengah terkait konsumsi berkelanjutan adalah pola konsumsi yang berlebihan *(over consumption or excessive consumption)*. Panggilan PKB terhadap mereka adalah bagaimana membangun sikap konsumsi yang bertanggung-jawab: peduli terhadap langkanya sumber daya alam, dampak konsumsi pada lingkungan dan mempunyai kepekaan solidaritas sosial. Kelompok konsumen ini mempunyai tapak ekologis yang tinggi yang merupakan ancaman terhadap ketersediaan sumber daya alam dan akhirnya menyumbang pada ketidak-adilan sosial.

Kelompok sosial dengan pendapatan rendah mempunyai keprihatinan tersendiri karena mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Konsumsi berkelanjutan bagi kelompok ini terkait dengan

apakah mereka dapat tetap memperoleh makanan bernutrisi dalam jumlah cukup setiap hari. Dari perspektif pengurangan kemiskinan mereka perlu makanan sehat yang memenuhi standar gizi, sehingga anak-anak dapat tumbuh secara layak, dan ibu tetap sehat terutama ketika mengandung dan menyusui, dan bapak dapat produktif di pekerjaan mereka. Kemampuan mereka untuk mengalokasikan uang bagi pendidikan sangat terbatas. Kebanyakan dari kelompok ini mata pencaharian mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga baik proses produksi dan pola konsumsi merupakan hal yang relevan dalam keseharian bekerja.

Gambar 3.3: Keluarga Indonesia

Perbedaan Wilayah Geografis

Informasi berikut akan menjelaskan bahwa tiap daerah yang berbeda secara geografis akan mempunyai masalah (isu) yang berbeda, dan kebutuhan bersikap tertentu untuk memastikan konsumsi berkelanjutan. Secara garis besar perbedaan geografis yang dimaksud adalah masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, masyarakat di dataran tinggi dan pedalaman, dan masyarakat di dataran rendah pesisir.

Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan

Di daerah perkotaan, dimana umumnya kelas tinggi dan menengah tinggal, dengan penduduk padat, konsumsi pada sumber alam juga tinggi, kebutuhan produk sekunder yang banyak, dengan ketersediaan barang dan jasa yang melimpah di pasar yang berasal dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri.

Penduduk yang tinggal di kota besar secara relatif mempunyai gaya hidup berbeda dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Kebanyakan mereka yang kaya tinggal di perkotaan, dengan gaya konsumsi kelas menengah dan kelas atas yang menghasilkan tapak ekologis yang tinggi dan menghasilkan banyak sampah. Mereka sebagian mengkonsumsi makanan jadi *(processed food)* daripada makanan segar, menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, memakai listrik untuk berbagai kegiatan (memakai komputer, peralatan rumah tangga, AC, TV/radio, *gadget*, elektronik untuk hiburan, dan sebagainya), cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa mewah, menghabiskan banyak uang untuk makan di restoran mahal.

Pengeluaran mereka di luar pemenuhan kebutuhan dasar, dan cenderung menjadi berlebihan. Sebagai tambahan, kelompok ini juga cenderung mengkonsumsi *fast food* (makanan cepat saji) lebih karena mengikuti gaya hidup modern yang serba cepat, dan kurang memperhatikan unsur kesehatan (yang berkaitan dengan keamanan pangan).

Materi PKB untuk kelompok kelas sosial menengah-tinggi dan menengah di kota besar dapat mencakup:

- Berbelanja pada waktu memerlukan (membeli berdasarkan daftar kebutuhan untuk menghindari godaan dan pembelian impulsif). Keputusan mengkonsumsi haruslah karena pertimbangan rasional dan bukan karena ada mode mutakhir (trend), godaan diskon/*sale* (potongan harga/harga murah), atau karena tergiur oleh iklan.
- Membeli produk dengan kemasan yang sesedikit mungkin, memakai ulang kemasan sebisa mungkin, memilih kemasan yang dapat didaur ulang, membawa tas sendiri untuk berbelanja daripada membawa banyak tas plastik dari hasil belanja.
- Memilih transportasi publik, berbagi kendaraan, menggunakan sepeda, berjalan kaki untuk jarak pendek daripada mengendarai mobil.
- Mematikan semua peralatan yang memakai listrik ketika tidak digunakan, mencari peralatan dengan penggunaan listrik minimum, meninggalkan ruangan dengan lampu dipadamkan (hemat energi).
- Membawa makanan dan minuman dari rumah daripada membeli makanan tak bergizi, air kemasan, dan minuman soda (yang tidak sehat dan menghasilkan sampah), ketika bepergian.

- Cari produk dengan *eco label*: produk kayu dengan label kayu dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan; produk yang menggunakan lebih sedikit air dan lebih sedikit CO2; produk yang dibuat di perusahaan yang menghormati hak buruh. Temukan label *fair-trade* yang mentaati hak buruh, dan temukan juga pesan bahwa perusahaan telah melakukan upaya tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan.
- Memilih makanan sehat. Baca informasi pada kemasan: tanggal kadaluwarsa, bahan yang ada di dalam kemasan harus tidak melebihi ambang batas yang ditentukan seperti garam, gula, MSG, dan tingkat kolestrol yang terkandung di dalam makanan yang dijual.
- Utamakan membeli produk lokal dan yang sebisa mungkin menggunakan sumber alam lokal daripada memasukkan barang dari daerah lain *(imported products)*: fesyen dan perhiasan, makanan, furnitur, obat, kosmetika, dan sebagainya.
- Menggunakan pedoman tentang daftar spesies yang terancam punah dari pemerintah, IUCN, dan pedoman lain (seperti pedoman makanan laut yang disiapkan WWF Indonesia) yang dapat digunakan ketika membeli tanaman, binatang, dan makanan. Dalam Pedoman Makanan Laut terdapat daftar merah beberapa makanan laut karena kelangkaannya).
- Kelompok ini juga perlu mengingat adanya kelompok lain yang hidup dalam kemiskinan, dan perlunya mereka untuk didorong mempunyai rasa solidaritas sosial.

Penting dicatat bahwa di perkotaan terdapat kampung kampung miskin atau *slum areas* dimana kelompok miskin perkotaan tinggal. Di wilayah ini masalah konsumsi berkelanjutan terkait makanan sehat, yang harus mereka peroleh tidak melalui kegiatan pertanian atau perikanan. Kelompok miskin kota umumnya bekerja di sektor non-formal seperti menjadi pedagang kecil, buruh bangunan lepas, pemulung atau hanya menjadi pengemis. Komunitas ini tidak memiliki akses ke air bersih, tempat tinggal yang aman dan layak, tidak memiliki sarana sanitasi, dan rentan terhadap banjir. Karena mereka tinggal secara ilegal (umumnya di tanah yang tidak dihuni) maka mereka rentan untuk direlokasi atau digusur, dipaksa untuk pergi dari tempat tinggal mereka.

Sedangkan di wilayah pedesaan kebanyakan orang hidup lebih sederhana dan hidup mereka tergantung pada sumber daya alam setempat secara langsung. Di beberapa desa terdapat banyak keluarga sangat miskin dimana seluruh perhatian ditujukan untuk mengatasi tantangan bertahan hidup, terutama untuk memperoleh cukup makanan sehat bagi anak-anak usia dini dan ibu yang sedang hamil. Sumber pangan diperoleh dari pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sendiri, dimana mata pencaharian tergantung langsung pada sumber daya alam, seperti pertanian dan perikanan.

Di pedesaan terdapat pula kelas menengah dengan jumlah lebih sedikit dari daerah perkotaan. Dengan masuknya informasi gaya hidup modern, dan serbuan iklan dan pemasaran agresif di desa-desa, maka mereka yang cukup mampu mulai mengkonsumsi produk di luar kebutuhan dasar seperti *gadget* terbaru,TV, alat-alat elektronik, sepeda motor dan sebagainya. Mereka dapat terjebak dalam konsumerisme dan hutang bila mereka tidak berhati-hati dalam pengeluaran keuangan, karena mereka mengkonsumsi barang mewah dan bukan melakukan investasi penting seperti makanan sehat bernutrisi dan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Gambar 3.4: Diskon untuk produk mewah

PKB memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi masyarakat miskin yang hidup di perkotaan dan pedesaan, antara lain:

- Mengingat bahwa label info produk pangan dan *eco-label* tidak tersedia secara luas di pasaran, maka penting bagi konsumen untuk secara hati-hati memilih makanan yang dibeli agar tidak membahayakan kesehatan. Salah satu cara adalah dengan melihat penampilan makanan yang dibeli dan penyajian yang memenuhi standar kesehatan. Produk berikut tidak layak konsumsi karena membahayakan kesehatan:
  - Makanan yang terekspos ke udara terbuka sehingga tidak terhindar dari lalat, debu,dan polusi.
  - Warna makanan tampak mencolok, yang biasanya menggunakan pewarna bukan untuk pangan (pewarna kain, dan sebagainya).
  - Makanan, buah, sayur, daging, ikan, ayam tampak tidak segar lagi, berbau, dan lembek.
  - Tahu, salah satu makanan rakyat yang populer, tidak seharusnya keras dan kenyal, tetapi lembut. Kalau tidak demikian, kemungkinan tahu dicampur formalin agar tahan lama.
  - Makanan gorengan tampak agak kusam, kehitaman, atau gosong karena berulang-ulang digoreng, dan menggunakan minyak yang sama terus-menerus (hitam warnanya).
  - Makanan disajikan dalam wadah dan peralatan makan dan minum yang tidak bersih karena menggunakan air dari ember yang sama berulang-ulang.
  - Makanan dihidangkan oleh penjaja dengan menggunakan tangan, padahal tangan tersebut juga digunakan untuk menerima uang pembelian dan kegiatan lain, tanpa dicuci, tanpa menggunakan sendok garpu, sehingga makanan tercemar.
- PKB dapat memberikan pengetahuan tentang jenis dan menu makanan sehat kepada para ibu melalui Posyandu (Pusat Kesehatan Ibu dan Anak), Kelompok Pengajian Ibu, atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari pemerintah setempat. Organisasi semacam ini dapat menyediakan pengetahuan mendasar tentang makanan sehat, terutama bagi anak dan ibu hamil, cara masak sehat sesuai standar untuk mempertahankan nutrisi, dan kombinasi makanan sehat dengan sayur dan buah dalam pola makan sehari-hari.
- Informasi mengenai standar memasak yang benar agar nutrisi pangan tidak hilang, dan bagaimana merancang menu yang sehat dan memasukkan sayur dan buah di dalamnya.
- Keragaman tanaman lokal sebagai sumber pangan sehat dan mendukung keberlanjutan dari keaneka ragaman pangan setempat. Informasi mengenai pentingnya air bersih untuk minum, masak dan membersihkan peralatan masak dan pangan.
- Menentukan prioritas penggunaan dana terbatas demi kepentingan jangka panjang dan bukan untuk hal-hal konsumtif. Berhati-hati dalam jebakan iklan dan kesempatan berhutang yang merugikan.

Gambar 3.5: Makanan di udara terbuka yang cenderung terkontaminasi

Masyarakat Pesisir

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir adalah cara menangkap ikan yang merusak habitat laut dengan menggunakan bahan peledak, sianida dan pukat raksasa. Cara demikian membuat penangkapan ikan menjadi lebih cepat dan mudah, dan jumlah ikan yang ditangkap lebih banyak.

Sayangnya, cara yang tidak berkelanjutan ini juga berdampak pada matinya spesies lain yang tidak menjadi target penangkapan, rusaknya terumbu karang, dan ekosistem yang terganggu. Praktek semacam ini mengancam sumber hidup dan konsumsi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan hilangnya pasar hasil tangkapan sumber daya laut, serta berkurangnya sumber pendapatan dari wisata bahari (*snorkling* dan menyelam) sebagai akibat dari rusaknya ekosistem laut dan hilangnya sejumlah sumber daya laut.

Selain itu terdapat berbagai aktivitas yang mengarah kepada ancaman pada kehidupan masyarakat pesisir dan biota laut:

- Perdagangan terumbu karang dalam skala besar yang berakibat pada abrasi laut sehingga kehidupan masyarakat pesisir terancam.
- Mengambil berbagai kerang laut sebagai bisnis cinderamata dalam skala besar dapat membahayakan ekosistem laut dan produksi biota laut.
- Beberapa kegiatan wisatawan seperti jetski dan penyelaman intensif sepanjang tahun tanpa batas akan mengganggu habitat laut.
- Konversi daerah bakau menjadi resor, hotel atau restoran dan berkembangnya tambak udang di sepanjang pesisir mengakibatkan masalah kesehatan pada ekosistem laut. Ekosistem laut yang tidak sehat membuat pasokan sumber daya laut terganggu.

Untuk memastikan konsumsi berkelanjutan,manusia perlu memiliki pengetahuan tentang cara penangkapan ikan yang berkelanjutan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (mencegah punahnya spesies tertentu sebelum regenerasi), dan konsumsi yang berlebihan. Pengetahuan perikanan berkelanjutan akan menjadi pedoman menyangkut waktu penangkapan spesies laut tertentu, dimana spesies tersebut boleh ditangkap dan berapa banyak tingkat penangkapan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan regenerasi biota laut.

PKB yang berbasis pada pengetahuan atas sumber daya laut dan ekosistem laut akan menyumbang pada upaya untuk memastikan produksi berkelanjutan untuk konsumsi berkelanjutan.

Perlengkapan pendidikan yang mudah dibawa seperti Pedoman Makanan Laut yang diterbitkan WWF Indonesia (2011) akan memberi informasi tentang spesies laut mana yang tidak boleh dikonsumsi, atau berbahaya bila dikonsumsi. Kakap putih *(Barramundi)*, ketam kelapa *(Coconut Crab)*, tuna sirip biru *(Blue Fin Tuna)*, maming atau kerapu *(Napoleon Wrasse)*, penyu dan telor penyu adalah beberapa contoh yang termasuk daftar makanan laut yang secara drastis berkurang sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi.

Pelestarian tradisi dari masyarakat pesisir juga dapat dipertimbangkan ketika merancang PKB sesuai konteks Indonesia. Misalnya, tradisi masyarakat nelayan di Maluku, Sassi, telah mempertahankan sumber laut dengan baik, karena peraturan tradisi itu mengatur kapan dan dimana dapat menangkap ikan. Hal itu membantu memastikan pasokan ikan pada masyarakat nelayan sepanjang tahun.

Gambar 3.6: Indonesia kaya akan beragam jenis ikan

PKB berkaitan dengan perlindungan kehidupan pesisir dan laut termasuk pedoman bagi publik untuk secara aktif bertindak:

- Mencegah konsumsi spesies yang terancam punah (dengan rujukan pada daftar nasional spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan IUCN).
- Menerapkan aturan ekoturisme *(ecotourism code)* ketika mengunjungi daerah yang sangat terjaga seperti taman nasional laut dan daerah perlindungan *(protected areas)*.
- Membeli spesies laut yang ditangkap atau dipelihara dengan budidaya (bukan dengan bibit asli dari alam) atau dengan cara yang berkelanjutan.
- Hanya memilih spesies yang telah dewasa (bukan masih bayi atau muda) yang terlihat segar dan tanpa luka/cacat.
- Berhenti membeli perhiasan dari kerang.
- Tinggal di hotel atau resor yang merupakan *"green hotel or green resort"* yang memenuhi standar ramah lingkungan.
- Menggunakan perahu dayung dan bukan kapal bermesin untuk menghindari polusi suara yang dapat mengganggu kehidupan laut.
- Menghormati pengetahuan lokal ketika melakukan aktivitas wisata bahari.

Masyarakat Pertanian , Dataran Tinggi, dan Hutan Pedalaman.

Masyarakat Pertanian

Diantara berbagai masalah pertanian, salah satu yang paling menonjol adalah kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida, pupuk kimia, herbisida, dan berbagai produk kimia. Penggunaan dosis secara tidak tepat dapat menghilangkan predator alami dan akan membuat padi resistan terhadap hama. Serangan hama wereng coklat terjadi karena penggunaan pestisida yang luas dan berlebihan, yang membuat predator alami mati, sehingga produksi beras terganggu pada tahun 1977-1979 dan 1985-1986 (Triwidodo & Wienarto, Penanggulangan wereng batang coklat: Mampukah kita belajar dari sejarah, 2010). Ketika wereng coklat meyerang sentra beras di Indonesia, ketahanan pangan negara terancam.

Penggunaan pestisida secara tidak tepat, menyebabkan ancaman pada pasokan beras Indonesia, dimana penduduknya adalah konsumen beras setiap harinya.

Masyarakat Dataran Tinggi

Dengan makin berkembangnya penduduk di dataran tinggi, masalah utama dari para petani adalah keperluan akan tanah untuk berladang dan keperluan lain (rumah, infrastruktur lain seperti lahan untuk jalan, pasar, sekolah, dll). Perlahan-lahan hutan secara regular dimusnahkan dan dialihkan menjadi tanah pertanian dan kepentingan lain. Dalam jangka panjang praktek semacam ini akan menyebabkan tanah longsor, bencana banjir, hilangnya mata air dan tanah subur. Hal ini berdampak pada dataran rendah, karena hilangnya mata air di dataran tinggi menyebabkan berkurangnya sumber air bagi kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi di sepanjang daerah aliran sungai.

Gambar 3.7: Pertanian tetap menjadi kegiatan utama

Masyarakat Adat Pedalaman Hutan

Di pinggir hutan dan di dalam hutan masih tinggal masyarakat adat sebagai masyarakat pedalaman. Beberapa dari masyarakat adat hidup di daerah yang dilindungi dan mereka menggantungkan diri pada sumber alam hutan untuk kehidupan mereka. Diperkirakan sekitar 50 sampai 70 juta masyarakat adat (AMAN, 2010, p. 7) yang kehidupannya sepenuhnya tergantung pada hutan sebagai penyedia makan dan obat yang mereka perlukan. Mereka bertahan dengan berburu dan mengambil pasokan makanan dari hutan. Ancaman pada keberlangsungan masyarakat adat adalah perambahan hutan ilegal dan konversi hutan menjadi perkebunan dan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang kerapkali mengambil alih lahan dengan paksa atau melanggar hukum. Akibatnya, kegiatan konsumsi masyarakat adat yang sangat tergantung pada sumber alam hutan sangat terancam. PKB bagi komunitas daerah pertanian, dataran tinggi dan pedalaman dapat mencakup hal berikut:

- Gunakan secara aman bahan kimia dalam pertanian sehingga tetap melindungi ekosistem setempat, tanah, air dan konsumen hasil pertanian
- Perlakuan terhadap sungai dan sumber air ditujukan untuk memastikan pasokan air yang bersih dan sehat.
- Pertanian organik dan diversifikasi pertanian mendukung adanya fungsi alami bisa berlangsung tanpa tercemar dan membantu ketahanan pangan.
- Pengalihan lahan perlu memperhatikan keselamatan sumber air, mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah banjir serta longsor.
- Penggunaan air dan tanah dengan efisien dan inovatif ditujukan untuk mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak dengan menggunakan sumber alam lebih sedikit *(less for more).*
- Mencegah perambahan hutan ilegal dan konservasi hutan, dengan otoritas resmi yang efektif, sekaligus menghormati masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan di wilayah tertentu.

Beragam Kelompok Sosial Budaya

Terdapat lebih dari 1300 suku bangsa Indonesia dengan mayoritas suku Jawa yaitu 95,2 juta orang atau sekitar 40% dari total populasi. Jumlah masing masing populasi bervariasi, dari yang jumlahnya kurang dari 10.000 orang seperti, antara lain, suku Halmahera dan suku Wamok. Suku bangsa ini kemudian terbagi dalam 31 kelompok (Na'im & Syaputra, 2010, p. 5).

Tiap kelompok suku bangsa memiliki nilai dan norma sendiri menyangkut nilai spiritual, sumber kehidupan, bagaimana membangun hubungan sosial, bagaimana menghormati alam, dan pengetahuan tradisi termasuk produksi bahan pangan dan lauk-pauk, dan bagaimana mereka mengatasi masalah terkait sumber alam. Sejumlah kelompok etnis di Indonesia masih memegang tradisi mereka dengan kuat, sebagian lagi telah mengadaptasi kehidupan modern dan bercampur-baur dalam kehidupan kota serta pola konsumsi kelas menengah.

Orang Bali dengan kepercayaan Hindu memegang nilai Tri Hitakarana sebagai jalan hidup dimana mereka harus hidup selaras dan menghormati Sang Hyang Widhi (hubungan vertikal),selaras dengan manusia lainnya, dan dengan alam (hubungan horizontal). Mereka berdoa dengan upacara khusus untuk tiap siklus kehidupan yang penting (dari lahir sampai meninggal), merayakan pelayanan alam pada kehidupan manusia untuk menyatakan rasa syukur dan penghormatan pada apa yang mereka peroleh dari alam dan harapan terhadap alam untuk kesejahteraan, serta membangun hubungan erat diantara anggota banjar (desa Bali) dalam berbagai upacara keagamaan. Tradisi ini terus diterapkan hingga kini. Bagi mereka, hutan, sungai, pohon, bunga dan buah sangat bernilai tinggi.

Suku Jawa menghormati Dewi Sri sebagai dewi padi, dimana mereka menggelar upacara untuk menghormatinya atas panen yang berhasil, demikian pula dengan suku Sunda. Dengan mendalami nilai dan norma yang ada maka PKB memperoleh legitimasi atas pesan pendidikannya dan dengan mudah memperluas dan memperkuatnya untuk nilai dan norma mendukung konsumsi berkelanjutan.

Di tiap daerah dapat ditemui penganan khas yang menggunakan bahan-bahan setempat, dengan sumber alam setempat dan budaya setempat, menghasilkan cita rasa yang beragam, tergantung pada sumber alam setempat.

Terdapat kaitan yang erat antara makanan setempat dengan sumber alam yang tersedia, dan budaya lokal dalam mengolah dan menyajikan makanan daerahnya. Karenanya, konsumsi berkelanjutan berkaitan dengan alam (sebagai sumber pangan), tradisi budaya setempat (untuk menumbuhkan atau menghasilkan), dan untuk ketahanan pangan (memastikan bahwa adanya keamanan sumber daya alam sebagai sumber pangan).

Suku-suku di Sumatera dan di Sulawesi mempunyai lauk-pauk dengan rasa yang kuat mengandung rempah-rempah, cabai dan kelapa. Suku Jawa Tengah penganannya umumnya cenderung manis dan gurih, sedangkan suku Sunda menyajikan penganan yang segar, banyak mengandung sayur-mayur mentah dengan sambal. Terdapat kaitan erat antara pangan dari sumber alam setempat dan tradisi budaya lokal. Karenanya, konsumsi berkelanjutan terkait alam sebagai sumber pangan, dan tradisi budaya (bagaimana menumbuhkan pangan, mendapat pangan, menyajikan pangan dan memeliharanya agar terus dapat dimanfaatkan). Ini adalah beberapa contoh umum dari beberapa kelompok etnis di Indonesia.

Membangun materi PKB perlu memperhatikan tradisi budaya dan nilai-nilai setempat untuk memastikan bahwa solusinya relevan dan mengandung bentuk yang tepat sehingga dapat diterjemahkan dalam tindakan.

Merancang materi PKB di dalam konteks sosial budaya yang beragam memerlukan pengetahuan tentang nilai sosial budaya dari daerah tersebut yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, untuk memastikan bahwa solusi yang akan dilakukan relevan dan mempunyai bentuk yang terkait dengan tindakan nyata *(practical actions)*.

Boks 3.1: Konsumsi Berkelanjutan: Tanggung-Jawab Luas

Konsumsi Berkelanjutan adalah tentang mencari solusi yang dapat bekerja untuk menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan melalui tindakan yang lebih bertanggung-jawab dari setiap orang. Secara khusus, konsumsi berkelanjutan berkaitan dengan produksi dan distribusi, penggunaan dan sampah dari produk dan jasa, serta menyediakan cara untuk berpikir tentang gaya hidup mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat secara global dapat terpenuhi, dampak negatif dikurangi dan kerusakan lingkungan dapat dihindari
(UNESCO & UNEP, 2008, p. 7).

Kerangka Kerja Kurikulum PKB Dalam Pendidikan Formal

Tujuan Panduan PKB untuk Pendidikan Formal

Apakah anda adalah pembaca yang sudah mengimplementasikan Pendidikan untuk Konsumsi Berkelanjutan (PKB) di sekolah formal atau pembaca yang berpikir untuk mulai mengembangkan PKB, maka buku ini merupakan panduan untuk mengkaji kegiatan yang sudah dilakukan dan atau akan dirancang dan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Panduan PKB untuk pendidikan formal ini bertujuan untuk:

- Menggali langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah untuk memberikan kontribusi pada gerakan PKB,
- Menciptakan kurikulum lintas mata pelajaran yang menarik, relevan, dan signifikan bagi siswa,
- Menjelaskan beberapa kesukaran yang mungkin dihadapi dan cara mencegahnya,
- Mengidentifikasi elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan agar implementasi PKB dapat berhasil,
- Menyediakan beberapa metode dan contoh-contoh praktis dalam implementasi PKB., dan
- Menyediakan arah dan informasi detail untuk menolong pembaca dalam melaksanakan PKB.

Panduan ini secara khusus relevan untuk sekolah-sekolah di Indonesia.

Kurikulum Pendidikan Formal Indonesia: Ringkasan

Pada dasarnya kurikulum pendidikan nasional Indonesia, memberikan ruang untuk pengembangan PKB. Pertama-tama mari kita mengkaji beberapa undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar pijakan dalam pengembangan PKB di pendidikan formal. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tertulis bahwa:

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Lebih jauh lagi Pasal 3 UU 20/2003 pemerintah menetapkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan turut dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia. Undang-undang No 20 tahun 2003 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 19. Tentang Standar Pendidikan Naional. PP No 19 tahun 2005 memberikan panduan umum tentang pelaksanaan pendidikan formal di Indonesia. Dengan kata lain sistem pendidikan nasional memberikan ruang pada sekolah dan komite sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya berdasarkan standar isi dan standar kelulusan yang telah ditetapkan pemerintah serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh

Badan Standar Nasional. Pendidikan (BSNP). Pelaksanaan pendidikan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepubliIk Indonesia serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap perubahan jaman.

Fungsi dari pelaksanaaan pendidikan ini, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 adalah untuk,
…..mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Boks 3.2: Prinsip Pengembangan Kurikulum menurut Peraturan Menteri Pendidikan No 22 tahun 2006:

•	Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
•	Beragam dan Terpadu
•	Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
•	Relevan dengan kebutuhan kehidupan
•	Menyeluruh dan berkesinambungan
•	Belajar sepanjang hayat
•	Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan dalam kurikulum nasional merupakan panduan untuk mengembangkan kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran.	

Bagan berikut ini menunjukkan kelompok mata pelajaran menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006.

1. Agama dan Akhlak Mulia Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama
2. Kewarganegaraan dan Kepribadian Kesadaran dan wawasan akan status, hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat merupakan target yang diharapkan dari kelompok mata pelajaran ini, sebagai peningkatan kualitas diri. Peningkatan wawasan dan kesadaran akan hak asasi manusia, bela negara, gender, perlindungan lingkungan, demokrasi, sosial dan lain-lain diharapkan juga meningkat melalui mata pelajaran ini.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mengenal, menyikapi dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berpikir dan berperilaku ilmiah diharapkan dapat diperoleh melalui mata pelajaran ini. Selain itu diharapkan dengan memperkenalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di tingkat Sekolah Dasar, maka siswa akan menjadi kritis, kreatif dan mandiri yang kemudian akan makin ditingkatkan di tingkat sekolah menengah dan menjadi suatu kompetensi dan keterampilan untuk siswa sekolah kejuruan.
4. Estetika Estetika ini diperlukan untuk membantu siswa agar peka dan mampu mengekspresikan keindahan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kelak dapat menciptakan kehidupan yang harmonis.
5. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Di tingkat Sekolah Dasar, kelompok mata pelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fisik, membangun sportivitas dan hidup sehat. Di tingkat sekolah menengah hal ini akan makin ditingkatkan ditambah dengan keterbebasan dari perilaku seksual bebas, HIV/AIDS, demam berdarah dan wabah penyakit lainnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 telah memperkenalkan kurikulum 2013. Buku ini mencoba mengadopsi KI dan KD yang ada dalam kurikulum 2013.

Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan no 22, tahun 2006 menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia disusun untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar, mengembangkan konsep, menunjukkan sikap positif serta mampu melakukan tindakan yang bertanggung jawab. Untuk mencapainya, maka ada lima hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kelima poin tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Prinsip Penting dalam Kurikulum

Pengetahuan	Pengetahuan yang bersifat signifikan, relevan dan diharapkan dapat digali dan dipahami siswa dengan mempertimbangkan pengetahuan awal dan pemahaman mereka.
Konsep	Siswa dapat menghasilkan ide yang luarbiasa yang berkaitan dengan mata pelajaran, yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut oleh siswa dengan cara menggali pengetahuan itu terus menerus sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam.
Keterampilan	Adalah kemampuan yang dapat ditunjukkan oleh siswa agar dapat berhasil di dunia yang selalu berubah dan menantang. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui mata pelajaran ataupun lintas mata pelajaran.
Sikap	Karakter yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kepercayaan, dan perasaan terhadap proses pembelajaran, lingkungan dan juga terhadap manusia.
Aksi	Tingkah laku yang bertanggung jawab yang ditunjukkan melalui suatu aksi nyata; dalam bentuk praktek dari berbagai prinsip lainnya.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 mengenai Standar isi dan kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah (2006)

Peraturan tersebut juga menekankan bahwa kompetensi dasar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, keterampilan, sikap (termasuk etika dan moral), kemampuan untuk berpikir logis-kreatif-kritis-innovatif, kerjasama, dan keinginan untuk membaca dan menulis, bertanggung-jawab, dan toleransi.

Struktur dan Jenjang pendidikan nasional, berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan 3.1 Sistem pendidikan di Indonesia

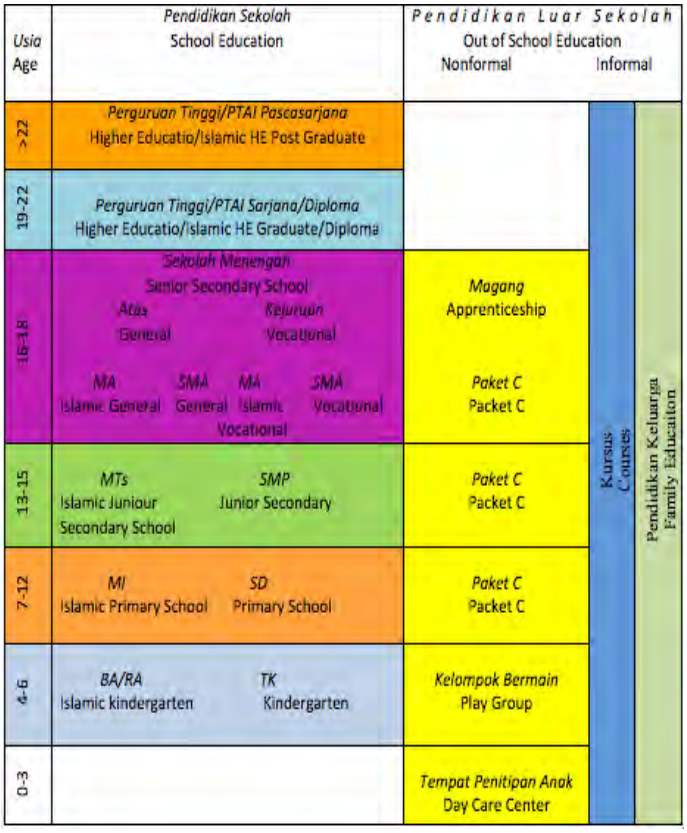

Sumber :UU No.20 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Menurut Peraturan Menteri Pendidikan No 22 tahun 2006 (appx.,ch. 2, sub ch. A.3):	
•	Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu,serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
•	Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: 1. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. belajar untuk memahami dan menghayati 3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 4. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan 5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan..
•	Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
•	Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
•	Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
•	Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
•	Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah serta peraturan Menteri Pendidikan yang diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa ada banyak kesempatan bagi dunia pendidikan formal untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan jaman.

Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract
– sustainable development –
and turn it into a reality for all the world's people.
(Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations)

Pendekatan Praktis Dalam Mengintegrasikan PKB Dalam Kurikulum Sekolah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara kurikulum nasional dengan PKB. Tujuannya adalah untuk:

- Mengidentifikasi bagaimana merencanakan, mengimplementasikan dan menilai proses pembelajaran berbasis *inquiry* yang terintegrasi dalam kurikulum 2013 dan berfokus pada PKB.
- Memberikan informasi tentang latar belakang konsep, nilai-nilai dan pemahaman untuk mendukung proses pembelajaran yang mengakomodir PKB.
- Memberikan saran tentang pendekatan yang dapat dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran.
- Memberikan saran tentang penggunaan sumber belajar secara efektif.
- Mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan sekolah untuk mempromosikan PKB.

PKB merupakan proses yang mencakup:

- Lintas mata pelajaran dan pembelajaran yang menyeluruh,
- Berpikir kritis dan pemecahan masalah,
- Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,
- Berbagai metode,
- Berbagi nilai dan prinsip-prinsip,
- Integrasi pengalaman belajar sehari-hari dan
- Membahas isu lokal dan isu global.

Sumber: Framework for the UNDES: International implementation scheme, ©UNESCO, 2006, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148650E.pdf

Gambar 3.8: Siswa sedang berdiskusi di dalam kelas

Mengangkat isu PKB di kelas, akan menolong guru untuk menjadikan isu tersebut menjadi relevan dengan keseharian siswa, dan pada saat bersamaan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu siswa untuk melihat hubungan antara berbagai aspek yang menyangkut isu PKB dan kompleksitasnya. Berikut ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang bisa menjadi bahan diskusi di kelas.

Satu saran langkah praktis untuk memfasilitasi siswa untuk menjadi seorang yang dapat memecahkan masalah adalah melalui proses belajar *inquiry*. Pembelajaran dengan menggunakan metode *inquiry* akan membantu siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai satu topik dan memberikan kesempatan pada mereka untuk menggali dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut (Wilson & Jan, 2003, p. 10).

Melalui pembelajaran *inquiry* siswa akan menjadi seseorang yang selalu mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya. Pembelajaran *inquiry* mendorong siswa untuk menguji kompleksitas dunia ini dan secara mandiri membangun konsepnya sendiri (Wilson & Jan, 2003, p. 10). Belajar akan menjadi sangat bermanfaat bila isi materi dan keterampilan dikembangkan melalui cara yang sangat berarti, sehingga pada saat yang sama siswa juga membangun pengetahuannya sendiri.

Bagan 3.2: Tahapan Pembelajaran
Mencari Tahu *(inquiry)*

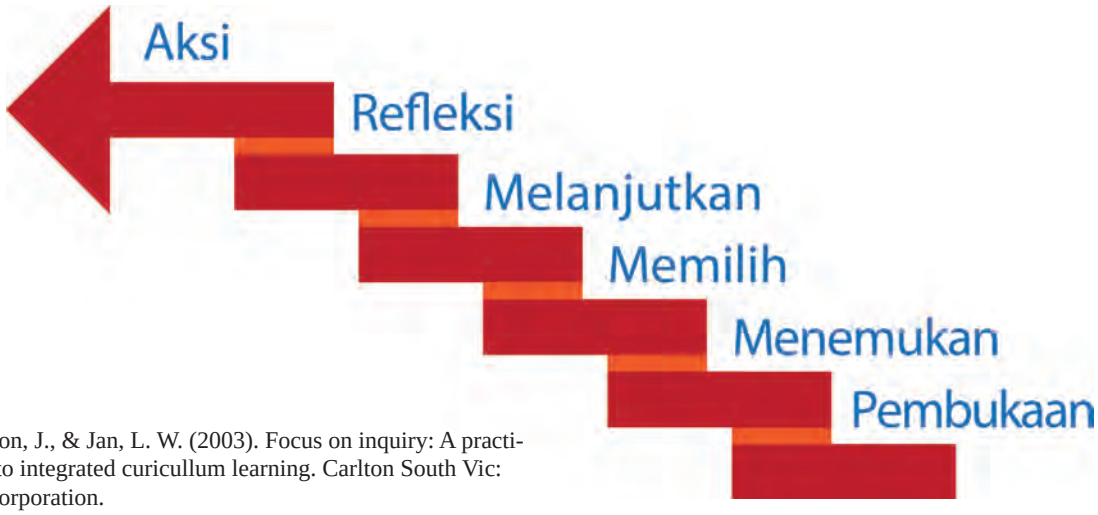

Sumber: Wilson, J., & Jan, L. W. (2003). Focus on inquiry: A practical approach to integrated curicullum learning. Carlton South Vic: Curicullum Corporation.

Gambar di atas menunjukkan tahap-tahap pembelajaran *inquiry* yang akan menolong kita untuk merencanakan proses pembelajaran *inquiry* yang terintegrasi dalam kurikulum. "Mengajukan Pertanyaan" adalah dasar dari *inquiry.* "Pertanyaan yang baik akan menolong siswa untuk mengklarifikasi dan memperluas pemahaman dan keterampilan" (Wilson & Jan, 2003, p. 26). Contoh-contoh pertanyaan berikut yang diadaptasikan dari Focus on inquiry: *A practical approach to integrated curicullum learning Wilson and Jan*, diharapkan dapat menolong siswa dalam menerapkan pembelajaran *inquiry* (2003, p. 27):

Bagan 3.3: Beberapa Contoh Pertanyaan
Yang Diajukan Guru

Pembukaan	- Apa yang kamu ketahui tentang? - Kamu tertarik dalam hal apa? - Apa yang ingin kamu pelajari?
Menemukan	-Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? -Apa rencanamu sekarang? -Bantuan apa yang kamu butuhkan? -Apa yang kamu ingin lakukan? -Pertanyaan mana yang sudah ada jawabannya?
Memilih	- Apa yang sudah kamu pelajari? - Bagaimana kamu akan mengorganisasikan informasi ini? - Bagaimana kamu akan merekam informasi ini? - Bagaimana kamu akan mengkomuni kasikan informasi tersebut? - Apa yang akan kamu lakukan lebih dulu?
Melanjutkan	- Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Mengapa? - Bagaimana hubungannya dengan topik/konsep yang sedang dibahas? - Bagaimana kamu akan melakukannya? - Siapa/apa yang dapat menolong kamu melakukannya? - Mengapa kamu ingin melakukan penelitian lebih lanjut?
Refleksi	- Hal apa yang paling menarik yang telah kamu pelajari? Mengapa? - Mengapa kamu mempelajari topik ini? - Apa yang menolong / menghalangi kamu dalam proses belajar? - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Mengapa? Bagaimana kamu dapat melakukannya? - Bagaimana kamu akan melakukan perbaikan untuk kegiatan ini diwaktu yang akan datang?
Aksi	- Dari materi yang telah kamu pelajari, apa yang dapat diaplikasikan dalam keseharian kamu? - Apa rencana kamu berikutnya? - Bagaimana kamu akan mengaplikasi pengetahuan dan keterampilan yang sudah kamu miliki dalam keseharian kamu? - Apa yang kamu ingin lakukan sebagai hasil dari proses belajar ini?

Sumber: Wilson, J., & Jan, L. W. (2003). Focus on inquiry: A practical approach to integrated curicullum learning. Carlton South Vic, Australia:Curicullum Corporation.

Tiga rekomendasi pendekatan yang dapat dipakai dalam mengimplementasikan PKB di Indonesia:

1. Pendekatan Integrasi: Diajarkan lintas mata pelajaran.
2. Pendekatan Monolitik: Diajarkan dalam satu mata pelajaran, misalnya dalam muatan lokal.
3. Program pengembangan pribadi.

PKB dapat memotivasi siswa dalam belajar, karena proses pembelajarannya berhubungan dengan topik-topik keseharian yang menarik dimana siswa dapat menghubungkan antara topik yang dipelajari, dan pengalaman sehari-hari untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan keterampilan mereka.

Pendekatan 1: Integrasi

Pendekatan integrasi ini menjadi fokus dalam kurikulum 2013. Dalam pendekatan integrasi terjadi keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga proses pembelajaran menjadi saling memperkuat. Dalam Kurikulum 2013, pendekatan integrasi ini dikenal sebagai organisasi horizontal.

Menurut kurikulum 2013, ada empat Kompetensi Inti (KI) yang saling terkait dan perlu diperhatikan dalam menerapkan pendekatan ini. Kompetensi inti tersebut adalah:

1. kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan;
2. kompetensi yang berkenaan dengan sikap sosial;
3. kompetensi yang berkenaan dengan pengetahuan;
4. kompetensi yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan.

Keempat kompetensi ini harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan (KI1) dan sosial (KI 2) dikembangkan secara tidak langsung pada saat siswa belajar tentang pengetahuan (KI 3) dan penerapan pengetahuan (KI 4).

Dua ide untuk proses pembelajaran yang mengintegrasikan PKB dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

Contoh 1: Tema Konservasi Air di Kelas 10 Peminatan Matematika dan IPA

Sebagai bagian dari proses pembelajaran tentang keaneka ragaman hayati pada mata pelajaran Biologi, siswa diajak ke aliran sungai di sekitar mereka. Di sini siswa dapat melakukan observasi dan mengidentifikasi berbagai jenis makhluk hidup-hewan, burung, serangga dan tumbuhan yang ada disekitar sungai. Menguji kualitas air dengan menggunakan indikator biologi, menyajikan data dalam bentuk tabel dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air sungai. Menggali informasi mengenai konservasi sungai, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang untuk konservasi sungai merupakan tahap berikutnya. Pada akhir kegiatan siswa diminta melakukan refleksi atas kegiatan yang dilakukan.

Keterampilan untuk menggali informasi dan menuliskan laporan pada saat bersamaan di kelas Bahasa Indonesia. Di kelas ini siswa belajar menyatakan pendapat tentang kondisi sungai, serta menyusun teks lisan dan tulisan.

Pengembangan *soft skills* seperti rasa ingin tahu, objektif, jujur teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, dan peduli lingkungan secara tidak langsung terfasilitasi melalui kegiatan ini.

Sementara itu, di kelas Sejarah Indonesia siswa belajar mengidentifikasi karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dalam kaitannya dengan pelestarian alam dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Di kelas ini siswa juga berkesempatan untuk menggali dan meneladani tindakan cinta damai, responsif dan pro aktif yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sejarah dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan, dalam hal ini konservasi sungai.

Tiga mata pelajaran - Biologi, Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia - saling bekerjasama untuk mengintegrasikan PKB dan menerapkan proses *inquiry*. Pertanyaan panduan dalam setiap tahapan *inquiry* dapat dipakai untuk memandu siswa melakukan proses *inqury* mulai dari pembukaan, menemukan, memilih, melanjutkan hingga refleksi dan aksi.

Proses Belajar

Berikut ini adalah contoh pertanyaan panduan yang bisa diajukan guru Biologi kepada siswa kelas 10 yang sedang belajar tentang konservasi air.

Bagan 3.4: Contoh Pertanyaan Panduan Yang Dapat Diajukan Guru kepada Siswa Kelas 10

Pembukaan	- Apa yang kamu ketahui tentang sumber air - Kegiatan: Menonton film tentang sungai.
Menemukan	- Bagaimana kamu memperoleh informasi tentang sumberdaya di daerah mu dan di seluruh dunia? - Apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi sumberdaya air?
Memilih	- Pilih informasi mengenai konservasi air di Indonesia dan di seluruh dunia ini. - Tugas: Membuat perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan untuk konservasi air dan presentasi.
Melanjutkan	- Lakukan kegiatan konservasi air yang sudah direncanakan.
Refleksi	- Apa hal yang paling menarik/ signifikan yang kamu temukan saat mempelajari tentang konservasi air? Mengapa? - Dari pengalaman kami mendukung konservasi air, apa yang akan kamu lakukan lagi dilain waktu? Mengapa?
Aksi	- Bagaimana kamu akan menerapkan pengetahuan yang telah kamu pelajari tentang konservasi air dalam keseharian kamu? - Apa yang akan kamu lakukan sebagai wujud aplikasi hasil belajar kamu tentang konservasi air?

Gambar 3.9: Siswa sedang membersihkan sungai

Beberapa metode mengajar yang dapat dipakai dalam tema konservasi air:

- Eksperimen
- Observasi
- Studi Lapangan
- Studi Literatur
- Diskusi Kelompok
- Bermain Peran
- Debat
- Kampanye
- Mengerjakan Proyek

Penilaian

Dalam menilai hasil kerja siswa, penting bagi guru untuk memilih teknik penilaian yang dapat memfasilitasi siswa untuk :

- Saling membagikan pengalaman belajar dan pemahaman mereka,
- Menunjukkan pengetahuan, pemahaman akan konsep dan keterampilan yang dimiliki,
- Menggunakan berbagai tipe belajar, kecerdasan intelegensi dan kemampuan untuk menunjukkan pemahaman mereka,
- Mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang kriteria untuk menghasilkan atau menampilkan suatu karya yang baik ,
- Berpartisipasi dalam melakukan refleksi pribadi dan juga menilai hasil karya rekan sebaya.
- Berdasarkan pengalaman belajar yang nyata, dapat menuntun siswa pada proses *inquiry* lebih lanjut,
- Mengekspresikan berbagai pandangan dan pemahaman, dan
- Menganalisa proses belajar dan memahami hal-hal yang perlu diperbaiki

Contoh 2: Tema "Bangga menjadi orang Indonesia" untuk kelas 5

Untuk memfasilitasi siswa memahami manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia, serta memahami manusia Indonesia dalam bentuk dan sifat dinamika interaksi lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi maka integrasi PKB dapat diterapkan dengan mengajak siswa melakukan berbagai kegiatan. Salah satu contohnya, secara berkelompok, siswa diminta mewawancarai tokoh masyarakat tentang kebiasaan adat istiadat dan kearifan lokal yang mendukung konsumsi berkelanjutan di propinsi yang berbeda. Misalnya upaya perlindungan hutan, laut dan kegiatan pertanian. Memasak makanan tradisional dari berbagai propinsi dan menggali ciri khas yang dimiliki setiap propinsi juga dapat dilakukan sebagai bagian dari proses *inquiry* yaitu pembukaan, menemukan ataupun memilih.

Sebagai tindak lanjut, siswa diminta untuk membuat presentasi atau pameran tentang kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di propinsi tersebut dan mempromosikan upaya yang dilakukan masyarakatnya untuk mendukung konsumsi berkelanjutan. Kegiatan diakhiri dengan refleksi dan membangun komitmen untuk menghormati budaya lokal.

Secara pararel di kelas IPA, sebagai bagian dari proses *inquiry* siswa mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar.

Sementara itu dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, siswa dapat belajar mengenal harmoni musik dan lagu daerah yang membawa pesan tentang konsumsi berkelanjutan serta menyanyikannya dalam acara pameran.

Pemilihan Tema

Pendekatan integrasi dengan menggunakan payung tema seperti yang dicontohkan dalam proses pembelajaran di kelas 10 peminatan IPA dan kelas 5, prosesnya dapat dimulai dengan mengidentifikasi Kompetensi Dasar yang hendak dicapai siswa di setiap semester. Dalam Kurikulum 2013,

Gambar 3.10: Siswa sedang mewawancarai tokoh desa

kompetensi inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan (KI 1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3) dan penerapan pengetahuan (KI 4). Agar guru antar mata pelajaran bekerjasama untuk memilih tema yang tepat, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemetaan Kompetensi Dasar (KD) di setiap semester. Tabel berikut ini dapat dipakai untuk memetakan KD setiap mata pelajaran.

Tabel 3.2: Kompetensi Dasar kelas 8

Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar
kelompok A	• Memahami dan dapat menjelaskan makna berterima kasih untuk setiap orang. Beriman (Standar kompetensi No: 3,1, 4,1)
Pendidikan Agama	
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	• Memahami norma-norma yang berlaku di berbagai lokasi di Indonesia. Menerapkan norma-norma yang biasanya digunakan di masyarakat Indonesia.
Bahasa Indonesia	Akan dilengkapi oleh guru
Matematika	
Ilmu pengetahuan Alam	
Ilmu Pengetahuan Sosial	
Bahasa Inggris	
Kelompok B	
Seni Budaya	
Pendidikan Jasmani	
Prakarya	

Selanjutnya, guru mata pelajaran dapat saling bekerjasama untuk mengidentifikasi tema tentang PKB yang dapat dipelajari oleh siswa secara bersama-sama di setiap mata pelajaran, selama satu semester.

Berikut ini adalah contoh-contoh tema dalam PKB, yang disusun oleh UNEP, *UNEP's Here and Now! Education for Sustainable Consumption: Recommendations and Guidelines* (UNEP, 2010, p. 21) dan menjadi rujukan saat memilih tema dan merencanakan kegiatan pembelajaran.

Tabel 3.3: Tema-tema PKB yang dapat diajarkan kepada siswa

Kualitas Hidup	Gaya Hidup
- Nilai-nilai, kebutuhan, keinginan - Hak asasi, kode etik dan prinsip-prinsip keagamaan - Kecukupan dan Keseimbangan - Pembangunan berkelanjutan - Konsumsi berkelanjutan	- Sejarah perkembagan sosial dan ekonomi - Sejarah konsumsi - Kondisi sosial saat ini - Pola konsumsi saat ini - Aturan-aturan simbolik konsumsi - Peran Keluarga - Gaya hidup alternatif
Sumberdaya	**Ekonomi**
- Alam - Manusia - Keuangan - Teknologi - Organisasi - Hubungan antara sistem dan proses - Keseimbangan dan ketidakseimbangan	- Model ekonomi dan prakteknya - Produksi dan perdagangan - Perusahaan multinasional - Tanggung jawab sosial - Tabungan, pinjaman, investasi - Jasa keuangan dan instrumen - Iklan elektronik
Konsumsi dan Lingkungan	**Hak Konsumen dan Tanggung Jawab**
- Siklus hidup barang dan kemampuan untuk didaur ulang - Pengemasan - Daur ulang, digunakan kembali, perbaikan produk - Energi - Perumahan - Transportasi - Komunikasi - Hiburan - Pariwisata - Iklim, tanah dan perlindungan air - Keaneka-ragaman hayati - Manajemen sampah - Dampak ekologi	- Hukum dan aturan - Kesepakatan dan kontrak - Kebijakan perlindungan konsumen - Transparansi dan tingkat kepercayaan - Mengkritisi, membahas ulang, mengganti biaya - Resolusi konflik
Informasi dan Manajemen	**Kesehatan dan Keselamatan**
- Literasi digital - Literasi media - Iklan dan persuasi - Memberikan label - Tekanan kelompok - Sistem informasi data - Lembaga perlindungan konsumen	- Keamanan makanan - Modifikasi genetik makhluk hidup - Makanan dan nutrisi - Ekologi, makanan organik - Zat tambahan - Penyakit yang disebabkan gaya hidup dan endemik - HIV/AIDS - Jasa sosial - Keamanan produk - Pemberian label dan kontrol kualitas.

Perubahan Manajemen	Kesadaran global
- Kreativitas dan innovasi - Perspektif masa depan - Warganegara aktif - Keterlibatan pemangku kepentingan - Pelayanan masyarakat	- Saling ketergantungan global - Energi, perdagangan komersial, pertanian, penggunaan lahan - Kemiskinan - Hak asasi manusia - Hak asasi pekerja - Kriminal - Prinsip-prinsip pencegahan - Perdagangan yang adil - Tujuan milenium - Kewarganegaraan dunia

Sumber: UNEP. (2010). *Here and now! Education for sustainable consumption: Recommendations and guidelines.* Paris, France: UNEPDTIE SCP.

Berikut ini adalah contoh tema di kelas 8.

Bagan 3.5: Topik lintas mata pelajaran untuk siswa kelas 8

Setelah pemetaan kompetensi selesai dibuat, maka guru setiap mata pelajaran diharapkan dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang akan dikembangkan selama proses pembelajaran. Identifikasi ini akan membantu guru untuk memastikan bahwa KI 1 dan 2 tercapai sejalan dengan pencapaian KI 3 dan 4. Tabel berikut ini yang diadaptasi dari panduan terbitan UNESCO untuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (2011, p. 33) dapat dipakai sebagai rujukan:

Tabel 3.4: Identifikasi Standar Kompetensi, Keterampilan, Nilai-nilai dan Sikap dalam Mata pelajaran Terkait PKB

Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar Dalam kolom ini, tuliskan perubahan yang diharapkan terjadi untuk konsumsi berkelanjutan	Pengetahuan Apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan?	Keterampilan		Nilai-nilai dan Sikap Nilai-nilai dan sikap apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan
			Kognitif/Teknik Keterampilan kognitif dan kecakapan teknis apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan (ICT, berpikir kritis, membaca, dll)	Sosial/ Emosional Keterampilan sosial dan emosional apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan	
Karakteristik Pembelajaran Apa karakteristik pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap siswa? (misalnya: lintas mata pelajaran, pengalaman langsung)					
Pembelajaran yang……					
Lingkungan Belajar Lingkungan belajar yang seperti apa yang mendukung pesan yang akan disampaikan (misalnya kesehatan dan makanan tradisional di kantin sekolah)					
Lingkungan yang…..					

Sumber: UNESCO. (2011). *Astrolabe: A guide to education for sustainable development in Asia and the Pacific.* Bangkok, Thailand: UNESCO.

Tabel 3.5: Pengetahuan, Keterampilan, Nilai-nilai dan Sikap terhadap Gaya Hidup Manusia, Kelas 8 Semester 1

Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar Dalam kolom ini, tuliskan perubahan yang diharapkan terjadi untuk konsumsi berkelanjutan	Pengetahuan Apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan?	Keterampilan		Nilai-nilai dan Sikap Nilai-nilai dan sikap apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan
			Kognitif/Teknik Keterampilan kognitif dan kecakapan teknis apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan (ICT, berpikir kritis, membaca, dll)	Sosial/ Emosional Keterampilan sosial dan emosional apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diharapkan	
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Siswa memiliki gaya hidup yang mengutamakan kesehatan, tidak menggunakan berbagai macam zat kimia dan memperhatikan prinsip PKB.	Sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan Zat adiktif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan Penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif-psikotropika. Gaya hidup yang peduli terhadap konsumsi berkelanjutan	Berpikir kritis tentang berbagai gaya hidup masyarakat dalam hubungannya dengan perkembangan penduduk. Mengidentifikasi gaya hidup yang peduli terhadap konsumsi berkelanjutan. Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif-psikotropika. Merancang kampanye dan program tentang gaya hidup yang peduli terhadap konsumsi berkelanjutan. Melaksanakan program untuk mendidik orang lain agar memiliki gaya hidup yang peduli terhadap konsumsi berkelanjutan.	Berkomunikasi Bekerjasama Menolong orang lain Bekerja keras Disiplin	Bersyukur kepada Tuhan akan tubuh, kehidupan dan kondisi kesehatan. Toleransi Kejujuran dalam mengumpulkan dan mengolah data Rasa ingin tahu Disiplin dan kerja keras Kreatif Peduli lingkungan Menghormati orang lain. Cinta damai Kepedulian sosial Tanggung jawab Semangat kebangsaan dan cinta tanah air

Karakteristik Pembelajaran Apa karakteristik pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap siswa? (misalnya: lintas mata pelajaran, pengalaman langsung)
Pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk membedakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan pendapat tentang nilai-nilai dan untuk melakukan penyelidikan tentang kepercayaan dan latar belakang ketertarikan yang dimiliki seseorang. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis masalah, bermain peran, pengalaman lapangan dan forum diskusi.
Lingkungan Belajar Lingkungan belajar yang seperti apa yang mendukung pesan yang akan disampaikan (misalnya kesehatan dan makanan tradisional di kantin sekolah)
Adanya lingkungan yang bersih seperti kantin yang menyajikan makanan lokal yang sehat; upaya pengolahan sampah di sekolah; upaya penghematan energi.

Gambar 3.11: Bekerja dengan komunitas untuk membersihkan lingkungan

Gambar 3.13: Anak-anak sedang mengecat toilet

Gambar 3.12: Anak-anak belajar tentang lingkungan

Gambar 3.14: Siswa sedang mempresentasikan hasil belajarnya

Pengetahuan, keterampilan, sikap , dan nilai-nilai dapat juga diidentifikasi pada rencana pembelajaran. Tabel 3.6 di bawah ini memperlihatkan sampel format rencana pelajaran, yang menyertakan langkah-langkah pembelajaran *inquiry*.

Tabel 3.6: Contoh format rencana pembelajaran

<table>
<tr><th colspan="4">Rencana Pembelajaran</th></tr>
<tr><td colspan="4">Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Topik :
Alokasi Waktu :
Tema :</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pertanyaan panduan pembelajaran (Apa yang saya ingin murid tahu dan dapat lakukan?)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Metode:</td></tr>
<tr><td>Objektif</td><td>Indikator</td><td>Penilaian</td><td>Aktivitas Belajar Mengajar</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>Pembukaan</td></tr>
<tr><td>Mencari Tahu</td></tr>
<tr><td>Memilih</td></tr>
<tr><td>Langkah Selanjutnya</td></tr>
<tr><td>Refleksi</td></tr>
<tr><td>Aksi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Sumber /Materi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Lain-lain</td></tr>
</table>

Untuk membantu guru dalam membantu siswa untuk melihat dan memahami PKB dan melihat hubungan antara PKB dan kehidupan mereka sendiri, kita dapat menggunakan Tabel 3.7 di bawah ini untuk membantu menyusun pelajaran dalam rangka menyelaraskannya dengan visi dan prinsip-prinsip PKB.

Tabel 3.7: Penyusunan Pelajaran di Kelas 8 agar berkaitan dengan visi dan prinsip dari Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

No	Mata Pelajaran	Penyesuaian standar kompetensi dengan prinsip PKB		
		Lingkungan	**Sosial**	**Ekonomi**
1	IPA	Sistem tubuh dan kesehatan manusia; zat kimia dan kesehatan manusia. (KD No 3.8, 3.10, 3.12. 4.9)		
2	Matematika	Tabel, grafik dan persamaan tentang zat kimia, lingkungan dan kesehatan. (KD No 3.12, 4.2)		
3	Ekonomi			Perilaku ekonomi manusia (KD no 4)
4	Agama Kristen		Memahami dan mampu menjelaskan makna bersyukur. Berperilaku seperti orang beriman (KD No 3.1, 4.1)	
5	PPKN		Memahami norma yang berlaku di masyarakat. Meng-aplikasikan norma yang berlaku (KD No 3.4, 4.4)	

Pendekatan 2: Monolitik

Beberapa sekolah memiliki mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan Hidup, di Sulawesi Tenggara misalnya nama mata pelajaran muatan lokalnya adalah Mata Pelajaran Kelautan. Pendekatan ini juga dapat dipakai bila PKB diintegrasikan hanya pada satu mata pelajaran.

Gambar 3.15: Siswa memamerkan hasil produk mereka

Gambar 3.16: Siswa belajar di luar kelas

Pendekatan 3: Program Pengembangan Diri

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui pendekatan ini adalah: pembiasaan, kegiatan rutin, model panutan dan atau berbagai kegiatan lainnya.

Contoh pembiasaan di sekolah:

Gambar 3.17: Hindari 5 P demi kesehatan bersama

Gambar 3.18: Kedai Kewirausahaan SMKN 2 Boyolangu

Gambar 3.19: Siswa sedang menikmati makanan

SMKN 2 Boyolangu-Tulungangung, SD Santa Maria Surabaya, dan SMPN 1 Merakurak-Tuban memiliki kantin sekolah dan pelayanan kantin yang digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk memandu siswa dalam hal memilih makanan.

Sikap positif terhadap kantin sekolah yang mendukung pola makan sehat dipromosikan dan didorongkan dalam program ini. Kebijakan kantin sekolah yang diterapkan meliputi:

- Informasi mengenai nutrisi makanan yang disediakan kantin.
- Strategi dalam mempromosikan dan memasarkan pilihan-pilihan yang sehat,
- Mengevaluasi, meninjau ulang dan memantau proses dan juga pengelolaan kantin.

Kantin sekolah juga merupakan tempat yang strategis untuk mempelajari asal-usul makanan. Termasuk didalamnya bagaimana sayuran ditanam, dipanen dan sumberdaya apa yang dipergunakan dalam proses produksi, dan sampah apa yang dihasilkan serta dampaknya.

Gambar 3.20: Beberapa jenis tempat sampah

Gambar 3.21: Sepeda siswa, transportasi tanpa polusi

Gambar 3.22: Kompos Toyo SMPN 1 Balikpapan

Pengelolaan sampah adalah satu topik yang dapat dipakai untuk melibatkan seluruh masyarakat sekolah dalam program *Eco-School*. Selain berkegiatan untuk mengurangi sampah, mencari strategi untuk menggunakan kembali sampah atau mengimplementasi program daur ulang atau program kompos. Semua program ini menyediakan berbagai pengalaman.

Gambar 3.23: Siswa menari tarian daerah

Gambar 3.24: Berhenti memakai formalin

Gambar 3.25: Siswa sedang menggambar lingkungan

Gambar 3.26: Bercocok tanam di lahan terbatas

Bila kita tidak yakin apakah PKB dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstra kurikuler, maka perhatikan gambar di samping ini dan coba identifikasi kegiatan apakah yang dilakukan siswa yang berhubungan dengan PKB?

Pendekatan Sistem Sekolah

Boks 3.3: Konferensi Bandung, Keterlibatan Kaum Muda dalam Gaya Hidup Berkelanjutan

"Kami, delegasi konferensi anak dan remaja Tunza 2011 yang mewakili 118 negara, bersatu menghimbau para pemimpin dunia untuk memimpin dunia beralih menuju pembangunan berkelanjutan yang melindungi bumi dan penduduknya, untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Kami generasi berikut yang akan mengambil keputusan dan kami bersatu untuk melakukan aksi dan perubahan. Mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan dan mendidik penduduk lokal, termasuk masyarakat tradisional, serta berbagi pengetahuan. Semua tindakan dimulai dari setiap individu dan kami berkomitmen untuk mengurangi jejak ekologi kami.

Kami akan mengajar dan saling mendorong untuk bersama menjadi konsumen yang bertanggung-jawab dan menggunakan alat yang tersedia. Banyak kaum muda yang masih belum peduli tentang isu lingkungan yang penting karena kurangnya akses pendidikan. Kami akan meminta agar pendidikan lingkungan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan diwajibkan di setiap kurikulum sekolah kami. Kami akan meminta agar anak-anak dan kaum muda pasti dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap level." (UNEP, 2011b).

Suara anak dan kaum muda untuk Rio+20, dideklarasikan saat konferensi internasional Tunza untuk anak dan kaum muda, yang diadakan di Bandung pada tahun 2011. Deklarasi tesebut merangkum kebutuhan anak-anak dan kaum muda untuk belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu untuk mengakomodirnya pemerintah perlu mereorientasi pendidikan, perlu memikirkan kembali dan merevisi pendidikan di semua jenjang untuk memasukkan lebih banyak prinsip-prinsip, keterampilan, perspektif dan nilai-nilai yang berhubungan dengan prinsip keberlanjutan. Pernyataan peserta konferensi tersebut juga merefleksikan pentingnya perhatian pada proses belajar. Untuk memasukkan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan, sekolah perlu mendiskusikan isu tersebut dari berbagai perspektif yang berbeda, merencanakan aksi dan bekerja-sama dengan masyarakat untuk mengimplementasi aksi yang telah direncanakan. Sekolah perlu menjadi agen perubahan.

Pendekatan menyeluruh adalah suatu strategi untuk memfasilitasi sekolah agar menjadi pusat pembelajaran masyarakat dimana peserta berpartisipasi secara aktif dalam mengangkat isu PKB, membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dengan kata lain, pendekatan menyeluruh adalah pendekatan yang dilakukan sekolah untuk mengintegrasikan seluruh aspek dari kehidupan sekolah dan kampus dengan cara mengkaitkan antara topik yang dipelajari siswa di sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana siswa didorong untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikan suatu kegiatan yang berkelanjutan di sekolah mereka. Kegiatan belajar yang diterapkan akan mendukung partisipasi siswa dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah dan melakukan perencanaan. Pendekatan menyeluruh berarti seluruh komunitas sekolah terlibat di dalamnya. Bukan hanya guru dan siswa, tetapi juga pimpinan sekolah, orang-tua, konselor sekolah dan juga staf yang menangani sarana dan prasarana sekolah, seperti kantin sekolah, pengelola gedung, bagian administrasi, dan lain lain. Dengan demikian PKB dapat diimplementasikan di seluruh aspek kehidupan sekolah (lihat bagan 3.6).

Seluruh inovasi ini akan terjadi di seluruh proses dan isi kurikulum formal sekolah, tujuan belajar dan juga bagaimana institusi pendidikan dan juga bangunan sekolah dikelola serta bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan dengan baik.

Bagan 3.6: Lima Elemen Pendekatan Menyeluruh/Pendekatan Sistem di Sekolah untuk Pendidikan Lingkungan Hidup/Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan.

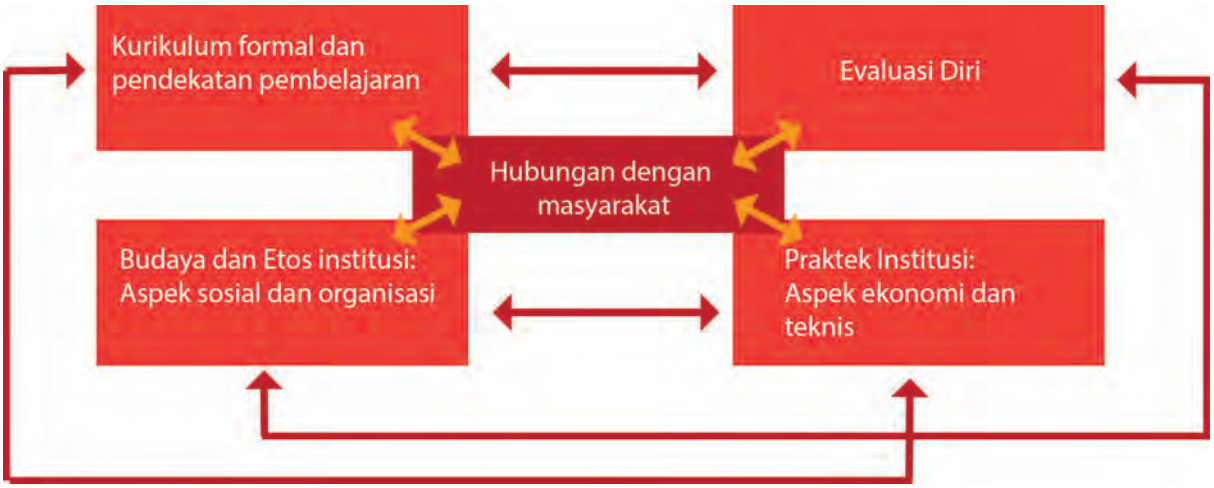

Sumber: Shallcross, T., Robinson, J., Pace, P., & Wals, A. (Eds.). (2006). *Creating sustainable environments in our schools*. Stoke on Trent: Trentham Books.

Boks 3.4: Ciri-ciri Pendekatan Menyeluruh di Sekolah

•	Pembelajaran partisipatif.
•	Prinsip-prinsip keberlanjutan terintegrasi dalam kurikulum formal
•	Kepemimpinan (yang menempatkan keberlanjutan sebagai jantung pengelolaan sekolah)
•	Partisipasi semua komunitas sekolah
•	Pengembangan profesi untuk guru, staf pendukung dan pemangku kepentingan lainnya secara teratur.
•	Penghijauan seluruh lingkungan kampus/sekolah dan lingkungan fisik di sekitarnya.
•	Mengurangi jejak ekologi sekolah
•	Pemantauan, refleksi dan evaluasi yang teratur
•	Penelitian berdasarkan praktek.
•	Bekerja-sama dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya,
•	Budaya dan kegiatan sekolah yang merefleksikan pesan utama dari kurikulum formal

Sumber: Shallcross, T., Robinson, J., Pace, P., & Wals, A. (Eds.). (2006). *Creating sustainable environments in our schools*. Stoke on Trent: Trentham Books.

Bila PKB bertujuan untuk memberdayakan komunitas sekolah dan juga masyarakat di sekitar sekolah untuk hidup secara lebih berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan yang dilakukan di planet bumi ini. Siswa hendaknya berpartisipasi dalam diskusi dan ikut memilih kegiatan yang akan dilakukan dalam aksi PKB. Partisipasi siswa akan menolong mereka memahami isu, mengidentifikasi masalah, dan mencari strategi untuk memecahkan masalah tersebut dan ikut berpartisipasi aktif guna mengatasi masalah tersebut di tingkat lokal. Level partisipasi yang dikembangkan oleh Hart (1992) berikut ini semoga bermanfaat bagi para guru untuk memfasilitasi partisipasi siswa yang sesungguhnya.

Bagan 3.7: Tangga Partisipasi

Sumber: Hart, R. (1992). Children's participation: From Tokenism to Citizenship. *Innocenti Essays No.4*. Retrieved July 2012, from UNICEF Office of Research, Evidence Policy Children's Research: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf

Kegiatan yang dilakukan siswa salah satu sekolah swasta di Surabaya merupakan salah satu contoh yang baik tentang partisipasi siswa. Setelah melakukan kunjungan lapangan di Kali Surabaya, tiga orang siswa berinisiatif melakukan program *Mangrove for Life* untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membuat biskuit dari tepung yang berasal dari tumbuhan *mangrove*, serta membuat batik dengan pewarna alami dari *mangrove*.

Contoh partisipasi siswa:

- Memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan dalam isi kurikulum dan metode pembelajaran.
- Melakukan audit, dan menjadi peneliti,
- Melakukan mediasi tentang penggunaan halaman bermain
- Melakukan evaluasi tentang sekolah mereka
- Memikirkan dengan serius dan mengimplementasikan kegiatan untuk sekolah, misalnya melakukan konservasi energi.

Gambar 3.27: Siswa sedang bereksperimen

Gambar 3.28: Siswa sedang belajar di dalam kelas

Gambar 3.29: Hasil karya siswa dalam belajar

Bagan 3.8: Petunjuk adanya Pendekatan Menyeluruh di Sekolah:

Bukti partisipasi seluruh sekolah:	
•	Tingginya tingkat kehadiran siswa,
•	Tingginya nilai tes,
•	Partisipasi kegiatan ekstra kurikuler yang tinggi,
•	Berkurangnya tingkat membolos,
•	Berkurangnya angka kenakalan dan keanggotaan geng,
•	Lebih banyak siswa yang bersikap positif terhadap sekolah,
•	Hubungan yang lebih erat antara siswa dan guru,
•	Lebih melibatkan orang-tua
•	Guru lebih inovatif.
Mengarahkan kepada	
•	Berkurangnya vandalisme,
•	Peningkatan konservasi air,
•	Penghematan energi,
•	Berkurangnya tingkat kenakalan dan perusakan yang dilakukan siswa,
•	Lebih banyak siswa yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti mengecat dinding sekolah dengan menggunakan desain mereka atau menanam pohon di halaman sekolah.

Sumber: Shallcross, T., Robinson, J., Pace, P., & Wals, A. (Eds.). (2006). *Creating sustainable environments in our schools.* Stoke on Trent: Trentham Books.

Program Adiwiyata Sebagai Salah Satu Jembatan Untuk Mempercepat Implementasi PKB

Gambar 3.30: Program Adiwiyata

Program Adiwiyata adalah program tingkat nasional yang bertujuan memberikan penghargaan kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk mengimplementasikan sikap ramah lingkungan me lalui dua prinsip dasar, yaitu partisipasi dan berke lanjutan. Melalui partisipasi, masyarakat sekolah akan terlibat aktif dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), termasuk di dalamnya adalah perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Suatu pendekatan dikatakan sebagai pendekatan yang berkelanjutan bila dilakukan secara terus menerus, dan bukan program yang bersifat sesaat, atau program yang dibatasi waktu. Prinsip keberlanjutan akan terlihat bila perilaku ramah lingkungan menjadi bagian integral dalam kurikulum dan perencanaan sekolah.

Program Adiwiyata ini diluncurkan atas kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional melalui SK No. 7/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005, yang kemudian diperbaharui di tahun 2010 melalui SK No. 03/MENLH/02/2010 dan No.15/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. Pendekatan yang diterapkan oleh program ini adalah pendekatan menyeluruh untuk menciptakan sekolah hijau atau sekolah yang ramah lingkungan melalui empat komponen yaitu:

- Kebijakan berwawasan lingkungan.
- Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan.
- Kegiatan lingkungan berbasis partisipasi.
- Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Sejak tahun 2006 sampai dengan 2011, diantara kurang lebih 251.415 sekolah dasar dan sekolah menengah di Indonesia, 1.351 sekolah telah berpartisipasi dalam Program Adiwiyata, dan 272 sekolah telah menerima Penghargaan Adiwiyata. Jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan Adiwiyata berkembang dari tahun ke tahun. Program ini didukung baik oleh Presiden Republik Indonesia, yang secara langsung memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah pada peringatan Hari Lingkungan Hidup yaitu tanggal 5 Juni. Beberapa sekolah Adiwiyata bahkan telah melangkah lebih jauh dan melakukan pendekatan menyeluruh dalam implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sekolah yang telah menerima Penghargaan Adiwiyata juga dihargai sebagai sekolah yang telah mengimplementasikan salah satu nilai dalam pendidikan karakter, yaitu peduli terhadap lingkungan. Sekolah Adiwiyata adalah salah satu model partisipasi seluruh warga sekolah dan juga kerjasama antara sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah.

Contoh Kegiatan Sekolah Adiwiyata

SMKN 2 Boyolangu-Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

Sekolah merupakan lembaga yang strategis untuk memfasilitasi siswa belajar tentang prinsip-prinsip konsumsi yang berkelanjutan. SMKN 2 Boyolangu, satu sekolah kejuruan di Boyolangu-Jawa Timur percaya bahwa bisnis yang ramah lingkungan akan mengurangi biaya operasional dan akan membangun kepercayaan masyarakat, serta mendidik masyarakat untuk turut terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan. Kepala Sekolah SMKN 2 mengatakan: ”Kami mengembangkan gaya hidup ramah lingkungan sebagai nafas hidup kami.” Sekolah telah memasukkan PLH dalam empat Program Keahlian yang mereka miliki yaitu:

(1) Program Keahlian Tata Boga, kompetensi keahlian jasaboga dan patiseri;
(2) Tata Busana, kompetensi keahlian busana butik;
(3) Tata Kecantikan, kompetensi keahlian kecantikan rambut dan kecantikan kulit; dan
(4) Pariwisata, kompetensi keahlian akomodasi perhotelan.

Kantin sekolah menjual makanan hasil karya siswa. Semua makanan tidak mengandung Mono Sodium Glutamat (MSG) atau vetsin, menggunakan pewarna alami makanan, dan tidak menggunakan pengawet makanan. Di sekolah ini siswa juga belajar bagaimana mengelola bisnis yang ramah lingkungan, seperti bisnis pencucian pakaian, bisnis restoran, budidaya anggrek, budidaya jamur dan lidah buaya. Sekolah berharap bahwa lulusannya akan siap bekerja dan siap mengembangkan bisnis yang ramah lingkungan bagi dirinya sendiri dan juga dengan rekan kerja mereka kelak. Dengan jumlah siswa 450 orang, SMKN 2 telah bekerja-sama dengan 10 sekolah lainnya untuk mengukuhkan predikat mereka sebagai Sekolah Adiwiyata.

Gambar 3.31: Pengaplikasian program Adiwiyata di sekolah

Inisiatif PKB Dalam Pendidikan Non-Formal

Apakah Pendidikan Non-Formal itu?

Berbeda dari pendidikan formal yang mengacu pada sistem pendidikan yang diatur oleh pemerintah Indonesia dan perlu ditaati secara ketat, maka pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar kurikulum resmi yang bentuk dan isinya bersifat lebih luwes. Pendidikan non-formal bersifat umum (publik) atau bersifat khusus dengan kelompok sasaran tertentu (misalnya kelompok anak usia 5-10 tahun, kelompok ibu-ibu, kelompok pengusaha, dsb). Namun demikian pendidikan non-formal tetap diberikan secara terstruktur dan berjenjang, seperti ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 20, tahun 2003, Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 no 12. Pendidikan non-formal biasanya memiliki tujuan dan dampak yang diharapkan, dan diberikan melalui pendekatan tertentu dalam penyampaian pesan pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan pendidikan non-formal merupakan bentuk pendidikan yang sangat luwes dalam materi, peserta, pendekatan dalam penyampaian pendidikan, dan jangka waktu pendidikan. Peserta pendidikan tidak harus selalu mengikuti ujian tertentu, tetapi standar kualitas dapat diterapkan sesuai kehendak pelaksana pendidikan non-formal.

Sejauh ini dapat ditemukan berbagai bentuk pelatihan, pendidikan publik (lewat media massa, diskusi publik), pengetahuan lokal dan berbagai kompetisi dan tindakan nyata telah banyak dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan nama PKB, meskipun memang berkaitan dengan PKB. Pendidikan non-formal dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk dan diberikan kepada kelompok sasaran dengan berbagai cara yang kreatif.

Berbagai Pendekatan Pendidikan Non-Formal

Berbagai pendekatan pendidikan non-formal untuk PKB bisa mencakup antara lain:

- **Pendidikan Berbasis Terutama Kegiatan di Kelas**
  Pelatihan atau kursus singkat dengan materi diberikan terutama di ruang kelas (namun bukan dalam kelas pendidikan formal). Materi PKB dengan berbagai pendekatan yang tergantung pada karakter kelompok sasaran, dilakukan dalam proses belajar interaktif merupakan kunci, yang mendorong dialog, berbagi pengalaman dan gagasan. Simulasi dan permainan *(Games)* dapat memperkaya pengetahuan peserta mengenai konsumsi berkelanjutan dengan menggunakan kasus nyata sehingga membuat PKB lebih mudah dipahami. Menambah kegiatan seperti kunjungan ke lapangan, di luar ruang kelas, dapat memberikan pemahaman yang lebih cepat tentang masalah konsumsi berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa: pendekatan semacam ini dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan formal sebagai kegiatan ekstra kurikuler untuk murid-murid, dengan pendekatan yang beragam.

Gambar 3.32: Pelatihan guru

- **Pendidikan Berbasis Pengalaman (Observasi Pasif dan Partisipasi Aktif)**
  Peserta belajar tentang konsumsi berkelanjutan melalui pengalaman nyata dimana ia berada dalam situasi untuk memutuskan membeli barang atau jasa (observasi aktif), atau dengan melalui pengamatan dari tindakan orang lain dan menganalisa situasi yang dihadapi konsumen (observasi pasif). Beberapa contoh kegiatan Pendidikan berbasis pengalaman antara lain:

  - Kasus 1: Konsumen diminta untuk mengunjungi pasar tradisional (kebanyakan menjual produk segar, dan produk yang tersedia terbatas) dan pasar modern (supermarket yang penuh dengan berbagai produk dan info diskon), membeli beberapa produk dan berbagi pengalaman tentang keputusan membeli di tiap jenis pasar tersebut. Menggunakan pendekatan "partisipasi aktif" peserta mengalami godaan di tiap jenis pasar, pergulatan antara membeli dengan pertimbangan rasional dan pembelian impulsif, dan melalui diskusi kelompok peserta akan mengetahui apakah konsumsi berkelanjutan, tantangan yang ada dan bagaimana agar keputusan membeli dibuat dengan tepat.

- Kasus 2: Konsumen diminta untuk mengumpulkan informasi dari daftar peralatan rumah tangga, dan memutuskan produk mana yang mencerminkan tanggung jawab lingkungan dan sosial yang lebih tinggi (*sustainable consumption*). Dengan pendekatan observasi pasif peserta akan mempertimbangkan tiap produk berdasarkan informasi yang ada antara lain: besarnya sumber alam yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk, efisiensi energi penggunaan produk, durasi penggunaan produk, melihat *eco label* bila ada, kualitas dan harga produk. Dalam diskusi kelompok peserta dapat membandingkan temuan mereka dan belajar melakukan analisa terhadap informasi produk dan arti dari konsumsi berkelanjutan.

Dalam pendekatan tersebut seorang fasilitator yang handal diperlukan untuk memimpin diskusi, melakukan analisa dan membuat kesimpulan dari proses belajar berdasarkan pengalaman.

Gambar 3.33: Pasar tradisional

- **Pendidikan Publik Berbasis Kampanye untuk Membangun Kesadaran**
  PKB untuk pendidikan publik dan membangun kesadaran publik dapat disampaikan dalam berbagai cara: seri diskusi publik (seminar, lokakarya, *talkshow,* pemutaran video film dan film dokumenter dengan topik tertentu); kampanye di tempat strategis melalui poster, musik, teater, pameran hasil karya seni, menggunakan media massa melalui iklan layanan sosial di TV dan radio, *talkshow* di TV dan radio, artikel di koran dan majalah, dan menggunakan jaringan sosial (*social media*) untuk menyebarkan pesan PKB dan mendiskusikannya lebih lanjut. Banyak cara kreatif yang dapat menyampaikan pesan PKB dalam pendidikan non-formal, dengan mengkombinasikan berbagai format.
  Sepanjang kelompok sasarannya jelas, isi dari PKB dibuat yang relevan bagi kebutuhan kelompok sasaran, dan dipilih media yang paling efektif untuk kelompok sasaran.
- **Pendidikan Berbasis Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan**
  Pendidikan melalui pendekatan ini menekankan konteks dimana pendidikan dilakukan: pada kelompok suku bangsa tertentu dan lokasi tertentu dimana anggota kelompok suku bangsa mempunyai nilai dan norma tertentu. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam membangun materi PKB. Selain itu kekayaan alam atau lingkungan juga menentukan bentuk pendidikan yang dilakukan. Pada kelompok suku bangsa tertentu berlaku norma untuk menghormati alam, mengadakan upacara khusus pada waktu panen dan pembagian hasil sumber alam. Sedangkan pada kelompok lain terdapat aturan kapan boleh menangkap ikan di lokasi tertentu agar ada waktu untuk reproduksi sehingga pasokan ikan akan selalu terjamin. Untuk memahami semua ketentuan tersebut bisa dilakukan pendidikan non-formal yang dilakukan berdasar kearifan pengetahuan lokal. Dapat pula kearifan lokal yang pudar dihidupkan kembali dalam pesan PKB kepada generasi muda sehingga menjamin konsumsi berkelanjutan.
- **Pendidikan Berbasis Keterlibatan dalam Tindakan Nyata (Action)**
  Pendidikan dalam hal ini dilakukan melalui tindakan atau aksi nyata. Para peserta dapat didorong untuk berinisiatif melakukan tindakan nyata, atau peserta didukung tindakan/aksi nyatanya sehingga memberikan dampak yang lebih luas. Para peserta belajar dari tindakan/aksi nyata itu sendiri, namun umumnya juga mendapat penguatan dengan pendidikan berbasis kelas sehingga mendapat pengetahuan, dan keahlian yang lebih lengkap.

Gambar 3.34: Kreasi yang terbuat dari bahan daur ulang

Berbagai Inisiatif Pendidikan Non-Formal Yang Mencerminkan PKB

A. Pendidikan Berbasis Kegiatan di Kelas

1. PKB untuk para profesional dengan melalui PPB

Sejak tahun 1992 LEAD Indonesia telah melakukan pelatihan PPB kepada profesional madya dari semua sektor (pemerintah, sektor swasta, lembaga nirlaba, lembaga akademis dan media massa) melalui LEAD *Associate Training* (LAT). Misi dari pelatihan tersebut adalah untuk menginspirasi kepemimpinan berwawasan lingkungan dan pembangunan, memberikan pemahaman akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Usia peserta dari 24-45 tahun, dan sedang menjabat posisi atau akan menjabat posisi sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh (otoritas). LEAD Indonesia merupakan sebuah lembaga dari jaringan kerja 12 kantor LEAD di dunia dengan kantor pusat di London, Inggris.

Tema Relevan Tiap Tahun

Tiap tahun tim pakar akan menentukan tema pada tahun itu, merancang kurikulum dan menentukan nara sumber yang tepat pada tiap sesi untuk 15-20 hari. Kurikulum yang dibangun termasuk latar belakang konsep, keahlian kepemimpinan, seminar publik, memahami masalah melalui studi kasus dan kunjungan ke lapangan, yang dikembangkan dalam proyek individu dan proyek bersama (grup) dimana kerangka pembangunan berkelanjutan diterapkan. Tema LAT umumnya terkait dengan PKB seperti tema Energi dan Perubahan Iklim, Pengelolaan Air, Ketahanan Pangan, Kota Berkelanjutan, dan Ekonomi Hijau. Mereka yang terlibat dalam pelatihan diberikan pengetahuan yang luas secara mendalam mencakup kaitan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan dampaknya keputusan yang etis, dan kepemimpinan, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang diikuti oleh pengalaman dalam penerapan. Mereka yang telah menyelesaikan pelatihan menjadi *LEAD Fellow* dan bergabung dalam jaringan global. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana kurikulum dibangun dan pelatihan dilaksanakan dapat menghubungi *www.lead.or.id* dan *www.lead.org.* Modul dapat diadaptasi ke dalam pelatihan singkat, misalnya untuk fokus ke PKB, dan untuk kelompok sasaran tertentu.

2. PKB untuk komunitas bisnis: Bertanggung-jawab secara sosial dan lingkungan.

Program Membangun Usaha Berkelanjutan atau *Developing Sustainable Business* adalah pelatihan dan bimbingan bagi komunitas perusahaan untuk membangun strategi keberlanjutan agar menjadi perusahaan yang tidak hanya mendapatkan laba, tetapi juga secara sosial dan lingkungan bertanggung jawab. Dalam hal ini perusahaan dilihat sebagai konsumen sumber daya alam yang melibatkan manusia dalam proses produksinya. Menggunakan "perangkat keberlanjutan" sebuah perusahaan dapat memformulasikan strategi bisnisnya ke dalam format perusahaan berkelanjutan, lengkap dengan indikator dan indeks kinerja agar terukur kinerjanya dalam jadwal waktu tertentu. Proses untuk memformulasikan perjalanan keberlanjutan dari perusahaan adalah proses partisipasi yang melibatkan seluruh manajemen dari tingkat tinggi, menengah dan rendah. Proses partisipasi ini membangun komitmen secara kuat dari manajemen puncak dan karyawan. Proses ini menghasilkan arah strategi yang menjadi kompas keberlanjutan dari perusahaan. Dalam proses pelatihan dan bimbingan ini, perusahaan memasukkan aspek keadilan sosial dan memperhatikan aspek lingkungan. Tanggung-jawab sosial dan lingkungan mengikuti prinsip *from cradle to cradle* dan seluruh akunting *whole life cycle*, yaitu dari awal proses produksi sampai akhir. Melingkupi seluruh siklus produksi sampai produk akhir yang tidak terpakai lagi (*life cycle accounting).* Perusahaan juga merupakan konsumen dari bahan mentah dan sumber alam dimana input yang masuk harus memenuhi standar tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Produk dan jasa yang dihasilkan harus mencerminkan nilai yang sama. Tanggung-jawab ini juga berlaku dalam proses produksi dan proses setelah produksi (mata rantai perdagangan) yang memperhatikan pemakaian sumber alam secara efisien, pengelolaan sampah yang memenuhi standar keamanan, memperhatikan hak buruh, *fair trade* (harga yang adil), kesehatan dan keamanan produk, serta dampak yang minimal pada lingkungan. Ketika sampai pada sampah produksi maka perusahaan juga bertanggung-jawab pada pengelolaan sampah. Disini, perusahaan dilihat sebagai konsumen bahan mentah, karena itu perusahaan haruslah menjalankan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat pada program *Developing Sustainable Business* di *www.ypb.or.id.*

B. Pendidikan Berbasis Pengalaman

PKB: Mengenal Makanan Lokal – Pendidikan Non-Formal untuk Anak

Detara Foundation memperkenalkan pendidikan non-formal kepada anak-anak usia 7 sampai 14 tahun pada suatu komunitas di Bogor tentang sumber pangan dan pola konsumsi. Peserta diajarkan untuk mengidentifikasi sumber pangan dari makanan sehari-hari dan menemukannya di lingkungan tempat tinggal mereka, di kebun belakang, di sawah, dan di sungai. Salah satu kegiatannya adalah mengidentifikasi makanan sarapan, makan siang, dan makan malam melalui kegiatan pengamatan langsung. Dari penemuan observasi anak-anak mengetahui sumber pangan apa saja yang tersedia di sekeliling mereka (seperti pisang, singkong, daun singkong, pepaya, kangkung, jagung, dan jambu). Melalui kunjungan ke pasar tradisional dan pasar modern (supermarket) mereka dapat membedakan kedua jenis pasar tersebut, buah-buah impor tidak ditemukan di pasar tradisional. Di pasar modern mereka juga tidak menemukan sayur dan buah gratis seperti pepaya dan daun singkong yang tumbuh dengan mudah dan bisa diperoleh secara gratis dari kebun di belakang rumah.

Temuan-temuan dari kegiatan semacam ini mengundang pertanyaan dan mendorong adanya diskusi. Fasilitator dari Detara Foundation kemudian membantu menganalisa temuan mereka, menghargai temuan mereka, menginspirasi peserta dengan pendekatan yang tepat dan aksi nyata bagaimana melindungi sumber makanan lokal, mengajarkan kepada mereka agar menghargai betapa kayanya tanaman dan buah-buahan, serta mengajarkan pemahaman sederhana tentang ekspor dan impor barang serta implikasinya pada penduduk setempat. Dengan pengalaman langsung ke lokasi dimana barang-barang dijual maka peserta mendapat pelajaran yang lebih mudah ditangkap dan dianalisa. (Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menunjungi *www.detarafoundation.org* atau kirimkan email ke fdetara@gmail.com).

Gambar 3.35: Anak-anak belajar menanam makanan lokal

C. Pendidikan Berbasis Kampanye untuk Membangun Kesadaran Publik

1. Hak Konsumen: Promosi Konsumsi Berkelanjutan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI didirikan pada tahun 1973, dengan visi sadarnya konsumen tentang hak-haknya serta masyarakat yang adil. Melalui webiste, majalah (Warta Konsumen), dan diskusi publik, YLKI secara aktif mendidik konsumen dan sekaligus melakukan advokasi kebijakan pada pengambil keputusan, dimana hak-hak konsumen adalah mendapat barang dan jasa yang yang berkualitas yang dihasilkan secara bertanggung-jawab (hak konsumen). Diantara pesan edukasi yang dilakukan YLKI, kampanye konsumsi berkelanjutan mencakup makanan yang sehat dan aman, menjadi konsumen cerdas yang tidak secara impulsif menjadi pembeli konsumtif, di dalam era dimana iklan dan pemasaran sangat agresif mempromosikan kesehatan konsumen dengan kampanye anti-rokok, pentingnya keamanan transportasi, standar kualitas produk impor, melindungi produk domestik, promosi hasil pertanian organik. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi website *www.ylki.or.id.*

2. DAAI Channel TV – Program Sosial dan Lingkungan untuk Pendidikan Publik

TV sebagai salah satu media massa untuk pendidikan publik dapat sangat efektif mengungkapkan isu, masalah, dan solusi dalam waktu singkat, dirancang sedemikian rupa sehingga menarik seperti *talkshow*, film dokumenter, dan temuan-temuan dari kunjungan lapangan yang mengungkap fakta. DAAI TV sangat populer dengan program yang fokus pada pendidikan dikaitkan dengan tema sosial dan lingkungan. Program TV ini menggugah dengan pemahaman yang dalam dari sebuah masalah, mendorong untuk belajar dari berbagai perspektif, memperlihatkan masalah dari berbagai perspektif,

dan mempererat solidaritas dari berbagai kelas sosial, ekonomi, agama dan latar belakang budaya. Di bawah ini adalah program televisi yang dapat ditayangkan sebagai isu PKB:

- **Mata Hati – untuk semua umur.**
  Program 5 kali seminggu ini mengungkapkan masalah dengan berbagai perspektif berbeda, kegiatan yang diperuntukkan bagi kemanusiaan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
- **Bumiku Satu– untuk murid SMP dan SMA.**
  Seminggu sekali ditayangkan, *talk show* mengenai edukasi lingkungan dan konservasi, *problem* yang terkait lingkungan di sekitar sekolah dan eksperimen ilmiah.
- **Sahabat Alam – untuk keluarga.**
  Program harian selama 1 jam yang mengekspos keindahan alam, beragam program konservasi dan pentingnya melindungi lingkungan.

3. Green Radio 89.2 FM Jakarta

Satu-satunya radio yang mempunyai misi gaya hidup ramah lingkungan, *Eco Lifestyle.* Pesan utama dari radio ini adalah tentang lingkungan, termasuk peran lingkungan bagi manusia dan berbagai masalahnya, tantangan dan sikap baru yang diperlukan untuk penyelamatan lingkungan. Program ini meliputi diskusi mengenai kebijakan lingkungan, saran untuk hidup ramah lingkungan *(eco lifestyle)*, dan bagaimana melakukan aksi lingkungan tiap hari dalam hidup kita sehari-hari. Radio ini populer diantara pendengarnya yang berusia 30-40 tahun, yang merupakan pendengar aktif, baik wanita maupun pria. Setengah dari pendengar Green Radio memiliki pendidikan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut dan belajar bagaimana pendidikan publik lewat radio bisa menarik, silahkan hubungi *www.greenradio.fm.*

4. Majalah dan Koran Anak Muda – Strategi Promosi *Eco Fashion.*

Salah satu majalah anak muda (target usia 10 sampai 20 tahunan) yang populer di Jakarta adalah HAI. Majalah anak muda biasanya berisi info musik, film, fashion, sport dan gaya hidup yang paling "modern" di kalangan remaja. Majalah HAI edisi April 2-6, 2012, temanya adalah *Green Entrepreneurship.* Dilaporkan dalam majalah ini perkembangan bisnis hijau di kalangan mahasiswa Sarjana 1, di sekolah bisnis terkemuka, Prasetya Mulya. Para mahasiswa menyajikan inisiatif mereka dengan menggunakan materi *input* dalam proses produksi yang ramah lingkungan, misalnya membuat jam tangan mainan dengan memakai *polyethylene fiber* (dari pipa yang didaur ulang); sabun dari bahan-bahan organik (kelapa, teh hijau, pepaya); *chopstick* atau sumpit makan yang disebut *greenstick* karena dibuat dari gandum, lada, gelatin dan garam; mesin kompos untuk dapur bersih; sepatu jerami (*jute fiber*) yang gaya; sepeda terbuat dari bambu (catatan: Indonesia kaya spesies bambu), dan *notebook* (buku catatan) dari kotoran gajah. Semua produk barang tersebut dirakit agar menggunakan bahan lokal dan mengurangi sampah. Semua proyek *green business* ini dinilai oleh sekolah dengan menggunakan barometer *Green-O-Meter,* yaitu *input* harus ramah lingkungan, proses produksi harus minimal dampak negatifnya ke lingkungan, dan produk akhir tidak boleh mencemari lingkungan. Pendidikan untuk mempromosikan produk ramah lingkungan dan *green business* (bisnis hijau) oleh kaum muda di majalah ini dalam membuat *eco fashion* menjadi trend anak muda (*fashionable*), sebuah gaya *fashion* baru. Untuk informasi lebih lanjut lihat *www.artyvek.blogspot.com* dan @artyvek untuk jam mainan atau Toy Watch Artyvek, @purezzasoap untuk sabun organik, @arugodesign untuk pakaian serat yute, @bambi_original untuk sepeda bambu. Bisa juga mengirim email ke purezzasoap@yahoo.com untuk sabun organik, ke artyvek@yahoo.com untuk jam tangan mainan *(toy watch)*, dan hubungi Karaminat di +628965231345 untuk informasi *chopstick* organik.

Gambar 3.36: Contoh majalah tentang lingkungan

5. Mudaers – Relawan Muda dari Koran Kompas Muda

Mudaers adalah kelompok anak muda di seluruh Indonesia, didukung oleh Kompas Muda, satu divisi dari koran terkemuka di Indonesia. Kelompok ini potensial menjadi kelompok sasaran PKB dan juga menjadi kelompok penggagas *(initiators club)* untuk gaya hidup konsumsi berkelanjutan. Berbagai isu dapat didiskusikan melalui kelompok anak muda. Mudaers juga dapat mengambil inisiatif tindak nyata terkait isu lingkungan, perdamaian, dan gaya hidup sehat. Untuk informasi silahkan kunjungi *www.mudaers.com*

D. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal – dalam konteks sosial, budaya dan lingkungan

1. Masyarakat Bali Aga, Kebijakan Lokal untuk Kehidupan Berkelanjutan (Masyarakat Bali Aga, Kompas, 2012, July 7, page 24))

Masyarakat Bali Aga yang tinggal di Desa Tenganan, kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, telah hidup bertahun-tahun dalam tradisi tersendiri. Tradisi budaya ini diwujudkan dalam aturan desa, "awig-awig" yang melindungi, hutan, tanah dan masyarakat Bali Aga dari kehidupan ekonomi kapital, dan budaya modern. Masyarakat Bali Aga mengelola kehidupannya dalam bentuk ketahanan pangan, melindungi hutan dan tanah mereka, dan tradisi untuk berbagi pada sesama. Tanah di desa ini tidak diperkenankan untuk dijual pada orang luar, dan seluruhnya harus dimiliki hanya oleh masyarakat Bali Aga. Sumber utama pangan untuk kehidupan masyarakat ini adalah beras, dan mereka percaya bahwa menjual tanah mereka akan membahayakan kehidupan komunitas Bali Aga.

Anggota masyarakat Bali Aga berbagi jenis bumbu tertentu yang tumbuh di kebun adat (kebun bersama millik masyarakat) seperti durian, teep, tingkih dan kunyit. Seluruh pemilik tanaman akan mentaati peraturan ini. "Awig-awig" (aturan desa) juga memelihara hutan, dimana masyarakat tidak diperkenankan menebang pohon. Penduduk hanya boleh memanfaatkan ranting cabang pohon. Karenanya, desa tetap mendapat pasokan air yang cukup sepanjang tahun, dan tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Masyarakat Bali Aga sangat menghormati hutan mereka yang dianggap aset yang berharga. Dalam upacara Hindu Bali, masyarakat memohon rahmat dari para Dewa dan semua anggota komunitas ini akan bekerjasama dalam persiapan upacara agama ini, seperti mempersiapkan sesajen yang indah terdiri dari berbagai bunga dan buah-buahan, dan merancangnya menjadi indah artistik dalam upacara khusus ini, dalam semangat kerja *"ngayah"* atau sukarela. Kemudian, para pekerja relawan ini akan menyiapkan *"nampan"* (semacam piring) untuk semua orang, berisi berbagai macam penganan. Melalui tradisi ini mereka berbagi dalam porsi yang sama. Tradisi berbagi makanan untuk semua penduduk di desa. Dengan pengetahuan lokal, warga desa ini menjaga diri sendiri. Mereka adalah pemilik tanah dan hutan serta memelihara alam serta berterima kasih pada Dewa, sambil menjaga hubungan sosial dengan harmonis.

PKB dilakukan dengan proses pendidikan non-formal dari generasi ke generasi melalui tindakan yang dilakukan dalam hidup keseharian. Penduduk belajar tentang nilai dan norma hidup bersama dari tradisi sosial dan budaya yang hidup dalam komunitas ini, pengetahuan lokal, yang melindungi lingkungan dan memastikan kesejahteraan anggota komunitas.

2. Lumbung Padi Pulau Solor, East Nusa Tenggara : Food Security for the Community (Kompas, Juli 14, 2012, Halaman 24, Rumah Adat, Leluhur dan Lumbung Pangan)

Tujuh suku bangsa di Pulau Solor, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi untuk memisahkan sebagian benih padi terbaik dan sebagian dari panen disimpan di lumbung padi, mengikuti tradisi adat berauk. Adat berauk ini adalah cara untuk mencegah timbulnya kelaparan dan merupakan mekanisme ketahanan pangan, terutama di musim kering. Tiap keluarga dari tiap suku bangsa memisahkan sebagian dari hasil panen (seperti padi kering, sorgum, umbi-umbian) dan meletakkannya di lumbung padi, dalam jumlah yang ditentukan oleh Ketua Adat tiap suku bangsa. Dengan tradisi setempat, masyarakat tidak mempunyai masalah untuk mendapat beras dari benih terbaik, dan tidak mengalami kekurangan pangan di musim kering. Benih padi terbaik yang disimpan akan digunakan ketika ada serangan hama, dan anggota masyarakat dari tujuh suku bangsa selalu mempunyai cukup beras sebagai makanan utama di tiap musim. Doa-doa pada para Dewa dan nenek moyang yang selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka pada tiap kegiatan, termasuk doa-doa yang dilantunkan ketika panen berhasil dan ketika menyimpan sebagian hasil panen di lumbung padi. PKB dilakukan dengan mengajarkan pengetahuan lokal pada generasi berikutnya melalui kegiatan sehari-hari dari usia muda.

Gambar 3.37: Tradisi budaya menyambut hasil panen (Bali)

Dalam rentangan waktu tradisi sosial dan budaya tetap hidup ketika PKB menjadi bagian penting dari tatanan nilai dan norma di dalam komunitas. Hal ini juga menunjukkan kaitan antara keberlanjutan produksi untuk keberlanjutan konsumsi.

E.Pendidikan Berbasis Keterlibatan dan Tindakan Nyata

1. Climate Smart Leaders Program – Aksi Nyata Pemuda

The Climate Smart Leaders (CSL) Program bertujuan untuk mendorong generasi muda (usia 15-24 tahun) untuk melakukan tindakan nyata dalam situasi perubahan iklim dengan membuat proposal proyek aksi nyata, sebagai upaya mereka untuk terlibat aktif membangun masa depan mereka. Diluncurkan oleh Yayasan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2010, program ini telah menarik lebih dari 150 proposal tiap tahunnya. Ternyata para pemuda kreatif dan bersedia untuk aktif mengatasi dampak perubahan iklim. Setelah terseleksi 24 finalis mereka mengikuti CSL Camp selama 5 hari. Selama Camp mereka belajar lebih banyak mengenai pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kepemimpinan, manajemen proyek, dan bisnis dengan misi sosial dan lingkungan. Juga ada sesi tentang daya dukung lingkungan terkait konsumsi berkelanjutan. Mereka juga melakukan kunjungan lapangan, melihat proyek aksi yang nyata untuk mendapat inspirasi dan membuat mereka lebih berkomitmen pada proyek aksi mereka. Pemenangnya akan menerima sejumlah dana untuk mendukung proyek mereka selain juga menerima Penghargaan Emil Salim bagi Generasi Muda yang merupakan penghargaan bergengsi dari tokoh yang diakui di Indonesia maupun di tingkat internasional sebagai pemimpin di bidang lingkungan dan mantan Menteri Lingkungan Hidup yang pertama. Program semacam ini mendorong kreativitas dan inovasi dari generasi muda, membangun tradisi penelitian, dan mendorong keterlibatan dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi negara dan kelestarian lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi *website Climate Smart Leaders Program www.climatesmartleaders.net*

PKB dalam hal ini berperan memberi inspirasi kepada kelompok generasi muda untuk menerjemahkan PKB dalam tindakan nyata, memasukkan materi PKB ke dalam pelatihan Camp, dan juga menyebar-luaskan gagasan yang sudah terbukti berhasil dilaksanakan, untuk bisa direplikasi lebih luas lagi.

Pemanfaatan limbah udang untuk bahan obat penurun kolestrol dengan harga relatif murah, penggunaan bakau sebagai pewarna alami, pemanfaatan sampah kelapa sawit sebagai sumber energi, ampas teh untuk pakan ternak dsbnya, adalah beberapa gagasan yang dapat dikembangkan dan direplikasi.

Gambar 3.38: Pemenang CSL 2012

2. Clean Batik Indonesia – Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Clean Batik Indonesia adalah usaha batik rumah-tangga yang memperhatikan tanggung-jawab lingkungan dan sosial. Batik yang merupakan kain dengan desain batik, diproses dengan cara manual (ditulis atau dicap yang prosesnya menggunakan tangan), menggunakan pewarna alami, memakai sumber energi yang ramah lingkungan dan aman bagi pekerja, limbah cair dan bahan kimia dikelola dengan tepat, serta pembatik diberi ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, dan gaji yang wajar. Proyek binaan dari *European Union* ini, masih memerlukan promosi yang lebih luas, agar konsumen bisa memilih batik tulis dan cap, yang secara budaya memelihara warisan tradisi melukis kain (membatik), menggunakan bahan yang aman lingkungan (pewarna alami), dengan pembatik yang diperlakukan sesuai hak buruh (mendapat upah wajar, ruang kerja dan alat kerja yang sehat).

Dengan promosi yang luas maka konsumen dididik untuk memilih *Clean* Batik, PKB dalam hal ini mempopulerkan batik tulis dan dengan pewarna alami, agar konsumen memilih batik jenis ini, yang produksinya bertanggung-jawab secara lingkungan dan secara sosial, dibanding batik pabrik yang tidak memperhatikan dampak lingkungan maupun nasib buruh. Semakin banyak konsumen memilih batik ini, maka insentif bagi industri rumah tangga dari batik tulis dan cap dengan pewarna alami ini makin bergairah.

Info lebih lanjut tentang pelatihan Clean Batik bagi para pembatik dapat dilihat di *www.cleanbatik.com.* Informasi ini penting karena belum ada *eco label* untuk Clean Batik. PKB dapat mendidik pengetahuan tentang clean batik kepada komunitas pembatik dalam industri rumah di seluruh Indonesia, dan mempromosikan produk clean batik kepada konsumen.

Gambar 3.39: Batik tulis dengan pewarna alami

3. Mebel Bersertifikasi *"Sustainable Furniture"* – menggunakan kayu dari hutan dengan manajemen berkelanjutan

Java Furni Lestari adalah perusahaan mebel di Jawa Tengah yang mengadaptasikan kerangka kerja berkelanjutan *(sustainability)* sebagai model bisnis sehingga konsumen dari pasar ekspor dapat membeli furnitur yang dibuat secara bertanggung-jawab (*sustainable furniture*). Kayu yang digunakan untuk membuat mebel dijamin berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan *(sustainable forest management).* Lebih dari itu, pembeli dapat melacak asal kayu dari mebel yang dibelinya. Seluruh mebel yang diproduksi telah disertifikasi oleh lembaga internasional seperti *TUV Rheinland* dan *Forest Stewardshi Council.* Harga dari mebel yang disertifikasi dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan lebih mahal dari mebel sejenis yang tidak mendapat sertifikat serupa. Produk semacam ini dijamin telah melalui proses yang layak yang melestarikan lingkungan (kayu bukan berasal dari perambahan hutan tapi dari hutan bersertifikasi). Untuk informasi lebih lanjut hubungi *www.javacertifiedwood.com* dan *www.javafurniture.com.* Materi PKB perlu mempromosikan produk semacam ini kepada konsumen domestik sehingga konsumen lokal mempunyai pilihan ketika mencari produk yang tepat, yang diproduksi dengan cara yang bertanggung-jawab.

Dengan makin dikenalnya produk mebel berkelanjutan yang bersertifikasi maka dengan konsumen yang beralih ke produk semacam ini akan perlahan-lahan menurunkan produksi mebel dari kayu yang tidak jelas asal-usulnya. Di pasar domestik mebel ini belum populer meski sudah memiliki sertifikasi ramah lingkungan. PKB mendidik publik tentang produk berkelanjutan dan PKB dapat mempromosikan praktek keberlanjutan ini kepada usaha batik lainnya. Selain itu PKB dapat mendidik konsumen agar memilih produk yang dihasilkan dengan cara yang bertanggung jawab.

Gambar 3.40: *Eco-label* pada produk Java Furniture

Boks 3.5: Pertanian dan Perikanan untuk Pemenuhan Kebutuhan Sendiri:
Sebuah Skema Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan

Dalam kegiatan pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan sendiri *(self-subsistence)*, maka produksi yang berkelanjutan sangat erat terkait dengan konsumsi berkelanjutan. Bila dalam produksi tidak berkelanjutan maka dampak langsung terjadi pada konsumsi yang tidak berkelanjutan. Sebagai contoh: petani kecil yang menggantungkan hidup keluarganya pada hasil padi dari sawah yang terbatas tidak akan mendapatkan beras sebagai konsumsi keluarga bila proses produksi padi terganggu. Tidak cukupnya air, salah memakai pestisida (sehingga terserang hama, dan hilang nya musuh alami hama), kurangnya pupuk organik, akan berakibat pada berkurangnya jumlah produksi yang bila berlanjut maka seluruh keluarga tidak mendapat cukup beras untuk dikonsumsi demi hidup sehat. Hal ini menunjukkan ketergantungan konsumsi berkelanjutan pada produksi berkelanjutan.Situasi yang sama bisa terjadi pada keluarga nelayan, dan pedagang kecil yang bila tangkapan ikan atau produksi rumah tangganya dan perdagangan terganggu maka secara langsung konsumsi keluarga terganggu. Dapat dikatakan, kelompok ini rentan terhadap goncangan perubahan. Pada masyarakat tertentu mereka menyimpan hasil panen di lumbung padi untuk menghadapi musim kering atau bila beruntung dan ada kelebihan mereka menabung sedikit untuk keadaan darurat, atau bila dalam komunitas terdapat mekanisme solidaritas sosial dimana yang berlebihan berbagi dengan yang kekurangan dan saling bergantian membantu dan sistem arisan (tabungan bersama) yang dibagi bergilir.

Rekomendasi Dalam Merancang PKB

Gambar 3.41: Anak-anak Masa Depan: Konsumsi Berkelanjutan untuk Kehidupan Generasi Mendatang

Untuk merancang materi adalah sangat penting untuk melihat konteks dimana kelompok sasaran itu tinggal sehingga PKB menjadi relevan, dapat mudah dipahami, dan berpotensi untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun materi PKB:

1. Formulasi masalah dan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Identifikasi apa yang merupakan tantangan utama dan masalah yang ada terkait topik PKB. Masalah dapat terkait kesehatan, kebiasaan hidup bersih, cara penangkapan ikan/praktek pertanian, efisiensi energi, perilaku konsumerisme, dan sebagainya, yang mempengaruhi produksi dan konsumsi. Pilihlah persoalan mana yang menjadi prioritas dan perlu dijadikan materi PKB yang dapat memberi manfaat terbesar bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Keterlibatan pakar dalam merancang kurikulum PKB.

Libatkan pakar yang relevan dengan masalah yang diprioritaskan (no. 1) untuk merancang kurikulum dan modul PKB, dalam subtansi dan pendekatan (metode penyampaian), dan identifikasi sumber masalah dan potensi solusi di lokasi tertentu. Pakar ini bisa jadi sudah pernah melakukan hal yang sama sehingga akan sangat membantu. Program pendidikan yang hampir sama dengan PKB yang sudah ada di daerah tertentu bisa menjadi rujukan.

3. Adaptasi konteks lokal ke dalam materi PKB.

Profil individu yang menjadi peserta PKB, tradisi sosial budaya, kondisi geografis, kelas sosial ekonomi, ketersediaan keaneka-ragaman hayati dan sebagainya, merupakan beberapa penentu substansi dan pendekatan yang tepat.

4. Kisah sukses sebagai rujukan.

Gunakan studi kasus dari kisah sukses dari masyarakat untuk mengatasi masalah yang sama sebagai rujukan: strategi yang digunakan, pendekatan yang digunakan, dan sebagainya. Masukkan kunjungan lapangan dan kumpulan dari kejadian yang memperlihatkan dampak negatif dari konsumsi tidak berkelanjutan sebagai ilustrasi dari masalah yang sama.

5. PKB yang sensitif terhadap konteks lokal bagi pendidikan formal dan non-formal.

Setelah topik PKB ditetapkan, maka topik tersebut dapat dikemas dalam pendidikan formal atau non-formal, tergantung pada kelompok sasaran dan profil individu (seperti umur, gender, tingkat pendidikan) dan konteks eksternal (seperti kebudayaan setempat, sumber alam lokal, wilayah geografis, dsb).

6. Pendekatan partisipatori untuk komitmen yang lebih kuat.

Bila memungkinkan, akan sangat baik bila dalam merancang materi PKB melibatkan kelompok sasaran untuk mengungkapkan aspirasi dan gagasan mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Formulasikan usulan aksi nyata sebagai keputusan bersama (antara perancang materi PKB dan peserta pendidikan), sehingga memungkinkan komitmen yang lebih kuat untuk membuat perubahan dalam perilaku konsumen untuk bisa membuat keputusan ketika membeli produk dan jasa.

Boks 3.6: Sumber Ekonomi Berkelanjutan – Beberapa Saran dalam Merancang PKB untuk Ketahanan Pangan

•	Identifikasi sumber pangan utama di suatu komunitas yang menggerakkan perekonomian atau sebagai sumber kehidupan seperti beras (seperti masyarakat di Jawa), jagung (antara lain Madura), sagu (terutama di Maluku dan Papua), ikan sungai (Kalimantan dan Sumatera, penduduk sekitar sungai), pangan laut (masyarakat pesisir) atau pertanian sayur-mayur (dataran tinggi seperti Lembang), kopi lokal untuk perdagangan (seperti Medan, Toraja, Sumatera Selatan), memberi pasokan rempah-rempah (seperti kayu manis, vanila, jahe, cabe, bawang merah, sereh, dsb) .
•	Identifikasi sistem pendukung untuk ketersediaan pangan utama, seperti pasokan air, pengelolaan irigasi, tersedianya benih, pestisida, herbisida, pupuk, mesin pendingin untuk menyimpan tangkapan hasil laut, gudang, penggiling kopi, dsb.
•	Identifikasi masalah yang dapat membahayakan ketersediaan pangan bagi masyarakat lokal, seperti polusi hebat, kelebihan penggunaan dosis untuk pestisida, herbisida, pupuk; rendahnya kualitas air karena jumlah sampah di dalam sungai, pengelolaan air yang tidak efisien, perselisihan lahan, dataran rendah dengan kapasitas terbatas dan rendahnya kapasitas menumbuhkan tanaman (kualitas tanah), sedikitnya benih tahan hama, cuaca yang tidak dapat diprediksi dan banjir, peran tengkulak yang menjerat, dsb.
•	Identifikasi upaya yang telah ada dan solusi untuk mengatasi masalah. Kumpulkan data sebanyak mungkin untuk merancang materi PKB dari berbagai pihak: penyuluh pertanian, pakar di bidangnya (dalam pertanian organik, pengelolaan air, akademisi dsb) dan LSM yang berpengalaman dalam praktek sehari-hari.
•	Untuk masalah yang sama, cek apakah ada cara sukses yang telah dipraktekkan di daerah lain. Pelajari sukses tersebut kemudian adaptasikan materi PKB dalam konteks lokal.

Gambar 3.42: Melestarikan makanan tradisional

BAB IV:
MEMANFAATKAN PELUANG SECARA OPTIMAL: MENINGKATKAN PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

- Kebijakan Pemerintah: Peluang Jalan Masuk Pelaksanaan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan
- Meningkatkan PKB dalam Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal
- Peran Penting Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Kebijakan Pemerintah: Peluang Jalan Masuk Pelaksanaan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Melalui penelitian kebijakan berbasis data sekunder tentang kebijakan pendidikan Pemerintah Indonesia terkait PKB, terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi tidak terbatas pada kedua lembaga ini (dapat pula ada di kementerian lain), ditemukan bahwa banyak peluang yang besar untuk mengadaptasikan dan mengintegrasikan PKB dalam kebijakan yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah, melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Ringkasan dari peluang yang potensial untuk memasukkan PKB terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1: Potensi peningkatan PKB dalam kerangka kebijakan pemerintah

	Kurikulum Nasional	Pelatihan Guru	Pendidikan Lingkungan Hidup	Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan / PKB	Pendidikan Non-Formal (diantaranya)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (KPB)
Kebijakan, Strategi, dan Rencana yang ada (secara potensial relevan bagi PKB)	Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan desentralisasi otoritas bagi sistim pendidikan dan pengembangan kurikulum bermuatan lokal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22/2006 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2010-2014. Peraturan ini mengelaborasi kerangka dasar kurikulum dan kompetensi untuk pendidikan dasar dan menengah yang dikelompokkan dalam beberapa materi antara lain : materi agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, estetika, pendidikan kesehatan jasmani	UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan UU ini, Kementerian Pendidikan Nasional melalui-Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PMPTK menformulasikan dan menyusun standar kompetensi bagi guru di Indonesia, dimana standar kompetensi tersebut meliputi: 1) Kompetensi Kepribadian 2) Kompetensi Pedagogi 3) Kompetensi Profesional Dan 4) Kompetensi Sosial	Sejak tahun 1980an PLH sudah menjadi pertimbangan dasar dalam pendidikan keaksaraan di Indonesia. Dimana salah satu bagian dalam pendidikan keaksaraan yaitu pendidikan keaksaraan fungsional memiliki tujuan mengangkat topik lokal seperti permasalahan lingkungan hidup sekitar sebagai bagian dari subyek pembelajaran. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0142/U/1996 tentang kerjasama dua kementerian untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan lingkungan. Kebijakan ini diperbaharui dalam keputusan bersama tahun 2005 dan 2010 dengan menambahkan pendidikan untuk pembangunan	Laporan Kementerian Lingkungan Hidup " Laporan Strategi PPB" tahun 2006 memasukkan rekomendasi yang berisi rencana untuk data base, prototipe pengembangan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, membangun kemitraan, mengumpulkan inovasi keberhasilan pelaksanaan PPB dan pusat pembelajaran PPB. Rencana Strategi Pendidikan Nasional 2010-2014 dan PuP3B berisi rencana strategi untuk PPB dan PKB. Sosialisasi pertemuan PPB di bulan Agustus 2008 yang menyatakan bahwa PPB menjadi ruh dalam pendidikan di Indonesia.	UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pengembangan program pendidikan non formal memasukan isu PPB khususnya yang dikenal dengan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pelatihan orang dewasa, pemberdayaan perempuan, dan perawatan anak usia dini.	Rencana Strategis Kementerian Industi Periode 2010-14 yang mendorong agar menerapkan sistem industri yang lebih berkelanjutan, manajemen lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab sosial. KLH saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, yang memasukkan topik PKB.

		berkelanjutan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat mengembangkan PLH dengan konteks lokal			
Kurikulum Nasional	Pelatihan Guru	Pendidikan Lingkungan Hidup	Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan / PKB	Pendidikan Non-Formal (diantaranya)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (KPB)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kewenangan pengelolaan pendidikan untuk penyusunan kurikulum utama Pemerintah daerah menerapkan kurikulum lokal dan manajemen berbasis sekolah.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Organisai Non-pemerintah/ LSM seperti Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup atau LSM pendidikan lingkungan lainnya. Sampoerna Foundation of Teacher Institute	Kementerian Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, salah satunya melalui Program Adiwiyata	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pusat Penelitian dan Kebijakan yang sudah menerbitkan buku-buku terutama buku panduan PPB Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup	• Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan •Pusat Belajar Kejuruan •Kementerian Agama •LSM anggota Jaringan Pendidikan Lingkungan(JPL) •Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB) •Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) • Swasta melalui program CSR / *Corporate Social Responsibility*	• Deputi Bidang Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup. • MoI/ Kementerian Industri • MoEMR/ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • MoC/ Kementerian Perdagangan • YPB • YLKI
Kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan sekolah, mengacu pada standar nasional Tujuan pendidikan yang mempromosikan kemampuan berpikir logis-kreatif-kritis-inovatif dan kerjasama tim	Persiapan materi pelatihan dan pelaksanaan pelatihan kompetensi pendidikan dan metodologi pendidikan oleh P4TKs (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tiga pendekatan pengajaran yang umum dilakukan di PLH tediri dari : infusi (menambahkan contoh PLH dalam silabus yang ada), integrasi (PLH mengajar sebagai pendekatan interdisipliner), atau sebagai subyek yang terpisah	Dokumen hasil kajian kebijakan Pusat Penelitian dan Kebijakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain: o Strategi Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (2009)	Ragam pelaksanaan pendidikan non-formal yang juga memiliki kompetensi tertentu Upaya yang sudah dilakukan terkait yang sudah dikerjakan oleh YLKI	Program Industri Hijau yang dipromosikan oleh Kementerian Perindustian Rencana Aksi Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan yang mendorong terbentuknya Forum Nasional SCP, SCP National Single Window,

Struktur Pelaksanaan dan Potensi Projek relevan bagi PKB

	Pendidikan karakter - yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010 yang mencakup kesadaran lingkungan, tanggung jawab dan kemandirian.	Tiga P4TKs telah membahas topik PLH/ ESD secara langsung dimana: P4TK Malang menggabungkan PLH/ ESD dalam Ilmu Alam; P4TK di Cianjur menggabungkan PLH/ PKB di pendidikan menengah kejuruan, dan P4TK di Bandung menggabungkan PLH/ PPB di TK. Layanan pelatihan dan lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Catatan: Tantangan yang dihadapi adalah melatih 3 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia.	(biasanya diterapkan dalam pendidikan tingkat tinggi) Topik belajar sejalan dengan GBIM (Garis-garis Besar Isi Materi PLH) antara lain materi tentang manusia dan lingkungan hidup, sumber daya alam, menjaga kebersihan & lingkungan, air, laut & pesisir, udara, tanah dan lahan, energi, hutan, penipisan lapisan ozon, atmosfer dan pemanasan global. Pendekatan Sekolah Hijau	o Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui Intrakurikuler (2010) o Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekstrakuri kuler (2010) o Ringkasan Eksekutif Model PPB (2010) Panduan terkait topik : pena Guidelines prioritize: penanggulangan kemiskinan, sumber penghidupan berkelanjutan, dan HAM	Konsumsi berkelanjutan yang dipromosikan melalui media massa	dan Peningkatan Rencana Pembangunan Nasional Inisiatif-inisiatif antara lain bangunan dan kontruksi ramah lingkungan, *eco-label*, ketahanan pangan, produksi bersih dan kantor ramah lingkungan.
	Kurikulum Nasional	Pelatihan Guru	Pendidikan Lingkungan Hidup	Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan / PKB	Pendidikan Non-Formal (diantaranya)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (KPB)
	PKB dapat dihubungkan ke pengelolaan berbasis sekolah melalui pendekatan berkelanjutan ESC dapat dihubungkan dengan subyek pembelajaran yang ada (agama dan berbudi pekerti luhur, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, pendidikan olah raga dan kesehatan jasmani) Metodologi PKB dapat mempromosikan	Pelatihan PPB dapat diperkuat melalui pendekatan praktis topik-topik PKB Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Pengembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengembangkan bahan ajar dan modul PKB jika memang diperlukan oleh sekolah. Metodologi pendidikan dan bahan ajar yang didasarkan pada pengalaman.	PKB dapat menjadi dasar memperkuat program Adiwiyata di sekolah untuk lebih memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan dapat menjadi landasan untuk kegiatan lingkungan di sekolah Modul dapat diarahkan agar dapat melakukan aksi lingkungan yang lebih baik dan menjaga lingkungan yang terkait dengan kehidupan mereka.	PKB dapat diajarkan sebagai sub topik atau tematik PPB ESC dapat menjadi sebuah gerakan yang berorientasi pada aksi pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan praktek tentang konsumsi berkelanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan. PKB dapat dihubungkan dengan isu prioritas di bidang pendidikan termasuk isu keberlanjutan	PKB dapat dikaitkan dengan pendidikan keterampilan dan program-program pemberdayaan perempuan PKB dapat dikaitkan dengan ketahanan dan keamanan pangan yang dianggap sebagai masalah konsumen yang sangat penting PKB dapat dihubungkan dengan isu-isu yang dianggap paling penting di sektor perusahaan terkait isu perubahan iklim khususnya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor	PKB dapat dihubungkan dengan topik keaneka-ragaman hayati, pengetahuan lokal, ketahanan pangan, dan pertanian organik Keterlibatan masyarakat program yang berfokus pada konsumsi berkelanjutan Pembentukan pusat sumber daya untuk topik Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan sebagai sumber informasi dan bahan PKB Rencana aksi

	pengembangan kapasitas yang diinginkan seperti tersebut diatas.			sumber penghidupan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta kewarganegaraan	transportasi, pengelolaan limbah, upaya hemat energi, serta upaya melakukan produksi ramah lingkungan.	Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan akan memperkuat PKB
	Kurikulum Nasional	Pelatihan Guru	Pendidikan Lingkungan Hidup	Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan / PKB	Pendidikan Non-Formal (diantaranya)	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (KPB)
	UU Nasional No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dimana sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan indikator keberhasilan pengajaran dalam kurikulum yang diterapkan. Kebijakan ini dapat mendorong sekolah untuk menerapkan PKB salah satunya melalui dengan mengintegrasikan penghematan sumberdaya dan efisiensi energi ke dalam manajemen sekolah dan untuk memanfaatkan ini sebagai pembelajaran. •Catatan: Dibutuhkan panduan dan bimbingan untuk pengelolaan sekolah menyeluruh dalam konsumsi dan pembangunan berkelanjutan.	P4TKs & Lembaga Penelitian dan Pengembangan perlu mengembangkan bahan pengajaran ESC yang disesuaikan dengan konteks Indonesia Menerapkan pendekatan infusi untuk topik PKB tertentu akan membantu untuk menempatkan topik PKB dalam kurikulum yang sudah ada, dibanding menyusunnya sebagai modul yang berdiri sendiri.	Menghubungkan dengan kurikulum nasional, sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dapat menjadi model percontohan dari sistem pengelolaan sekolah secara menyeluruh untuk penerapan konsumsi berkelajutan dan pembangunan berkelanjutan. Pengumpulan contoh-contoh model sekolah ini serta penyebarluasan contoh praktis yang berhasil sangat diperlukan Lebih banyak lagi bahan pengajaran untuk guru yang mengidentifikasi berbagai kesempatan dari mengembangkan modul PPB sangat diperlukan.	Memasukkan PKB dalam kerangka PPB yang sudah ada Pedoman pengajaran untuk PKB sangat diperlukan PKB bukan hanya sekedar dipromosikan sebagai topik tematik, namun dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengajar/inovasi pedagogi.	Pendidikan Non-Formal memungkinan PKB diintegrasikan secara fleksibel, namun seringkali pendidikan non-formal bersifat jangka pendek dengan strategi yang tidak terlalu kohesif. Merujuk pada pendekatan *whole-school management* dalam pendidikan formal, sekolah dapat didukung untuk menjadi pusat pembelajaran komunitas dalam pendidikan non-formal.	PKB juga dapat dihubungkan dengan kerangka Industri Hijau Peningkatan kesadaran konsumen yang berfokus pada topik-topik konsumsi berkelanjutan. Hubungan yang lebih baik diantara kementerian untuk mendorong PKB terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perindustrian. Terkait dengan kantor ramah lingkungan, KLH sebaiknya mempromosikan penerapan kantor ramah lingkungan, seperti upaya yang telah dilakukan pada sekolah melalui program Adiwiyata.

Peta Situasi Sekarang (yang ada) Peluang PKB dan Persyaratan

Sumber:
Hendarti, L. (2012). *Institutional strengthening of Education for Sustainable Consumption (ESC), Advancing ESC policy and implementation strategies: Mapping opportunities in Indonesia.* Jakarta: YPB and UNEP.

PKB dapat diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan formal di bawah mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan non-formal dapat dilakukan terutama oleh lembaga nirlaba (termasuk lembaga swadaya masyarakat), lembaga pelatihan, dan media massa, yang berpeluang untuk melakukan pendidikan publik secara umum.

Gambar 4.1: PKB dapat diterapkan dalam pendidikan formal di sekolah

PKB dapat diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan formal di bawah mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan non-formal dapat dilakukan terutama oleh lembaga nirlaba (termasuk lembaga swadaya masyarakat), lembaga pelatihan, dan media massa, yang berpeluang untuk melakukan pendidikan publik secara umum. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dapat mendukung pendidikan non-formal melalui berbagai program dalam pendidikan publik terkait pendidikan konsumsi berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki program untuk membangun pusat informasi bagi konsumen sebagai pendidikan publik dalam kerangka konsumsi dan produksi berkelanjutan. Kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perdagangan potensial menyebarluaskan informasi kepada konsumen mengenai jasa dan produk hijau.

Meningkatkan PKB Dalam Pendidikan Formal Dan Pendidikan Non-Formal

Rekomendasi di atas tetap terbuka untuk peluang baru, sehingga dokumen ini merupakan dokumen hidup *(evolving document)*. Di masa depan kebijakan baru diharapkan dapat meningkatkan PKB lebih jauh. Peluang PKB untuk diterapkan dalam pendidikan formal dan non-formal telah ada. Pendidikan formal telah mengadaptasi PKB dalam kurikulum yang telah ada dan dapat dikembang-kan lagi, dan pendidikan non-formal yang telah berkembang dapat lebih jauh berkembang lagi terutama oleh lembaga nirlaba dan lembaga pelatihan untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran, dan memanfaatkan internet untuk menyebarkan pesan PKB dalam berbagai bentuk (*e-learning, website, blog, social media,* dll).

Peranan media untuk mempromosikan PKB dapat didorong karena sangat strategis untuk pendidikan publik. Dengan pesan yang sederhana dan populer, media massa dapat memulai melakukan edukasi publik.

PKB Dalam Pendidikan Formal

Sistem pendidikan nasional tidak hidup dalam suasana statis. Sistem tersebut perlu berubah ketika diperlukan, seiring dengan perubahan dan peluang yang ada dalam perjalanan waktu. Adalah sangat penting bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang baru dikeluarkan tepat waktu. Di tingkat provinsi dan kabupaten kebijakan akan merujuk pada situasi lokal yang khusus, sehingga PKB dapat diintegrasikan secara relevan dalam kurikulum lokal.

Pada saat ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, di bawah program *Analytical Capacity Development Program* (ACDP) tengah mengembangkan materi Pendidikan Lingkungan bagi sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan setara. Hal ini menjadi peluang bagi pendidik untuk memadukan PKB kedalam kerangka kerja ACDP. Program Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menjangkau sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dan setara di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang menekankan tindakan nyata *(action)*, ada media yang tersedia untuk memadukan PKB ke dalam program Adiwiyata. Diharapkan publikasi ini memberi inspirasi kepada Kementerian Pendidikan. Mengingat ACDP adalah proyek jangka panjang dan sekarang masih tahap awal maka ada cukup waktu untuk memperkenalkan PKB pada Kementerian Pendidikan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan yang ada dalam kerangka ACDP.

PKB Dalam Pendidikan Non Formal

Berbagai peluang terbuka untuk memasukkan PKB sebagai pendidikan non-formal. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dimanfaatkan sebagai media PKB.

Peran Media Massa

Saluran TV dan stasiun radio dapat menjadi sangat kreatif dalam merancang program yang membuat PKB menjadi isu yang dibahas sehari-hari agar orang menaruh perhatian. Di tingkat komunitas, radio komunitas dapat menjadi media PKB untuk menyampaikan pesan.

Dengan mempunyai ahli komunikasi untuk merancang PKB buat media massa dan media sosial (*social media*) seperti *Facebook, Blog, Twitter, YouTube*, membuat pesan PKB dapat efektif tersebar luas. DAAI TV, Kompas TV, Green Radio, Kompas Muda, dan majalah Hai adalah beberapa media massa di tingkat nasional yang mempromosikan kesadaran lingkungan dan keragaman budaya. Sedangkan media massa di tingkat lokal perlu dijajaki di tiap lokasi untuk dapat berperan menjadi corong PKB.

Kelompok Sasaran Strategis bagi PKB

Dari hasil lokakarya PKB dengan berbagai pemangku kepentingan diketahui terdapat kelompok sasaran PKB yang strategis yang krusial sebagai agen perubahan: ibu rumah tangga yang seringkali mengambil keputusan dalam mengkonsumsi sesuatu, terutama kebutuhan rumah-tangga (alokasi anggaran, pendidikan nilai-nilai, disiplin, memberi contoh, dan sebagainya), dan generasi muda karena mereka sangat mudah dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif, menjadi sasaran iklan, dan keinginan untuk di terima di kelas tertentu yang harus *fashionable*. Generasi muda, terutama dari keluarga menengah atas di perkotaan, perlu menyadari dampak dari gaya hidup tidak berkelanjutan, karena generasi mudalah yang menerima konsekuensi dari tindakan masa kini dan kebijakan yang ada. Dengan lebih melibatkan pemuda dalam aksi nyata dan mendorong mereka mengambil inisiatif untuk membentuk masa depan mereka. Bahkan mereka dapat menjadi kelompok penekan, dimana PKB adalah materi yang harusnya secara mudah dapat diterima di kelompok ini.

Kelompok sasaran PKB yang strategis dan krusial sebagai agen perubahan antara lain: ibu rumah tangga yang seringkali mengambil keputusan dalam mengkonsumsi sesuatu, terutama kebutuhan rumah-tangga (alokasi anggaran, pendidikan nilai-nilai, disiplin, memberi contoh, dsb) generasi muda karena mereka sangat mudah dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif, menjadi sasaran iklan, dan keinginan untuk diterima di kelas tertentu yang harus *fashionable.*

Peran Penting Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

PKB berupaya mendidik konsumen bertanggung jawab sehingga akan tetap tersedia cukup sumber daya alam yang berkualitas bagi semua, sekarang dan masa yang akan datang

Pesan berikut memberikan indikasi peran penting PKB untuk membentuk masa depan yang memiliki sumber alam berlimpah dan situasi damai sehingga menimbulkan atmosfer kehidupan yang sehat dan produktif:

Merawat Lingkungan – satu-satunya sistem pendukung kehidupan

Harus ada jalan ke luar dari dua dunia yang bertentangan ini. Di satu pihak konsumen mengkonsumsi begitu banyak sumber alam dan harus mulai berpikir tentang apa dan bagaimana mereka mengkonsumsi karena sumber alam sudah menjadi langka. Dunia yang lain memiliki banyak sumber alam tetapi merusak sumber alam dan bermasalah dalam melestarikannya. Banyak dari mereka yang hidup dalam kemiskinan di dunia yang kaya sumber alam. Dua dunia ini perlu melakukan tindakan perubahan yang drastis untuk merawat lingkungan sebagai sumber alam penunjang kehidupan manusia: dari konsumsi yang menguras sumber alam ke konsumsi yang penuh perhitungan; dari tindakan yang merusak lingkungan ke cara hidup yang ramah lingkungan; dan keduanya perlu menggunakan sumber alam sesedikit mungkin untuk pemanfaatan maksimum.

Solidaritas Sosial yang lebih kuat

Secara umum, dunia telah menunjukkan bahwa bahkan di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai sekalipun kemiskinan masih ada dan merupakan persoalan kemanusiaan yang perlu diatasi. Oleh karena itu solidaritas sosial berupa empati yang kuat dari kelompok yang kuat secara ekonomi perlu direalisir bagi kelompok miskin ini. Bila keluarga mampu dan perusahaan besar dapat terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan tidak menggantungkan peran ini pada pemerintah saja, maka dunia memiliki kesempatan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Solidaritas terhadap kelompok yang kurang beruntung seyogyanya menjadi nilai penting bagi mereka yang mempunyai kemampuan finansial dan sumber daya lebih untuk membuat perubahan.

Solidaritas sosial disini merupakan ungkapan dari rasa empati terhadap orang lain dan kemauan untuk membantu dan membuat perubahan dalam hidup orang lain. Program Tanggung Jawab Sosial *(Corporate Social Responsibility)* dan program sejenis lainnya merupakan tindakan tanggung jawab kewargaan dari perusahaan *(citizenship)* sebagai anggota masyarakat. Secara individu dan sebagai solidaritas sosial umumnya diungkapkan dalam bentuk bantuan langsung kepada orang terdekat dan komunitas terdekat yang memerlukan bantuan untuk hidup layak dengan bantuan langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga yang mempunyai program pengentasan kemiskinan (seperti lembaga keagamaan, badan amal, lembaga swadaya masyarakat, sukarelawan dan sebagainya).

Berbagai bentuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan, yang dapat diberikan oleh perusahaan maupun individu dan sebagai keluarga. Program dan kegiatan bagi keluarga kurang mampu tersebut antara lain meliputi:dukungan pendidikan bagi anak keluarga miskin dan sarana sekolah yang bermutu (termasuk guru dan manajemen sekolah), pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat (peralatan, tenaga medis, vaksinasi, pembuatan sarana sanitasi dsb), berbagai bahan pokok (produk pangan, produk kebersihan, pakaian dsbnya), memberikan keterampilan dan pengetahuan perusahaan (seperti keahlian manajemen keuangan, wirausaha, strategi pemasaran dan komunikasi, diversifikasi produk, disain, dan sebagainya) agar mendapat pekerjaan yang lebih baik, memberi akses keuangan yang mudah dan ringan.

Gambar 4.2: Program kesehatan masyarakat yang didukung oleh perusahaan dan individu yang mampu sebagai tanda solidaritas sosial

Dari segi kebijakan pemerintah perlu melakukan *pro-poor* dengan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah, mengeluarkan kebijakan khusus *(affirmative policy)* untuk memastikan keadilan terutama bagi kelompok marjinal, dan redistribusi hasil kekayaan sumber daya alam antar daerah, kebijakan prioritas alokasi anggaran bagi kelompok miskin. PKB dalam hal ini berperan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya keadilan sosial yang menjamin konsumsi berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tumbuhnya Kelas Menengah – Harus lebih Produktif daripada Konsumtif

Kelas menengah telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat. Sisi buruk dari kelas menengah ini adalah gaya hidup mereka yang biasanya ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi, karena mereka tidak memiliki masalah finansial, dan telah melewati tahap sekedar bertahan hidup. Mereka ini cenderung untuk mengkonsumsi berdasarkan kelas sosial ekonomi, untuk kesenangan, dan di luar keputusan yang rasional. Gaya hidup semacam ini akan mengarah pada naiknya tingkat konsumsi sumber daya alam. Dari sisi konsumerisme, kelompok kelas menengah ini memerlukan nilai yang menganggap penting untuk menjadi kelompok yang produktif, melakukan inovasi demi kesejahteraan manusia, untuk keamanan lingkungan dan kehidupan budaya yang hidup. Penelitian, pengembangan teknologi dan pendidikan adalah hal-hal kunci dimana investasi menjadi krusial untuk memecahkan masalah kelangkaan sumber alam, kesehatan, dan pengangguran.

Kelompok Khusus sebagai kelompok strategis bagi PKB: Netizen

Pertumbuhan jaringan (media) sosial dengan menggunakan internet telah membentuk kelompok netizen, yaitu mereka yang menggunakan *facebook, blog, twitter, dan email* sebagai alat komunikasi yang intensif di luar kegiatan sehari-hari *(off line)*. Netizen di Indonesia sangat aktif, menurut survey yang dilakukan oleh peneliti MarkPlus Taufik, netizen menghabiskan lebih dari 3 jam tiap hari untuk menggunakan internet, dimana *online* menjadi gaya hidup (WWF, 2011, p. 165).

Netizen dapat menjadi target dari iklan *(marketing)* dan sebagai target pendidikan PKB karena kelompok ini mencari dan mendapatkan informasi dari internet dan media sosial. Temuan dari survey tersebut menjelaskan bahwa perempuan adalah Pengelola Keuangan Rumah Tangga *(Chief Financial Officer)* di rumah tangga yang menentukan pembelian kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak, dan besarnya tabungan. Sedangkan untuk hal lain dilakukan berdasarkan keputusan bersama antara suami dan istri (pp. 138-142). Bagi generasi muda survey menemukan bahwa lebih dari setengah dari seluruh responden adalah pemburu harga murah yang memutuskan secara rasional, tetapi hampir 30% dari generasi muda adalah korban penjualan retail dimana mereka memutuskan membeli sesuatu secara impulsif, bukan berdasarkan apa yang sesungguhnya mereka perlukan. PKB dalam hal ini dapat memperkuat generasi muda dalam membuat keputusan yang tepat sebagai pembeli, dan mendidik calon korban dari iklan dan harga murah seperti diskon dan *sale* (pp. 202-204).

Gambar 4.3: Beragam *gadget* dan komputer dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi PKB

Produk Lokal – menghargai apa yang dimiliki

Tiap daerah memiliki keunikan lingkungan keragamannya. Di dunia dimana penggunaan sumber alam secara efisien diperlukan, maka pemanfaatan dari jasa lingkungan yang ada akan mengurangi biaya transportasi produk dari daerah lain (*imported).* Penduduk perlu tahu sumber alam apa saja dan produk yang tersedia di daerahnya serta mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam setempat. Penggunaan aset lokal untuk penduduk setempat dengan memanfaatkan kapasitas lokal akan meningkatkan ketahanan dari komunitas tersebut dan menghindarkan masalah akibat ketergantungan pada sumber alam dan produk luar. Pengetahuan budaya lokal, keterampilan dan nilai yang dipegang dari suatu masyarakat merupakan sumber penting sebagai proses pembelajaran.

Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang menghargai alam dan manusia, serta pengetahuan dan keahlian untuk bertahan hidup dalam tantangan dan peluang. Nilai-nilai tersebut adalah penting karena lingkungan adalah pendukung kehidupan manusia, sedangkan nilai perdamaian dan penghormatan pada sesama manusia akan mencegah konflik dan menciptakan perdamaian dan kehidupan produktif. Memiliki hubungan yang kuat pada satu komunitas adalah kunci dalam dunia yang memiliki hubungan yang kompleks dengan perbedaan sosial, budaya, ekonomi, minat politik dimana kemampuan toleransi dan rasa saling menghargai diperlukan.

Gambar 4.4: Menghargai makanan lokal sebagai bagian dari PKB

Perlunya Etika Pemasaran

Pemasaran yang agresif di media massa, internet, papan iklan, dan kunjungan ke rumah, telah membuat masyarakat, terutama di perkotaan, dan khususnya generasi muda, dipaparkan pada kehidupan mewah, yang sesungguhnya bukanlah menyajikan kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Mereka tidak memerlukan berbagai produk, baju, aksesoris, yang terus menerus berubah (ganti model), barunya perangkat elektronik *(gadget)* sangat menggiurkan karena terus menerus berubah semakin canggih, demikian juga beragam motor dan mobil, yang lebih nyaman dan bergaya, yang semuanya mencerminkan gaya hidup tertentu. Sebagai tambahan, kosmetik sering menawarkan kecantikan yang menawan sehingga sulit untuk ditolak, dan adanya wisata ke tujuan sangat populer dengan lokasi yang amat jauh, merupakan pilihan pilihan yang menggoda. Gaya hidup semacam inilah yang sangat menarik bagi kelompok kelas menengah dan kelas atas. Namun, bisa pula hal ini terjadi pada mereka dengan daya beli terbatas, karena bujukan iklan yang kencang, yang tampaknya mengharuskan orang memiliki “gaya hidup modern yang terkini. “

Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia,
tetapi tidak untuk kerakusan.
(Mahatma Gandhi)

Ada dua hal yang dapat menghancurkan kemanusiaan:
Keserakahan dan Kemiskinan.
Hanya dengan berbagi maka ada ruang untuk
menumbuhkan manusia.
(Darwina Widjajanti)

BAB V:

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PENDIDIKAN KONSUMSI BERKELANJUTAN DI INDONESIA DAN ASIA PASIFIK: SEKARANG DAN MASA DEPAN

- Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia
- Tantangan Konsumsi Berkelanjutan di Asia Pasifik

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan Di Indonesia

Dalam *Overview of Indonesia's Sustainable Development: Progress on Key Policies for Sustainable Development* dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi arus utama dalam kebijakan dan program pemerintah (Ministry of National Development Planning & Ministry of Environment, 2012, p. 76). Hal tersebut berarti seluruh kementerian harus mengadopsi pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan mereka, dan dalam program nasional maupun daerah. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan memadukan kebijakannya dengan kebijakan dari kementerian yang terkait lainnya, tetapi tidak terbatas pada pertanian berkelanjutan, transportasi berkelanjuta n, konstruksi berkelanjutan (untuk konservasi air dan energi), dan pengelolaan sampah, dengan pelaksanaan lebih luas dari *green procurement, eco-labelling* dan sertifikasi yang akan secara bertahap membentuk komponen dalam produksi dan konsumsi berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kebijakan ini merupakan payung nasional yang perlu dijabarkan dalam kebijakan tiap kementerian dan kebijakan pemerintah daerah, yang pada akhirnya perlu dilaksanakan secara nyata dalam program pemerintah, didukung oleh penegakan hukum yang pasti.

Kebijakan Pemerintah dan Kelas Menengah

Kelas menengah Indonesia meningkat dari 45.4 juta di tahun 1999 menjadi 95.31 juta pada tahun 2009, dengan pengeluaran per orang per hari antara USD 2 dan USD 20. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong investasi yang produktif untuk keuntungan jangka panjang, daripada mengadopsi kebijakan yang mendorong konsumsi berlebihan sebagai status sosial atau pembelian impulsif (konsumerisme), membatasi produk impor (terutama barang mewah), mendukung pengembangan produk lokal dan pasar domestik. Materi PKB perlu menekankan pentingnya keputusan rasional pada kelas menengah ini, menjelaskan dampak pada sumber daya alam dari konsumsi berlebih, dan untuk mendorong solidaritas dari kelas menengah kepada kelompok miskin.

Upaya awal dari pemerintah meliputi penerapan *green public procurement* (pembelanjaan pemerintah untuk produk hijau) dari pemasok, dan memulai menerapkan standar *green building* (bangunan hijau), serta konstruksi hijau. Kedua kebijakan ini akan lebih mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis standar ramah lingkungan. Pemerintah dapat mempelopori kampanye publik bagi konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Tantangan Kemiskinan

Tantangan bagi Indonesia adalah masalah kemiskinan, dimana terdapat 30 juta penduduk miskin pada tahun 2011 dengan pendapatan Rp 253.016,- /orang/bulan atau Rp 8.443,87/orang/hari di perkotaan dan Rp 213.395,-/orang/bulan atau Rp 7.113,17,-/orang/hari di pedesaan. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, pendapatan kelompok miskin per orang per hari kurang dari Rp 10.000 atau kurang dari USD 1,00 (Statistics Indonesia, 2011b, pp. 48-49). Sekitar 40% dari penduduk Indonesia sangat rawan terhadap *shocks* atau ancaman yang mendorong mereka ke batas kemiskinan dengan pendapatan sekitar USD 27/orang/ bulan, berdasarkan laporan World Bank (2012, p. 10 & 12). Lebih dari 63% orang miskin tergantung hidupnya pada sektor pertanian untuk menutupi kebutuhan sendiri dan pendapatan mereka. Kenaikan produktivitas dan pendapatan dari mereka yang bekerja di sektor pertanian umumnya tidak setara dengan kenaikan di sektor lain. 80% dari tenaga kerja Indonesia dikelompokkan sebagai pekerja di usaha mikro dan usaha kecil menengah. Tingkat kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan (16,5%) dibandingkan dengan di perkotaan (9,87%) di tahun 2010 (Ministry of National Development Planning, 2010, pp. 30-31).

Angka kematian ibu ketika melahirkan adalah 228 orang per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007, yang diharapkan menurun menjadi 102 pada tahun 2015. Sekitar 80% dari kematian ibu dikarenakan penanganan bukan oleh tenaga ahli. Padahal sebagian besar penyebab kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah. Kurangnya pengetahuan dan pelayanan kesehatan diduga turut berperan dalam kematian ibu melahirkan (Ministry of National Development Planning, 2010, pp. 121-123).

Pada tahun 2007, jumlah anak dengan berat badan kurang menunjukkan disparitas dalam status nutrisi antar provinsi, antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, dan antar kelas sosial. Sekitar 10.9% dari anak usia di bawah 5 tahun memiliki berat badan kurang di wilayah pedesaan di Yogyakarta sedangkan di Nusa Tenggara Timur adalah 33,6%. Anak-anak dengan berat badan kurang untuk usia di bawah 5 tahun di wilayah pedesaan adalah 20,4%, sedangkan di wilayah perkotaan 15,9%. Data menunjukkan di tahun 2007 pendapatan rumah tangga semakin rendah, dan semakin banyak jumlah anak-anak di bawah 5 tahun dengan berat badan kurang (Ministry of National Development Planning, 2010, pp. 57-58).

Dari data tersebut menunjukkan perlunya pemerintah mempercepat pendidikan keterampilan kerja dan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang memadai, memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, menyediakan air bersih dan fasilitas sanitasi, tersedianya akses finansial yang mudah dan murah pengembaliannya bagi usaha kecil menengah, adanya redistribusi yang adil antara wilayah yang kaya sumber alam dan yang kurang memilikinya, perhatian terhadap daerah terpencil yang kurang prasarana transportasi, dan memanfaatkan kekayaan hayati untuk menumbuhkan ekonomi dengan tetap melestarikan sumber daya alam. PKB memberikan kesadaran untuk mendorong pengambil kebijakan agar mereka yang mengkonsumsi kurang dari semestinya mendapat kesempatan untuk memiliki hidup yang layak.

Eco Label dan Pendidikan Publik

Dari sisi *eco-labelling* dan standar sertifikasi, Indonesia masih dalam tahap yang awal karena belum ada mekanisme pelaksanaan secara rinci, namun konsep kerja *green building, green construction* dan *green procurement* telah dimulai. Masih sangat terbatas tersedia barang dan jasa dengan informasi *eco label* di pasar Indonesia (kecuali beberapa produk impor). Bila proses *eco-labelling* telah dilaksanakan pemerintah, maka konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat produk berdasarkan *eco-label.*

Sementara menunggu keluarnya produk dan jasa dengan *eco-label,* maka pemerintah dapat memulainya dengan petunjuk praktis bagaimana memilih barang dan jasa yang ramah lingkungan, menghormati keamanan dan keadilan perdagangan.

Ketika *eco-label* telah diterapkan maka ketaatan produsen memenuhi standar *eco-label* memerlukan penegakan hukum untuk mengamankan sumber daya alam.

Kini Kementerian Lingkungan Hidup telah meluncurkan 10 tahun Kerangka Kerja Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (2013-2023) atau *10-Year Framework Programme for Sustainable Consumption and Production.* Dalam kerangka kerja tersebut termasuk program *Green Procurement* (terutama produk hijau untuk pembelanjaan oleh pemerintah), *Green Building* (bangunan hijau), *Green Industry* (Industri Hijau) dan *Green Tourism* (wisata hijau).

Keaneka-ragaman Hayati untuk Keberlanjutan Indonesia

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya keaneka-ragaman hayati dengan dua unsur strategis dari “ekonomi hijau” dan “ekonomi biru.” Kebijakan ekonomi hijau termasuk kebijakan terkait kerangka kerja ekonomi rendah karbon yang berdampingan dengan tiga pilar lingkungan: (i) ekonomi jasa lingkungan; (ii) ekonomi keaneka-ragaman hayati hijau; dan (iii) ekonomi keaneka-ragaman hayati biru. Dengan kata lain, masa depan Indonesia adalah pembangunan ekonomi berbasis ekosistem, dengan keaneka-ragaman hayati daratan dan lautan, untuk pemanfaatan berkelanjutan, karena sejauh ini keaneka-ragaman hayati Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan atau *under-utilized* (Ministry of National Development Planning & Ministry of Environment, 2012, p. 99).

Tantangan Konsumsi Berkelanjutan Di Kawasan Asia Pasifik

"Sekarang terdapat lebih dari 1.7 miliar penduduk "kelas konsumen" – hampir setengah dari mereka berada di 'negara berkembang'. Suatu gaya hidup dan budaya yang umum terdapat di Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan beberapa tempat di dunia dalam abad 20 kini menjadi global dalam abad 21." (Starke ed. 2004, 4).

Kelompok kawasan Asia Pasifik (dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk 53 negara anggota tetapi tidak termasuk Australia dan Selandia Baru), berjumlah total hampir 60% dari penduduk dunia (atau sekitar 4.15 milyar penduduk), menempati sepertiga dari wilayah daratan bumi ("The List", n.d). Lebih dari itu, 29 *mega-cities* (kota besar dunia (misalnya pengumpulan kota dengan penduduk lebih dari 10 juta), 17 diantaranya ada di Asia (Brinkhoff, 2013). Kawasan ini meliputi kebe-ragaman yang tinggi dengan beberapa diantaranya negara berpenduduk terpadat dan terkecil di dunia. Dari perspektif ekologi terdapat 238 wilayah daratan *ecoregion* yang berbeda, menurut WWF, dimana sepertiga dari *ecoregion* ini (total 79) berada di kawasan Asia Pasifik ("List of Ecoregions", n.d). Secara sosial, kawasan ini juga memiliki beragam bahasa dan budaya yang tinggi bersamaan dengan cakupan (konteks) ekonomi dan politik yang berbeda, yang membatasi kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat dengan satu cara yang sama untuk seluruh kawasan ini, secara singkat dapat dikatakan kawasan ini besar dan sangat beragam.

Beberapa tantangan utama untuk memperkuat pendidikan terkait pembangunan berkelanjutan dan konsumsi yang perlu dipertimbangkan bagi kawasan ini adalah: i) hambatan budaya, ii) variasi yang tinggi secara geografis, iii) tata kelola dan koordinasi nasional, iv) tingkat pembangunan dan variasi sistim pendidikan, v) bencana alam yang meluas (Walls, 2010). UNESCO mengidentifikasikan 4 dimensi yang harus diperhatikan dalam bekerja untuk pembangunan berkelanjutan, dimana tiap dimensi mempunyai berbagai tantangan tersendiri di kawasan Asia Pasifik, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel di bawah ini menunjukkan prioritas dan tantangan dari pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia). Dari aspek sosial, antara lain mencapai perdamaian dan keamanan masih merupakan tantangan tersendiri. Dari aspek budaya, melindungi keragaman budaya, menghargai pengetahuan masyarakat adat, melindungi warisan *intangible* yang dianggap penting, demikian pula halnya toleran terhadap berbagai budaya dan kepercayaan.

Tabel 5.1: Tantangan Pembangunan di kawasan Asia Pasifik

SOSIAL	BUDAYA	LINGKUNGAN	EKONOMI
• Access to education • Access to health care • Gender equality • Good governance • Human rights • Improving the quality of education • Peace and human security • Preventing the spread of HIV and AIDS	• Melestarikan Keragaman Budaya dan Bahasa • Menghargai Pengetahuan Masyarakat Adat • Melestarikan Warisan *tangible* dan *intangible* • Promosi pemahaman antar budaya dan antar keyakinan	• Hilangnya Habitat data Keanekaragaman Hayati • Perubahan Iklim • Berkurangnya Sumber Alam • Deforestasi • Penggurunan • Persiapan Menghadapi Bencana • Kurangnya Air • Penangkapan Ikan Berlebihan • Polusi • Cara Pertanian Tidak Berkelanjutan	• Tanggung jawab bersama dan akuntabilitas • Keamanan makanan • Kemiskinan • Perkembangan daerah • Urbanisasi • Kesiapan akan bencana

Sumber:
UNESCO. (2011). Astrolabe: A guide to education for sustainable development in Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand: UNESCO.

Dari aspek lingkungan, pendidikan konsumsi berkelanjutan dianggap penting karena berbagai masalah diakibatkan oleh hilangnya berbagai sumber daya alam, seperti cara penangkapan ikan berlebihan dan pertanian yang tidak berkelanjutan yang juga merupakan keprihatinan dari aspek ekonomi terkait keamanan pangan. Kesiapan menghadapi bencana alam merupakan hal strategis bagi kawasan ini karena rapuhnya kawasan ini terhadap bencana alam (UNESCO 2011, hal 12). PKB dapat dirancang secara khusus untuk kawasan ini mengedepankan tantangan pembangunan yang penting seperti tertera pada tabel 5.1.

Tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini sangat berarti, dan kecenderungannya menonjolkan keprihatinan tentang meningkatnya jumlah penduduk (tingkat kesuburan yang tinggi di kawasan ini), pertumbuhan ekonomi yang tinggi (tingginya tingkat pertumbuhan GDP per tahun), naiknya migrasi dari pedesaan ke daerah perkotaan, tumbuhnya kelas menengah *(consumer class)*, dan meningkatnya tekanan pasar ("kehidupan yang nyaman" ditandai oleh tekanan media massa yang menonjolkan konsumerisme ala Barat) dan pada saat yang sama jumlah yang besar dari mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim (hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1.24 perhari per orang) karena Asia masih merupakan tempat tinggal dari hampir setengah jumlah penduduk miskin di dunia yang sama dengan seperempat dari penduduk di kawasan ini. Sekitar dua pertiga penduduk dunia mengalami kurang gizi (578 juta jiwa) dan dua pertiga dari penduduk dunia kekurangan akses ke air minum yang aman, berada di kawasan Asia Pasifik (Akenji, et al, 2012, hal 103). Pada tahun 2010, terdapat 466 juta penduduk yang masih tidak memiliki akses ke air bersih, dan 1.86 milyar penduduk tidak memiliki akses fasilitas sanitasi (United National ESCAP, 2011, hal. ix-xii).

Namun demikian, terdapat dikotomi sosial yang besar antara yang miskin dan kelas menengah di kawasan ini. Dalam lebih dari 40 tahun terakhir, kawasan Asia Pasifik telah mencapai pertumbuhan ekonomi tercepat dengan rata-rata pertumbuhan GDP per kapita 3.13% (bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan GDP dunia per kapita 1.93%) (Choi and Kipp, 1996, p. 1-2). Telah ada 28% dari kelas menengah dunia (lebih dari 525 juta penduduk) (Kharas, 2010, hal. 16) tinggal di kawasan Asia Pasifik, dan pada tahun 2030 diprediksi meningkat jumlahnya sebesar 66% (UNEP, 2012, p. 103) atau 3,228 juta penduduk akan bergaya hidup konsumtif (Kharas, 2010, hal.10). Sekarang ini, kawasan Asia Pasifik menyumbang 21.4% dari total global konsumsi individu dan hal ini telah menjadi kelompok konsumen terbesar di kawasan ini. Kawasan ini saat ini telah berkontribusi pada kegiatan ekonomi global sebesar 34%, tetapi diperkirakan akan mencapai lebih dari 55% pada tahun 2035 (Kharas, 2010, hal. 22).

Tabel 5.2: Perkiraan Pertumbuhan Kelas Menengah Di Kawasan Asia Pasifik

Tahun	Penduduk (Juta)	Persentase terhadap Kelas Menengah Dunia
2009	525	28%
2020	1.740	54%
2030	3.228	66%

Sumber:
Kharas, Homi. (2011). The emerging middle class in developing countries. Diambil dari: http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676-1292528456380/7626791-1303141641402/7878676-1306699356046/Parallel-Sesssion-6-Homi-Kharas.pdf.

Kelas menengah dalam pasar yang berkembang di kawasan ini terdiri dari penduduk yang lebih muda dibandingkan di Amerika Serikat dan Eropa. Konsumen muda ini memperhatikan kualitas produk, kecenderungan *(trend)*, menggunakan pengalaman sebagai rujukan, dan menghubungkannya dengan nilai positif terkait merek. Karenanya, produk haruslah terpercaya dan merupakan produk dari merek yang diakui secara luas (KPMG, 2012, pp. 3-4). Implikasi dari hal ini adalah meningkatnya konsumsi produk merek terkenal yang diimpor dari negara maju yang berarti banyaknya energi yang terpakai karena produk impor didatangkan dari jauh menuju pasar yang berkembang. Konsumsi semacam ini bukan lagi persoalan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi merupakan konsumsi produk mewah, yang dikaitkan dengan identitas dan kelas sosial.

Kawasan Asia Pasifik mempunyai dua tantangan dari dua masalah yang bertolak belakang. Pertama, besarnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan menghadapi situasi kurangnya dukungan fasilitas dasar yang membuat kelompok miskin yang jumlahnya berarti *(significant)* ini tidak hidup dalam batas minimum hidup yang layak (*basic quality of well-being).* Kedua, meningkatnya populasi, terutama tumbuhnya kelas menengah, memacu tumbuhnya gaya hidup konsumtif yang menyebabkan naiknya tekanan pada ketersediaan sumber daya alam, dan keadilan.

Untuk mengatasi tantangan pertama maka tantangan kedua perlu disadari secara penuh bila kawasan ini ingin menuju pada kualitas kesejahteraan manusia dan kehidupan yang berkesinambungan bagi semua. Akan tetapi, transisi kearah konsumsi berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan perlu muncul dengan partisipasi aktif dari sebagian besar penduduk dan bukan karena seseorang dapat digerakkan oleh kebijakan saja, dan karena itulah pendidikan konsumsi berkelanjutan memainkan peranan penting.

Prioritas internasional untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil dari Rio+20 dari *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD, yang dilaksanakan pada Juni 20-22, 2012) seperti telah diterbitkan dalam dokumen *The Future We Want* (2012) mengedepankan pentingnya dan dilanjutkannya komitmen dari negara anggota baik untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan untuk pendidikan guna tercapainya pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyadari bahwa "perubahan mendasar dalam cara masyarakat berkonsumsi dan berproduksi sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global" (*UN General Assembly*, 2012: para. 224) yang diungkapkan dalam 10 Tahun Kerangka Kerja Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan *(10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production atau SCP)*. Dukungan untuk pendidikan adalah tema yang paling sedikit diperdebatkan di UNCSD dan menerima total 7 alinea yang mendukung, termasuk pengakuan bahwa "Generasi muda adalah penjaga masa depan, dan kebutuhan akan kualitas dan akses pendidikan yang lebih baik di luar pendidikan dasar. Karenanya, kami memutuskan untuk meningkatkan kapasitas sistem pendidikan kita guna menyiapkan manusia untuk mengikuti pembangunan berkelanjutan." *(UN General Assembly,* 2012: para. 230). Dukungan untuk pendidikan bagi pembangunan berkelanjutan (PPB) secara khusus menerima panggilan untuk terus dipromosikan dan diperkuat setelah berakhirnya *UN A Decade of ESD in 2014* (DESD) atau Dekade Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan atau DPPB dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN General Assembly*, 2012: para. 233).

Kecenderungan Kawasan Asia Pasifik dalam Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (KPB)

Pentingnya dan prioritas pada konsumsi dan produksi berkelanjutan (KPB) telah tumbuh stabil baik secara global dan secara khusus di kawasan Asia Pasifik, terutama sejak panggilan awal untuk "Perubahan Pola Konsumsi" di Agenda 21 (1992: Chapter 4) telah diperbaharui dalam *World Summit on Sustainable Development* pada tahun 2002 (diselenggarakan di Johannesburg, South Africa) ketika KPB diakui sebagai salah satu dari tiga prioritas ambisius untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (UN-WSSD, 2002: III). Sejak saat itu, berbagai inisiatif internasional diluncurkan dan telah mempunyai dampak langsung di kawasan Asia Pasifik, termasuk proses Marrakech dalam melaksanakan *10-Year Framework of Programmes* (10 Tahun Program Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan) dari KPB, didanai oleh *European Union* dalam program SWITCH-Asia, serta upaya kawasan untuk promosi pasar hijau atau *green market promotion.* Banyak negara di kawasan ini telah berkomitmen kuat untuk mempromosikan KPB dan menempatkannya sebagai tujuan yang penting dalam kebijakan lingkungan.

UNEP, *The Commonwealth Scientific and Industrial Research* atau CSIRO dan *Institute for Global Environmental Studies* atau IGES (2013) menghasilkan sebuah laporan sebagai bagian dari *SWITCH-Asia Policy Support Component* yang mengkaji Peningkatan Kapasitas dan Kebutuhan Kebijakan Penilaian Kebutuhan dari KPB *(Capacity Building and Policy Needs Assessment on Sustainable Consumption and Production)* di 19 negara Asia yang dapat masuk sebagai peserta program SWITCH-Asia. Dari 19 negara kajian dalam laporan ini, 11 negara diantaranya memasukkan pembangunan berkelanjutan dalam strategi pembangunan nasional yang biasanya termasuk KPB dan target pencapaian, sedangkan 2 negara lainnya memasukkan aspek pembangunan berkelanjutan dalam rencana kegiatan *(actions plan).* Negara yang patut dicatat adalah Vietnam dan Indonesia yang telah mendirikan (atau sedang mendirikan) *National Action Plan* (Rencana Aksi Nasional) dari KPB; Maldives, Myanmar, and Sri Lanka telah secara spesifik mempunyai Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan; Bhutan, China and Thailand adalah negara yang memasukkan pembangunan berkelanjutan (dan KPB) di bawah pendekatan pembangunan yang khusus *(Gross National Happiness, Circular Economy, and Sufficiency*

Economy secara berurutan). Ke 19 negara tersebut memiliki kebijakan spesifik untuk sektor yang mempromosikan produksi bersih dan KPB (UNEP, CSIRO and IGES, 2013: p. 196-209).

Kawasan lain yang telah mendorong kemajuan KPB, terutama adalah Asia Timur dan Asia Tenggara, dengan gerakan promosi pasar hijau *(green market).* Inisiatif yang dilakukan pemerintah Jepang terkait *eco-label* nasional (sejak 1989), jaringan pembelian produk hijau *(green purchasing network)* (sejak 1996) dan undang-undang nasional terkait *green public procurement* (pasokan produk hijau untuk kepentingan pemerintah sejak tahun 2000) menghasilkan model promosi pasar hijau di kawasan ini. Jepang adalah pelopor awal di kawasan ini dalam promosi pasar hijau, tetapi realitasnya sekarang, "sebanyak negara ini telah mencapai tingkat dari aplikasi produk domestik yang bermutu, mereka juga telah memulai aksi nyata untuk mempelopori promosi pasar hijau di seluruh kawasan ini. " (Didham dan Hayashi, 2011: 21). Di Asia Tenggara, 6 negara (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) telah memiliki jaringan pembelian produk hijau *(green purchasing networks).* Baik Thailand dan Malaysia juga telah berupaya membangun *green public procurement laws* atau pembelian produk hijau oleh lembaga pemerintah. Pembelian produk hijau oleh lembaga pemerintah secara khusus dapat menjadi cara yang penting untuk menggerakkan pasar produk hijau dan mendorong gerakan ke arah pilihan produk bersih dan produk ramah lingkungan.

Tabel 5.3: Jenis Promosi Pasar Hijau di Negara-Negara Asia Timur dan Asia Tenggara*

		Eco-Label (Jenis 1 label lingkungan)	*Green Purchasing Network* (GPN)**	*Green Public Procurement* (UU)
TIER 1 NEGARA Implementasi Maju & Baik	Cina	1993	2006 (CGPN)	2006
	Japan	1989	2000 (GPN-J)	1996
	Republik Korea	1992	2004 (KGPN)	1999
	Thailand	1994	2004 (TGPN)	2008
	Malaysia	2005	2003 (GPNM)	Sekarang
	Singapore	1992	20?? (GPNS)	
TIER 2 NEGARA Baru Berkembang	Indonesia	2006	2010 (IGPN)	Tahap Percontohan/Pilot
	Filipina	2008	2009 (GPAMP)	Perencanaan
	Vietnam	Perencanaan/*Pilot*	2010 (VNGPN)	Perencanaan
TIER 3 NEGARA Tidak Ada Implementasi	Brunei Darussalam	n/a	n/a	n/a
	Kamboja	n/a	n/a	n/a
	Lao PDR	n/a	n/a	n/a
	Myanmar	n/a	n/a	n/a

Sumber:
data diadaptasi dari Didham dan Hayashi, 2011: tabel 1, 2 & 5
* Catatan: data di perbaharui pada Januari 2011; tidak ada GPN yang dilaporkan pada Maret 2013, tetapi pembaruan untuk eco-label dan undang-undang pengadaan publik tidak dapat
diakses melampaui tanggal pelaporan yang asli.
** GPN yang serupa juga terdapat di India, Hong Kong and Taiwan

Komitmen oleh pemerintah bagi seluruh lembaga pemerintah untuk hanya membeli yang memenuhi standar lingkungan yang spesifik, membuat gerakan yang berarti *(significant)* dan memastikan model semacam ini diperkirakan bernilai sampai 15% dari output global, dan di beberapa negara berkembang telah berkontribusi lebih dari 20% terhadap GDP (Mulgan and Salem, 2008: 9).

Meskipun KPB telah menjadi penggerak utama dari pembangunan berkelanjutan di kawasan ini, penting untuk diakui bahwa tindakan nyata untuk pembangunan berkelanjutan masih tertinggal dari mereka yang telah melakukan produksi berkelanjutan. Aspek produk dari KPB mempunyai sejarah pengakuan di tingkat global dan di kawasan ini telah menunjukkan dampak yang besar tercapai setelah berdirinya *National Cleaner Production Centre Programme* oleh UNIDO di tahun 1994. "Domain dari konsumsi lebih sulit untuk dikelola dalam kebijakan publik karena adanya pemahaman umum tentang kebebasan konsumen dalam keputusan membeli yang tergantung pada selera dan cara (UNEP, CSIRO and IGES, 2013: 212).

Kecenderungan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Asia Pasifik

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam jumlah besar telah memfokuskan diri pada pendidikan pembangunan berkelanjutan dan menanggapi inisiatif dari DPPB atau DESD dalam berbagai cara. Negara yang tengah mengembangkan strategi yang jelas untuk PPB meliputi: "menggerakkan PPB dari teori ke tindakan, dengan menentukan tema nasional dalam prioritas Pembangunan Berkelanjutan, mengkaitkan prioritas pada tujuan utama *(aims and objectives)* bagi pendidikan dan pembelajaran dalam kebijakan yang ada, membangun dukungan antar kementerian, diskusi keuangan dan melibatkan orang yang tepat di tingkat nasional." (Wals, 2010: 114). Pendekatan PPB di kawasan ini beragam baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, dan integrasi antara sistem pendidikan muncul dari tema, berbasis keterampilan, dan perspektif nilai.

Indonesia telah melangkah maju dengan memasukkan PKB dalam Rencana Strategi Nasional 2010-2014 dan juga telah memulai Strategi Nasional untuk PKB di tahun 2009. Meskipun demikian, Indonesia adalah satu negara dari beberapa negara yang telah melaksanakan kebijakan PKB. Di Asia Tenggara saja, 7 negara – Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam – telah menetapkan mandat untuk menggabungkan PKB dalam sistem pendidikan nasional (UNESCO Office, Jakarta, 2011; Didham dan Ofei-Manu, 2012). Temuan sebuah kajian pada 6 negara di kawasan ini menunjukkan PKB dalam tema berikut dalam pendidikan formal dengan prioritas pada: pengetahuan masyarakat adat, perubahan iklim, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan nilai budaya (untuk gaya hidup berkelanjutan).

Bagan 5.1: Tema PPB dalam Pendidikan Formal di 6 Negara di Asia Timur dan Asia Tenggara

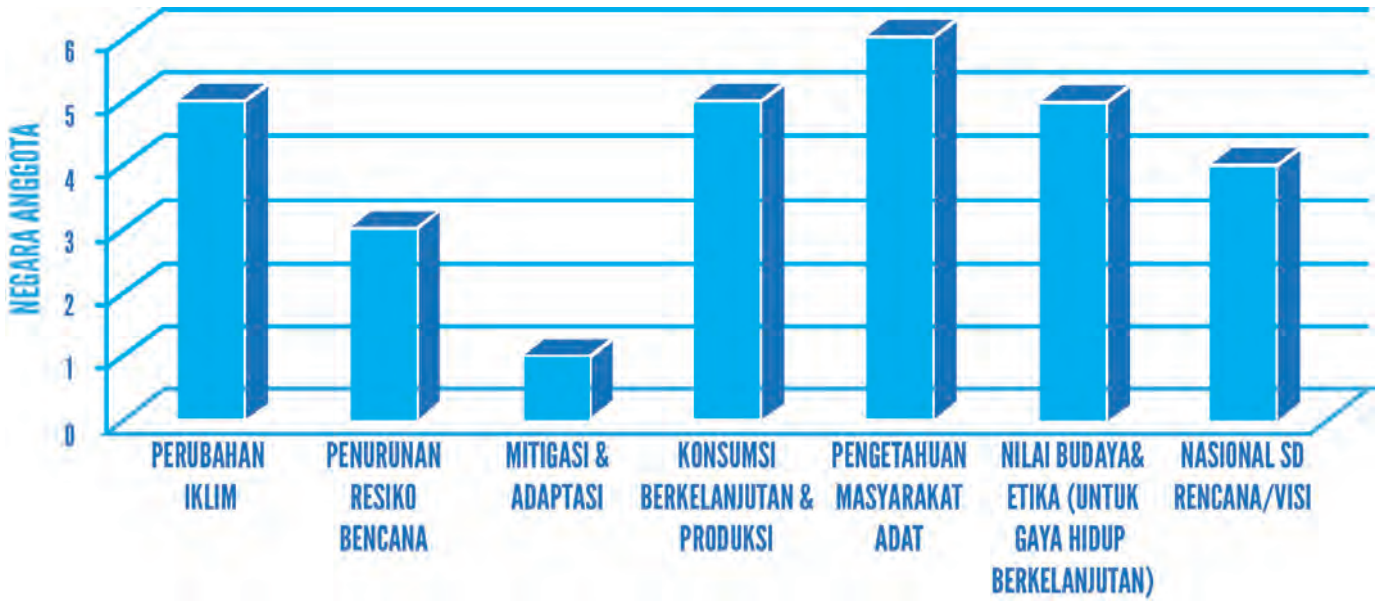

Sumber: Didham and Ofei-Manu (2012: 74)

Kajian ini juga membuat kesimpulan menarik terkait integrasi PKB ke dalam sistem pendidikan nasional yang ada berdasarkan keluwesan dari sistem pendidikan nasional untuk mengadopsi pendekatan inovatif dan mendorong reformasi pendidikan. Dengan menjelaskan sistem pendidikan nasional yang ada ke dalam tiga kelompok kemajuan perkembangan, seperti: tingkat yang tinggi, menengah, dan rendah, memungkinkan untuk mempertimbangkan integrasi yang kuat dari PKB ke dalam tiga sistem tersebut.

Untuk sistem tersebut dalam tingkat perkembangan yang tinggi *(high level)*, terdapat sejarah kinerja yang panjang dan pendidikan banyak berfokus pada persiapan ujian masuk universitas (area dimana materi isi PKB masih kurang). Sistem ini meskipun seringkali bersifat kaku, dan kebanyakan tambahan PKB muncul dengan tema PKB yang relevan dimasukkan dalam bagian luar dari sistem pendidikan atau topik individu masuk dalam mata ajar wajib yang tradisional. Sebaliknya, sistem tersebut pada tingkat perkembangan yang rendah *(low level)* seringkali harus berjuang untuk memenuhi standar dasar pendidikan, sejalan dengan keterbatasan sumber daya, dimana PKB secara alami dipandang seabgai sesuatu yang mewah untuk diturunkan dalam pertimbangan masa depan. Dalam sistem perkembangan yang menengah, tampak fleksibilitas dan peluang nyata untuk mengintegrasikan PKB dengan cara-cara inovatif. Karena sistem pendidikan telah dapat mencapai peliputan yang kuat dari standar pendidikan dasar, maka perhatian ditekankan pada perbaikan kualitatif bagi pendidikan praktis dan kinerja pembelajaran. Dalam hal ini, PKB dipandang sebagai pendekatan yang menguntungkan untuk mendorong seluruh perubahan dalam sistem pendidikan dan untuk mengarahkan hasil pendidikan, "yang secara lebih baik mengungkapkan kebutuhan belajar dan tantangan untuk generasi mendatang." (Didham and Ofei-Manu, 2012: 89).

Masih banyak peluang untuk meningkatkan kinerja PPB di kawasan ini. Dalam seluruh sistem pendidikan, terdapat beberapa keterbatasan kapasitas profesional dan kepemimpinan untuk secara tepat mengadaptasi PPB. Banyak profesional dari tingkat pengambil kebijakan dan perancang kurikulum sampai kepada mereka yang bekerja dalam administrasi sekolah serta guru masih belum cukup mengenal konsep dan pendekatan yang relevan dari PPB.

Memadukan PPB ke dalam kurikulum dan kebijakan manajemen sekolah dalam cara yang menyeluruh *(holistic)* dan dalam pedagogi yang maju *(progressive)* untuk PPB masih terbatas pada sejumlah kecil sekolah percontohan *(eco-school pilot)* dan pendekatan sekolah yang menyeluruh, yang relevan bagi PPB. Jurang yang paling besar adalah kapasitas profesional di hampir semua negara, dimana guru yang harus menerapkan PPB, umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dalam "prosedur/pendekatan, pengetahuan dan kompetensi, dan proporsi berbasis keterampilan dan berbasis nilai", sehingga seringkali diatasi hanya dengan tambahan satu topik PPB dalam mata ajar tradisional (Didham and Ofei-Manu, 2012: 87). Terkait kepemimpinan, penerapan PPB masih terbatas di banyak negara karena kurangnya visi yang jelas, yang memperinci tujuan pembelajaran spesifik, standar pengajaran, kriteria kinerja dan mekanisme yang jelas, terkait ke PPB.

Selain tambahan PPB ke dalam pendidikan formal, banyak contoh berharga yang dapat ditemukan dalam kawasan ini dimana PPB telah menjadi komponen utama di pendidikan formal dan non-formal. *The Regional Centers of Expertise* (RECs) memainkan peranan penting dalam memperkuat jaringan nasional dan internasional dalam mempelajari PPB. Secara global kini terdapat 116 RCE di Asia Pasifik dimana Asia Pasifik menjadi tempat 40 RCE (tidak termasuk 4 RCE di Australia), dan menjadi yang kawasan RCE terbesar. Banyak RCE di Asia yang memberi dukungan kuat pada pengetahuan masyarakat adat atau budaya tradisi dan membantu mempromosikan tindakan gaya hidup berkelanjutan(UNU-IAS, 2011). Proyek inovatif semacam ini penting dalam memberi inspirasi pengembangan model terapan PKB dan kinerja PKB.

Identifikasi Peluang untuk PKB di Kawasan Asia Pasifik

Proyek percontohan di Indonesia menemukan bahwa prioritas pemerintah pada KPB dan PPB telah memberikan peluang jalan masuk yang penting untuk memasukkan PKB. Baik KPB (terutama dari sisi konsumsi) dan PPB dengan tujuan perubahan pendidikan menjadi "cara untuk membangun dunia yang berkelanjutan melalui pengetahuan, pola pemikiran dan nilai-nilai yang diperlukan" (UNESCO, 2006: 5) yang secara mendasar tergantung pada apakah sebagian besar orang menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun demikian, dua konsep ini terhalang dengan memulai diskusi mengenai keberlanjutan dari perspektif yang kompleks (rumit), teknis dan/atau ideal. Pendidikan dalam KPB dan PPB biasanya dimulai dengan pendekatan *top-down* (dari atas kebawah) dengan menjelaskan seluruh konsep, kemudian bergerak ke prinsip-prinisp, dan baru terakhir ke penerapan atau tindakan. Hal ini dapat menyebabkan mereka yang mempelajari merasa tidak terlibat baik dengan KPB dan PPB karena mereka tidak melihat bagaimana kaitannya dalam kehidupan keseharian. Untunglah, PKB dapat memberikan cara belajar yang efektif *(powerful)* untuk mengubah kebiasaan tadi dan memulai dengan melibatkan secara langsung murid murid ke dalam tindakan praktis untuk konsumsi berkelanjutan dan melalui proses berdasarkan pengalaman dan pendekatan *inquiry* (mulai dengan bertanya dan mencari jawaban atau *cooperative inquiry)* dan berlanjut sampai pada prinsip-prinsip yang mendasari konsumsi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan.

Adalah sangat penting untuk memahami bahwa upaya awal untuk membangun tingkah laku bertanggung jawab secara lingkungan, seringkali secara awam dipandu oleh kepercayaan bahwa membangun kesadaran tentang pentingnya lingkungan saja sudah cukup untuk mendorong perubahan tingkah laku. Teori tradisional tentang perubahan tingkah laku dan diskusi tentang meningkatkan tindakan yang pro lingkungan secara umum berdasarkan perspektif individu yang rasional dengan asumsi makin tinggi kesadaran lingkungan akan mengarah pada sikap pro lingkungan dan kemudian meningkatkan tingkah laku pro lingkungan. Berbagai penelitian terakhir menunjukkan bahwa terdapat ketidak konsistenan antara teori dan tindakan di dunia nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya celah (perbedaan) antara sikap-tindakan atau nilai-tindakan (Blake, 1999; Kollmuss and Agyeman, 2002; Jackson, 2005). Dalam hal adanya perbedaan nilai-tindakan dan keterbatasan dari pendidikan kesadaran saja untuk mendorong perubahan yang diinginkan yang menyadari gaya hidup keberlanjutan, masih terdapat kelemahan sistem yang secara strategis dapat mengkoordinasikan aplikasi dari mekanisme pendidikan dan pengembangan kecakapan *(capacity building)* selaras dengan perubahan infrastruktur yang lebih besar yang sedang dilaksanakan untuk mempromosikan penerapan konsumsi berkelanjutan. Kembali kepada mandat kebijakan yang ada baik bagi KPB dan PPB dibanyak negara Asia Pasifik dan khususnya di Asia Tenggara, peluang penting sekarang telah tersedia untuk mengedepankan masalah konsumsi dan gaya hidup dari beragam perspektif, misalnya mekanisme pasar, norma sosial budaya, infrastruktur dan lingkungan yang ada, struktur politik, kondisi ekonomi, dan tentu saja kesadaran dan sikap individu. Khusus pada titik ini, upaya untuk mengkaitkan berbagai perspektif bahwa PKB dapat menjadi cara yang menguntungkan guna menjembatani celah yang ada antara PKB dan PPB. Dengan cara ini peluang baru guna penerapan konsumsi berkelanjutan dapat pula dimanfaatkan sebagai cara untuk mempelajari aspek sosial dari keberlanjutan secara lebih luas. Transisi melalui kebijakan atau pengaruh eksternal pada prasarana sosial dan politik membantu untuk menciptakan peluang baru baik untuk penerapan atau untuk pembelajaran. Dengan demikian PBK dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan peluang pembelajaran praktis dan pada saat yang sama mengajak partisipasi warga dalam kegiatan prioritas bagi PKB dan PPB.

PKB secara aktif mendukung pembelajaran yang aktif dan komunikatif yang bertujuan untuk memadukan ilmu dan nilai ke dalam pandangan tanggung jawab sosial yang unik dari segi lokasi dimana PKB berpusat pada pembelajar dalam sistem yang dinamis yang berpengaruh (daripada sekedar melakukan observasi dari perspektif luar) dan yang secara kritis melakukan refleksi dan dekonstruksi pola tingkat laku tradisional dan modern. Proyek percontohan di Indonesia menemukan bahwa PKB adalah mekanisme yang berharga dan relevan yang secara mudah digabungkan dalam mandat kebijakan yang ada. Tantangan terletak pada memberi konteks dan menjelaskan bagaimana PKB dapat mendukung pencapaian mandat tersebut secara efektif.

Lebih dari itu, sangat krusial untuk menyatakan kapasitas apa yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan PKB bila PKB diharapkan dapat memberikan arti yang sesungguhnya, dan untuk mentargetkan aktor kunci dalam pelaksanaan PKB dalam inisiatif membangun kapasitas yang diperlukan.

Pendekatan Strategis untuk Penguatan Kelembagaan untuk PKB dan hal yang dapat dipelajari dari Proyek Percontohan di Indonesia

Proyek percontohan dalam penguatan kelembagaan bagi PKB dilakukan dalam tahapan berikut:

1) membuat kajian dan melakukan analisa dari kerangka kerja kebijakan yang ada,
2) melaksanakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional,
3) mengembangkan dan menguji dokumen panduan nasional PKB,
4) melakukan monitoring dan evaluasi.

Melihat pencapaian yang dibuat sejauh ini, dari empat tahap proyek ini, jelas bahwa tahap satu dan tahap dua mempunyai dampak berarti dalam kualitas dari panduan PKB dan membantu memperkuat baik lingkup maupun kedalaman dari apa yang terdapat di dokumen ini. Kajian dan analisa dari kerangka kebijakan yang ada menghasilkan gagasan umum tentang area yang relevan bagi PKB yang telah diperhatikan, aktor utama yang memainkan peranan dalam PKB, dan bagaimana melaksanakannya. Pendekatan dalam pelaksanaan konsumsi berkelanjutan dapat sangat bervariasi, namun analisa ini membantu untuk menetapkan kesamaan mendasar dan pemahaman PKB. Hasilnya adalah dampak yang positif dari kedalaman diskusi yang muncul dalam diskusi pertemuan nasional. Diskusi tersebut juga menghasilkan potensi kerjasama dimana peluang untuk sinergi penting, keterkaitan antar lembaga, dan kolaborasi antar aktor telah ditetapkan.

Pertemuan nasional dengan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan diskusi potensi kerjasama antar berbagai pihak. Lebih dari itu, hal ini telah membawa berbagai keahlian dan memasukkan semua aspek dalam penerapan PKB dari kebijakan dan pengembangan kurikulum ke pelatihan guru dan kegiatan nyata di kelas sebagai penerapan. Pertemuan ini mengidentifikasi sejumlah tujuan prioritas dan tantangan di Indonesia, dimana PKB dapat berperan dalam memberikan PKB, juga peluang untuk mendiskusikan lebih lanjut berbagai kapasitas untuk mengintegrasikan PKB dalam sistem pendidikan yang ada. Satu kesempatan penting yang diidentifikasi dalam pertemuan ini adalah PKB dapat menyediakan mekanisme peningkatan kapasitas guru dan sejumlah kete ampilan untuk mengajarkan PPB dalam kurikulum yang baru diluncurkan. Peluang lain yang diidentifikasikan adalah nilai dan manfaat dari pendekatan PKB dengan merancang muatan dan kurikulum lokal (sebagian kecil dari seluruh kurikulum) yang bertujuan untuk memasukkan isu praktis dan relevan yang menjadi keprihatinan murid dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang dilakukan dalam pertemuan nasional ini untuk menilai kapasitas yang ada dalam mengajarkan pendidikan keberlanjutan di negara ini dan mentargetkan PKB sebagai cara untuk menutup celah yang ada, merupakan pengaruh yang kuat dalam menentukan arah bagaimana panduan PKB akan dirancang.

Untuk kemungkinan replikasi di kawasan Asia Pasifik, proyek ini telah membangun proses yang efektif, untuk mempertimbangkan dan mengidentifikasi cara memadukan PKB ke dalam lembaga yang ada, untuk mengedepankan pembangunan berkelanjutan, KPB dan pendidikan, secara umum. Membuat proses yang lebih efisien dari seluruh proses yang terjadi akan bermanfaat, yaitu dengan mengikuti kajian hasil dari ketiga proyek PKB. Kesempatan untuk melakukan program yang sama untuk dilakukan di negara lain dalam kawasan ini dengan menghasilkan dampak yang efektif, sangat tinggi. Berbagai negara di kawasan ini juga menghasilkan dampak efektif yang tinggi, dan telah diakui bahwa terdapat berbagai negara di kawasan ini, dengan latar belakang yang sama memiliki hal mandat tentang KPB dan PPB. Namun, negara-negara ini telah mempunyai mandat tetapi seringkali tidak dapat melaksanakannya dengan dampak yang layak, disini PKB dapat membantu meningkatkan aplikasi praktis.

Banyak negara di kawasan ini memiliki atau baru saja memiliki, atau masih memformulasikan kebijakan terkait KPB dan PPB. Meskipun beberapa negara memiliki kebijakan yang menjelaskan kaitan antara pendidikan dari mandat KPB dan/atau mandat PPB, keduanya mengakui konsumsi berkelanjutan adalah tema untuk melaksanakan pembelajaran keberlanjutan, tidak satupun negara di kawasan ini yang hanya memiliki satu kebijakan atau mandat terkait KPB. Hal ini tidaklah terlalu penting, bila *cross-cutting* cukup kuat dari perspektif pendidikan, maka kemudian sangat mungkin bagi PKB untuk dipadukan dalam kebijakan yang sudah ada.

Bila kesempatan untuk memadukan telah teridentifikasi maka penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya PKB dapat dilaksanakan, begitu pula peluang bagi pemanfaatan lebih lanjut. Dalam langkah ini, membangun konteks ke dalam PKB baik di dalam konteks lokal maupun dalam kerangka kerja kelembagaan, perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini diperlukan tidak hanya kapasitas untuk melaksanakan PKB tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan kinerja KPB dan PKB yang penting untuk dikaji ulang. Untuk itu menjadi mungkin untuk meninjau bagaimana PKB dapat menjadi katalisator kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ada (juga lingkungan dan pembangunan) dan untuk menyebarluaskan PPB dengan cara yang relevan bagi kehidupan warga.

UNEP mendorong replikasi dari Proyek PKB dan menyebarkan praktek terbaik dan pelajaran yang diperoleh dari proyek percontohan yang dilaksanakan di Chili, Tanzania dan Indonesia, dengan upaya untuk melibatkan lebih banyak negara dalam mengintegrasikan PKB ke dalam sistem pendidikan formal, demikian juga pendidikan non formal di tingkat nasional dan lokal. Dalam hal ini UNEP dapat:

- Menyebarkan model konsultasi *(road map)* untuk penguatan kelembagaan PKB, menggunakan proyek percontohan
- Menyediakan pedoman penelitian bagi berbagai negara untuk digunakan dalam mengkaji dan menganalisa kerangka kebijakan nasional dan inisiatif yang relevan bagi PKB, juga skema monitoring dan evaluasi efektif
- Menyediakan dukungan penguatan kapasitas dan teknis dalam PKB melalui buku *UNEP Here and Now! ESC Recommendations and Guidelines* (2010)
- Menyediakan dukungan bagi pengembangan kebijakan terkait PKB dan mengkaitkan kebijakan ini dengan strategi nasional yang lebih luas dan efisiensi program dan sumber daya, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan dan ekonomi hijau, sejalan dengan kebijakan pendidikan yang relevan seperti PPB dan pendidikan lingkungan.

Tabel 5.4 (di halaman berikut) menunjukkan peta jalan aksi dimana berbagai langkah dapat dilakukan untuk memperkuat PKB. Peta jalan ini bertujuan untuk mereplikasi praktek-praktek yang terbaik yang diidentifikasikan selama pilot proyek awal yang dilakukan oleh UNEP di tiga negara. Tujuannya bukan menyiapkan *blue-print* Pedoman PKB nasional yang spesifik yang harus dikembangkan di tiap negara, tetapi lebih merupakan dukungan proses yang kuat dan efektif bagi negara-negara untuk menyiapkan pedoman nasional yang relevan termasuk struktur kebijakan, tantangan spesifik, dan konteks sosio budaya yang unik dari tiap negara.

Diharapkan, meskipun tidak disyaratkan, bahwa pemerintah di tingkat nasional akan memegang peran memimpin dalam memulai proyek yang memperkuat PKB secara institusi, dan mempersiapkan pedoman PKB nasional.Bagaimanapun, agar proses berjalan efektif, hal tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah, guru, pelaku edukasi, administrator sekolah, pelatih guru, pengembang kurikulum dan organisasi masyarakat warga yang relevan. Dalam melaksanakan proses kajian awal yang dirumuskan dalam langkah pertama, barangkali ada baiknya bahwa penelitian ini tidak dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah, tetapi oleh mitra kerja, baik dari dunia akademis atau LSM. Juga penting diingat bahwa proses untuk menciptakan dampak terbesar, fokus seharusnya tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga mempertimbangkan PKB yng relevan bagi peluang pendidikan formal dan non-formal. Untuk tujuan ini, akan sangat menguntungkan untuk melibatkan mitra baik dari lingkup bisnis dan media massa, dalam kegiatan-kegiatan ini. Lebih lanjut, terdapat beberapa organisasi internasional yang dapat mendukung bagi proses ini, dan berbagai materi PKB yang berharga telah ada, termasuk buku UNEP, *Here and Now guidelines* (2010) yang melayani sebagai dokumentasi utama untuk rancangan orisinil *(design)* dari proyek ini.

Tabel 5.4: Langkah-Langkah dalam Proses Penguatan Kelembagaan bagi PKB dengan Kasus Indonesia

Steps	Proposed activity	Detailed activities
LANGKAH PERTAMA	1.1) Kaji dan Kumpulkan mandat kebijakan relevan dari inisiatif yang ada.	• Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam mandat (kebijakan) yang ada (seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, praktisi edukasi, lembaga masyarakat dan sebagainya), inisiatif/proyek yang sedang dijalankan; • Identifikasi mandat kebijakan yang ada untuk Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (termasuk kurikulum nasional, pendidikan pembangunan berkelanjutan, pendidikan lingkungan, pendidikan guru, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengelolaan sampah, pendidikan non formal, dsbnya.); • Identifikasi apa yang sedang dilakukan dalam mandat kebijakan di atas; siapa yang memimpin dan bagaimana mereka melakukannya; • Identifikasi inisiatif yang telah ada, program dan proyek yang relevan untuk Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB).
	1.2) Peta dan Analisa dari struktur lembaga dan mandat	• Peta mandat dan kebijakan, serta kerangka kerja kebijakan untuk melakukan *overview* dari struktur lembaga yang relevan bagi pelaksanaan PKB(lihat Tabel 4.1 sebagai contoh; termasuk: 1) kebijakan/strategi/rencana, 2) aktor utama dan kapasitas sumber daya, 3) struktur implementasi dan proyek yang spesifik. • Identifikasi jalan masuk *(entry points)* bagi PKB. Jalan masuk tersebut dapat menjadi cara yang tepat untuk melaksanakan mandat yang ada, dan juga ketika aplikasi spesifik dapat diperkuat (khususnya ketika berbagai kebijakan dapat saling terkait); (melanjutkan peta di atas, ditambahkan, 4) Jalan Masuk PKB , dan 5) Persyaratan untuk pelaksanaan PKB yang efektif)
LANGKAH KEDUA	2.1) Melaksanakan Pertemuan Nasional Pemangku Kepentingan terkait PKB	• Analisa pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peserta yang relevan dalam pertemuan atau *roundtable meeting* (termasuk diversifikasi pemangku kepentingan meliputi proses untuk kebijakan PKB, perencanaan, fasilitasi dan implementasi, melibatkan pejabat pemerintah, pengembang kurikulum, guru, pelatih,peneliti dan LSM atau lembaga masyarakat, dan sebagainya). • Persiapan: mengundang peserta dan membagi materi Langkah Pertama • Memastikan adanya risalah pertemuan dan hasil dari pertemuan *(roundtable meeting)* • Kumpulkan dan bagikan materi PKB dari mitra internasional • Pelaksanaan Pertemuan antar Pemangku Kepentingan *(roundtable meeting)* • Mengklarifikasi tujuan utama *(Goals)* dan tujuan khusus *(Objectives)* dari pertemuan antar pemangku kepentingan, identifikasi nara sumber dan fasilitator kelompok kerja (dengan keseimbangan antara wakil dari pendidikan formal dan pendidikan non-formal) • Pertemuan *(round table meeting)* dilaksanakan • Siapkan risalah pertemuan dan hasil temuan yang ada guna didistribusikan
	2.2) Membentuk kerjasama untuk pengembangan, pelaksanaan dan praktek PKB	Dari pertemuan Pemangku Kepentingan, identifikasi potensi kemitraan untuk mendukung proses PKB, dan klarifikasi peran: • Pertimbangan aktor relevan terkait proses kebijakan, perencanaan, fasilitasi dan implementasi. • Beberapa kerjasama terjadi antara petugas pemerintah dari berbagai kementerian/departemen, atau kerjasama antara perancang kurikulum dengan peneliti, guru dan pelatih. • Identifikasi dari potensi masukan atau umpan balik kemitraan untuk Langkah Ketiga dan Langkah Keempat .

Steps	Proposed activity	Detailed activities
LANGKAH KETIGA	3.1) Mengembangkan Rekomendasi Nasional, Panduan PKB, dan dukungan materi/fasilitas	• Menetapkan hal penting untuk dimasukkan dalam Panduan PKB, juga materi pendukung. Perlu dipertimbangkan: 1) apa manfaat dari memperkuat PKB 2) bagaimana memasukkan PKB ke dalam konteks nasional dan struktur kelembagaan yang ada 3) apa yang diperlukan untuk memperkuat PKB dalam implementasi 4) bagaimana PKB diadaptasikan kedalam pendidikan formal 5) topik apa yang perlu diajarkan oleh guru di bawah PKB 6) bagaimana PKB dapat dimasukkan dalam pendidikan formal dan pendidikan non formal/informal 7) bagaimana PKB dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan konsumsi dan produksi berkelanjutan secara lebih luas 8) perlunya kemitraan untuk PKB • Identifikasi mitra untuk memberikan kontribusi pada area yang berbeda dalam panduan nasional • Persiapan/panduan *editing draft* • Identifikasi pendukung tambahan atau materi fasilitasi yang diperlukan untuk pelaksanaan nyata dari Panduan Nasional • Persiapan/*editing draf* dari materi /fasilitasi pendukung
	3.2) Uji coba dan Proyek Percontohan PKB dari Panduan Nasional diantara sejumlah mitra	• Identifikasi mitra tertentu untuk uji coba PKB, di lembaga pendidikan, ruang kelas, dan potensi diuji coba dalam lingkup kebijakan • Panduan Nasional didistribusikan pada mitra, dan tersedianya fasilitasi bila diperlukan • Mitra untuk pelaksanaan Panduan • Mitra memberikan masukan/umpan balik dari pelaksanaan PKB
	3.3) Mengkaji dan Memperbaiki Panduan Nasional	• Mengumpulkan hasil kajian dari proyek percontohan • Identifikasi kekuatan dan kelemahan dari draft Panduan • Memperbaiki (memperhalus) dan menyelesaikan tahap akhir (final) dari Panduan Nasional PKB (dan materi pendukung).
LANGKAH KEEMPAT	4.1)Peluncuran Panduan Nasional	• Penyebaran Panduan Nasional PKB kepada pemangku kepentingan yang relevan • Gunakan mitra dari Langkah Pertama dan Langkah Kedua • Menyiapkan *"Press Release"* dan media informasi untuk membangun kesadaran tentang tujuan dari Panduan PKB nasional • Bangun Pusat Informasi untuk tindak lanjut dari Panduan Nasional PKB
	4.2) Menyediakan pelatihan dan fasilitasi yang diperlukan utnuk pelaksanaan Panduan Nasional	• Tentukan target sasaran utama dan kapasitas untuk pelaksanaan sesuai peran yang ingin dibawakan • Evaluasi kapasitas yang ada dari pemangku kepentingan, dan kaji kapasitas tersebut dibandingkan dengan kapasitas yang diperlukan • Ketika "celah" *(gap)* telah ditemukan, maka dapat dirancang program pelatihan dan materi pendukung untuk meningkatkan kapasitas dari para pemangku kepentingan • Lakukan pelatihan kapasitas sebagai ketentuan *(norm)* dari kerangka kerja PKB.

BIBLIOGRAFI

Akenji, L., Bengtsoon, M., Chiu, A., Briggs, E., Daconto, G., Fadeeva, Z., et al. (2012). Sustainable consumption and production: A handbook for policy makers, with cases from Asia and the Pacific (1st ed.). Bangkok, Thailand: UNEP.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2010, January). Country technical note on indigenous peoples' issues: Indonesia. Retrieved July 2012, from IFAD: http://www.ifad.org/english/indigenous/pub/documents/tnotes/indonesia.pdf

Ama, K. K. (2012, July 14). Rumah adat, leluhur dan lumbung pangan. Kompas, 24. Jakarta, Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.

Antara. (2009, May 13). Mata air NTB berkurang 75 persen. Antaramataram.com. Retrieved December 2012, from Antaramataram.com: http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=2810

Asian Development Bank. (2010, August). Key indicators for Asia and the Pacific 2010. (41st ed.). Retrieved January 2013, from Asian Development Bank: http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Key-Indicators-2010.pdf

Asian Development Bank & World Wildlife Fund. (2012). Ecological footprint and investment in natural capital in Asia and the Pacific. Retrieved January 2013, from Asian Development Bank: http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2012/ecological-footprint-asia-pacific.pdf

Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & United Nations Population Fund Indonesia. (2008). Proyeksi penduduk Indonesia 2005-2025. Retrieved January 2013, from Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas: http://kawasan.bappenas.go.id/images/ProyeksiPendudukIndonesia2005-2025/01.pdf

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006, May 23). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Retrieved September 2013, from Badan Standar Nasional Pendidikan: http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/isi/Permen_22_2006.pdf

Blake, J. (1999). Overcoming the 'value-action gap' in environmental policy: Tensions between national policy and local experience. Local Environment, 4(3), 257-278.

Brinkhoff, Thomas. (2013, November 1). Major agglomerations of the world. Retrieved July 2013, from City Population: http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html.

Cahyaningrum, Y. S. (2012, July 7). Kearifan Lokal dari Masyarakat Bali Aga. Kompas, 24. Jakarta, Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.

Choi, M. Y., & Didham, R. J. (2010). Executive summary: Education for sustainable consumption in Northeast Asia, strategies to promote and advance sustainable consumption. IGES. Hayama: IGES.

Choi, M.Y., & Kipp, R. (2009). Education for Change: A case study on education for sustainable development in Southeast Asia. Hayama, Japan: IGES.

Chun, N. (2010, September). Middle class size in the past, present, and future: A description of trends in Asia. Retrieved January 2013, from Social Science Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1688710##

Deloitte Touche Tohmatsu & World Economic Forum. (2011, April). The consumption dilemma: Leverage points for accelerating sustainable growth. Retrieved July 2012, from World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_ConsumptionDilemma_SustainableGrowth_Report_2011.pdf

Department of Economic and Social Affairs of United Nations. (2011, April 15). World population prospects, the 2010 revision. Retrieved January 2013, from United Nations, Department of Economic and Social Affairs: http://esa.un.org/wpp/.

Department of Economic and Social Affairs of United Nations Secretariat. (2004). World population to 2300. Retrieved January 2013, from United Nations, Department of Economic and Social Affairs: http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf

Dharma, A. (2008, August). Indonesian basic education curicullum: Current content and reform.

Didham, R. J. (Ed.). (2011). Proceedings of session on education for sustainable consumption in Northeast Asia. Hayama: IGES.

Didham, R. J., & Choi, M. Y. (2010). Cultivating sustainable livelihoods through education and capacity building: Modelling education for sustainable development to advance communities of practice.

Didham, R. J., & Hayashi, S. (2011). Strengthening Japan's environmental cooperation strategy as a leader to promote green markets in East Asia. Hayama, Japan: IGES.

Didham, R. J., & Ofei-Manu, P. (2012). Education for sustainable development country status reports: An evaluation of national implementation during the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) in East and Southeast Asia. Hayama, Japan: IGES and UNU-IAS.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). State of the world's forests 2011. Retrieved December 2012, from FAO Corporate Document Repository: http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm

Graphic Maps. World Atlas website; page: "The List"http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm

Hart, R. (1992). Children's participation: From Tokenism to Citizenship. Innocenti Essays number 4. Retrieved July 2012, from UNICEF Office of Research, Evidence Policy Children's Research: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf

Hendarti, L. (2012, March 31). Institutional strengthening of Education for Sustainable Consumption (ESC), advancing ESC policy and implementation strategies: Mapping opportunities in Indonesia. YPB & UNEP.

Indriyanto, B. (2012, March 16). Penggabungan pendidikan untuk konsumsi berkelanjutan. Jakarta.

Jackson, T. (2005, January). Motivating sustainable consumption: A review of evidence on consumer behaviour and behavioural change: Report to the Sustainable Development Research Network. Surrey: University of Surrey.

Jain, S., & Atrey, S. (2011). Be energy wise. Ahmedabad, India: CEE & USAID SARI/Energy.

Jolly, R., Emmerij, L., Weiss, T. G. (2009, July). The UN and human development. United Nations Human Development.United Nations Intellectual History Project Briefing Note number 8. Retrieved March 2013, from United Nations Intellectual History Project: www.unhistory.org/briefing/8HumDev.pdf

Kemenko Kesra. (2012, November 24). Siaran pers Kemenko Kesra. Retrieved December 2012, from GMSK Kemenko Kesra: http://www.semilyarkarang.com/ketdatafoto.php?Ket_DataFotoID=124

Kementerian Kehutanan. (2010, October). Statistik kehutanan Indonesia tahun 2009. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup. (2012, March 16). Pengarusutamaan produksi dan konsumsi berkelanjutan dan tinjauan status rencana aksi sustainable consumption dan production. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup. (2010). Status lingkungan hidup Indonesia 2010. Retrieved December 2012, from Kementerian Lingkungan Hidup: http://www.menlh.go.id/DATA/SLHI_2010.pdf

Kementerian Lingkungan Hidup. (2004). Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013, April). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Retrieved October 2013, from Indonesian Education Attaché in London: http://atdikbudlondon.files.wordpress.com/2013/05/renstra_kemdikbud_2010-2014.pdf

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2006, Juni 2). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Retrieved July 2012, from Blogger Green Campus, University of Lampung: http://staff.unila.ac.id/radengunawan/files/2011/09/Permendiknas-No.-24-tahun-2006.pdf

Kementerian Pendidikan Nasional. (2006, May 23). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Retrieved July 2012, from Blogger Green Campus, University of Lampung: http://staff.unila.ac.id/radengunawan/files/2011/09/Permendiknas-No.-23-tahun-2006.pdf

Kementerian Perindustrian. (2011, January 7). Peraturan Menteri Perindustrian No 5 Tahun 2011 tentang Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau. Retrieved July 2012, from Dokumentasi Hukum & Perpustakaan, Kementerian Perindustrian: http://202.47.80.12/detail_peraturan.php?id=731

Kementerian Perindustrian. (2010, December 28). Rencana Strategi Kementerian Perindustrian 2010-2014. Retrieved July 2012, from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: www.kemenperin.go.id/download/72/rencana-strategis-kemenperin

Kharas, H. (2011, June). The emerging middle class in developing countries. Retrieved January 2013, from Brookings: http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/7455676-1292528456380/7626791-1303141641402/7878676-1306699356046/Parallel-Sesssion-6-Homi-Kharas.pdf

Kharas, H. (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries. Paris: OECD.

Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. Environmental Education Research, 8(3), 239-260.

KPMG. (2012, April). The rise of the middle class in Asian emerging markets. Retrieved December 2012, from KPMG China: http://www.kpmg.com/cn/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Middle-Class-Asia-Emerging-Markets-201206-2.pdf

List of ecoregions: Terrestrial ecoregions-tropical and subtropical moist broadleaf forests. (n.d.). Retrieved July 2013 from http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/ecoregion_list/

Maliara, I. (2013, January 10). Tiap tahun 100 ribu hektar lahan pertanian hilang. Retrieved December 2012, from Pertani Sahabat Setia Petani: http://www.pertani.co.id/index.php/id/berita/18-tiap-tahun-100-ribu-hektare-lahan-pertanian-hilang

MarketResearch.com. (2012, March 6). Indonesia consumer electronics report Q2 2012. Retrieved January 2013, from MarketResearch.com: http://www.marketresearch.com/Business-Monitor-International-v304/Indonesia-Consumer-Electronics-Q2-6844251/

McGregor, S. L. (2011, May). Schools as agents for change for education for sustainable consumption. Retrieved July 2012, from McGregor Consulting Group: http://www.consultmcgregor.com/research.php?cid=9#78

Michaelis, L., & Lorek, S. (2004). Consumption and environment in Europe: Trends and futures. Retrieved July 2012, from Danish Ministry of The Environment, Environmental Protection Agency: http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2004/87-7614-193-4/pdf/87-7614-194-2.pdf

Ministry of Environment. (2009). Fourth national report: The convention on biological diversity. Retrieved July 2012, from Convention on Biological Diversity: http://www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-04-en.pdf

Ministry of National Development Planning. (2010). A roadmap to accelerate achievement of the MDGs in Indonesia. Retrieved July 2012, from Perpustakaan Bappenas: http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=100801&lokasi=lokal

Ministry of National Development Planning & Ministry of Environment. (2012). Overview of Indonesia's sustainable development: Progress on key policies for sustainable development (Vol. I). Jakarta: Ministry of National Development
Planning & Ministry of Environment.

Mulgan, G., & Salem, O. (2008, November). The green economy: background, current position and prospects. Retrieved March 2013, from Community-Wealth.org: http://community-wealth.org/content/green-economy-background-current-position-and-prospects

Na'im, A., & Syaputra, H. (2010). Kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia: Hasil sensus penduduk 2010. Retrieved January 2013, from Badan Pusat Statistik: http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html

Palupi, D. H. (2012). Delapan wajah kelas menengah. SWA, XXVIII (08), 100-105.

Pandya, M. (Ed.). (2007). Youth for clean air. Ahmedabad, India: Center for Environment Education.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005, December 30). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Retrieved July 2012, from hukumonline.com: http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25759/node//uu-no-14-tahun-2005-guru-dan-dosen

Pemerintah Republik Indonesia. (2005, May 16). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Retrieved July 2012, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2012/08/PP-no-19-th-2005-ttg-standar-nasional-pendidikan.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2004, October 15). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved July 2012, from hukumonline.com: http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19786/node/537/uu-no-32-tahun-2004-pemerintahan-daerah

Pemerintah Republik Indonesia. (2003, July 8). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Retrieved July 2012, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: http://www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Ringkasan eksekutif: Model pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Model pelaksanaan ESD melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Model pelaksanaan ESD melalui kegiatan intrakurikuler. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Strategi Nasional Pelaksanaan ESD. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

Putrawidjaja, M. (2008). Mapping climate education in Indonesia: Opportunities for development. Retrieved July 2012, from British Council: http://www.britishcouncil.org/indonesia_climate_education_report_finale.pdf

Saksono, H. (2012, October 29). Imported cosmetics sales up 30%. Indonesia Finance Today. Retrieved January 2013, from Indonesia Finance Today: http://en.indonesiafinancetoday.com/read/26652/Imported-Cosmetics-Sales-Up-30

Shallcross, T., Robinson, J., Pace, P., & Wals, A. (Eds.). (2006). Creating sustainable environments in our schools. Stoke on Trent: Trentham Books.

Shukla, A., & Sengar, G. (2012, June 1-2). Sustainable consumption: An emerging challenge for corporates. National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business, Department of Management Studies of Indian Institute of Technology Roorke, India.

Sustainable Europe Research Institute, GLOBAL 2000 & Friends of the Earth Europe. (2009, September). Overconsumption? Our use of the world's natural resources. Retrieved January 2013, from Friends of the Earth Europe: http://www.foe.co.uk/resource/reports/overconsumption.pdf

Starke, L. (Ed.). (2004). State of the world 2004: A Worldwatch Institute report on progress toward a sustainable society [Special focus: The consumer society]. New York: W.W. Norton and Company.

Statistics Indonesia. (2011). Trends of the selected socio-economic indicators of Indonesia. Retrieved July 2012, from Statistics Indonesia: http://www.bps.go.id/booklet/Booklet_Agustus_2012.pdf

Statistics Indonesia. (2011, October). Environment statistics of Indonesia 2011. Retrieved January 2013, from Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/flip_2011/3305001/index11.php?pub=Statistik%20Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%202011

Suliyanti, R. (2009). Evaluasi peningkatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh transportasi. Warta Penelitian Perhubungan, 21(4), 509-513.

Taufik. (2012). Rising middle class in Indonesia: Peluang bagi marketer & implikasi bagi policy maker. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

The Economist. (2012, May 26). Let them walk: A plan to stop ordinary folk from buying cars. The Economist. Retrieved January 2013, from The Economist: http://www.economist.com/node/21555970

The List. (n.d.). Retrieved July 2013 from http://www.worldatlas.com/geoquiz/thelist.htm

Triwidodo, H., & Wienarto, N. (2010, June 19). Penanggulangan wereng batang coklat: Mampukah kita belajar dari sejarah. Retrieved January 2013, from saungURIP: http://saungurip.blogspot.com/2010/08/penanggulangan-wereng-batang-coklat.html

United Nations Development Programme. (1998). Human development report 1998. Retrieved July 2012, from Human Development Resource Net: http://hdrnet.org/39/1/hdr_1998_en.pdf

United Nations Economic and Social Comission for Asian and the Pacific. (2011). Statistical yearbook for Asia and the Pacific 2011. Retrieved January 2013, from United Nations Economic and Social Comission for Asian and the Pacific: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/statistical-yearbook-asia-pacific-education-2011-en.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2011). Astrolabe: A guide to education for sustainable development coordination in Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2011). Country Reports on Education for Sustainable Development: Centred on the five cluster countries of UNESCO Office, Jakarta. Jakarta: Unesco Office Jakarta.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2009, April 2). Bonn Declaration. Retrieved July 2012, from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799e.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization & United Nations Environment Programme. (2008). YouthXchange training kit on responsible consumption: The guide. (2nd ed.). Retrieved March 2013, from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158700e.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). Framework for the UNDESD: International implementation scheme. Retrieved July 2012, from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148650E.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2006). Promotion of a Global Partnership for the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014): The international implementation scheme for the decade in brief. Retrieved March 2013, from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147361e.pdf

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (n.d.). Sustainable consumption. Retrieved July 2012, from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://www.unesco.org/en/education-for-sustainable-development/themes/sustainable-consumption

United Nations Environment Programme. (2012a). Fifth global environment outlook: Environment for the future we want. Retrieved July 2012, from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_FrontMatter.pdf

United Nations Environment Programme. (2012b). Fifth global environment outlook: Summary for policy makers. Retrieved July 2012, from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/geo/pdfs/GEO5_SPM_English.pdf

United Nations Environment Programme. (2011a). Keeping track of our changing environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012). Retrieved July 2012, from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/geo/pdfs/Keeping_Track.pdf

United Nations Environment Programme. (2011b, October 1). The voice of children and youth for Rio+20. Retrieved July 2012, from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/tunza/conference2011/content/Bandung%20Declaration.
pdf

United Nations Environment Programme. (2010). Here & now: Education for sustainable consumption, recommendations and guidelines. Retrieved March 2013, from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf

United Nations Environment Programme, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation & Institute for Global Environmental Strategies. (2013). Capacity building and policy needs assessment on sustainable consumption and production: Final report. Retrieved March 2013, from SWITCH Asia Programme: http://www.switch-asia.eu/fileadmin/content/PSC/Report/SWITCH_PSC_Needs_Analysis_Report_Final.pdf

United Nations General Assembly, 123rd Plenary Meeting. (2012, July 27). Resolution 66/288, endorsement of outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development: The future we want. (A/RES/66/288). Retrieved in March 2013, from United Nations: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E

United Nations General Assembly, United Nations Conference on environment and development (1992, June 3-14). Report 151/26 [Vol. I], report of the United Nations Conference on Environment and Development: Rio Declaration on Environment and Development. (A/CONF.151/26 [Vol. I]). Retrieved in March 2013, from United Nations: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm

United Nations University - Institute of Advanced Studies. (2011). Sixth Global RCE Conference Summary Report. Yokohama: UNU-IAS.

United Nations World Summit on Sustainable Development. (2002). Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg: UN-WSSD.

Wals, A. E. J. (2010). DESD We Can? Some lessons learnt from two mid DESD Reviews. Global Environmental Research, 14(2), 109-118.

Widjajanti, D. (2012). Roundtable discussion report on advancing education for sustainable consumption in Indonesia. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: YPB.

Wilson, J., & Jan, L. W. (2003). Focus on inquiry: A practical approach to integrated curicullum learning. Carlton South Vic: Curicullum Corporation.

Winter, G. (Ed.). (2009). Towards sustainable fisheries law: A comparative analysis. Gland, Switzerland: IUCN.

World Bank. (2013a). Fossil fuel energy consumption (% of total). Retrieved July 2012, from The World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.FO.ZS?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value&sort=asc

World Bank. (2013b). GDP growth (annual %). Retrieved January 2013, from The World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

World Bank. (2013c). Indonesia overview: Context. Retrieved January 2013, from The World Bank: http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview

World Bank. (2012, February). Protecting poor and vulnerable households in Indonesia. Retrieved July 2012, from The World Bank: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/29/000333037_20120229231135/Rendered/PDF/672170WP00PUBL0T00English000PUBLIC0.pdf

World Bank. (2011, March). Indonesia economic quarterly: 2008 again? Retrieved July 2012, from The World Bank: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/18/000333037_20110318015637/Rendered/PDF/601520revised010IEQ1Mar20111english.pdf

World Bank. (1996, April 30). Protecting Indonesia's biodiversity. Retrieved July 2012, from World Bank: http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=34370&piPK=34424&theSitePK=4607&menuPK=34463&contentMDK=20013853

World Wildlife Fund. (2011, April). Seafood guide. Retrieved July 2012, from WWF Indonesia: http://awsassets.wwf.or.id/downloads/seafood_guide_electronic_new.pdf

World Wildlife Fund, Global Footprint Network & ZSL. (2012, May). Living planet report 2012: Summary. Retrieved January 2013, from WWF: http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2012_summary_booklet_final.pdf

Lampiran A

Latihan 1: Tujuan Pendidikan

Untuk kepentingan membangun panduan dan rekomendasi Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan, *Astrolabe Tools* untuk Pembangunan Berkelanjutan telah dirancang oleh UNESCO Kantor Wilayah Asia dan Pasifik untuk kepentingan pendidikan yang berkaitan dengan Tujuan Pendidikan, yang juga dapat digunakan untuk merancang Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan atau PKB (2011, p. 29). Dengan aplikasi dari *Astrolabe Tools*, para penggunanya akan mengidentifikasi pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membantu menetapkan prioritas dari PKB. Seluruh latihan dapat digunakan, akan tetapi sesuai kebutuhan tergantung pada kondisi tertentu.

Latihan 1: Tujuan Pendidikan

Perubahan yang diinginkan	**Pengetahuan**	**Keterampilan**		**Nilai-Nilai dan Sikap**
		Pengetahuan Kognitif/ Teknis	**Sosial/Emosional**	
Daftar perubahan yang diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan. (Catatan: dalam hal ini hal yang paling mendesak untuk diatasi adalah terkait konsumsi berkelanjutan).	Pengetahuan apa yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.	Pengetahuan kognitif dan kecakapan teknis apa yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.	Keterampilan sosial dan emosional apa yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang diinginkan	Nilai dan sikap apa yang diharapkan untuk mencapai perubahan yang diinginkan?
Karakter Pembelajaran Karakter pembelajaran apa yang dapat mendorong pengetahuan/keahlian, nilai-nilai dan sikap? (Interdisipllin, pengalaman, dsb).				
Lingkungan Pembelajaran Lingkungan belajar apa yang mendukung pesan pendidikan (misalnya karbon netral dalam pendidikan mengenai perubahan iklim).				

Sumber:
UNESCO. (2011). *Astrolabe: A guide to education for sustainable development in Asia and the Pacific*. Bangkok, Thailand: UNESCO.

Lampiran B

Latihan 2: Memetakan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan

Dorongan PKB	**Aktor 1** Kementerian, lembaga atau divisi penanggung-jawab utama (yang memimpin)	**Aktor 2** Penanggung-jawab kedua (kementerian, lembaga, divisi)	**Aktor Pendukung 1** Lembaga utama (agency), LSM, perusahaan	**Aktor Pendukung 2** Lembaga utama (agency), LSM, perusahaan	**Aktor Pendukung 3** Lembaga utama (agency), LSM, perusahaan
	Kementerian Pendidikan	Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup di provinsi atau kabupaten	Universitas utama (lingkup nasional)	Lembaga sosial dan lingkungan, dan LSM lain	Lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa
Reorientasi program Pendidikan yang ada untuk masa depan berkelanjutan					
Membangun pemahaman publik dan kesadaran untuk konsumsi berkelanjutan					
Pelatihan praktis tentang tindakan/ praktek berkelanjutan					

Sumber:
UNESCO. (2011). *Astrolabe: A guide to education for sustainable development in Asia and the Pacific.* Bangkok, Thailand: UNESCO.

Pengantar Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan di Indonesia: Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik

"Buku ini, yang merupakan kontribusi pada 10 Tahun Program Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, menyediakan perangkat pendidikan yang diperlukan bagi pengambil kebijakan dan pendidik untuk mengintegrasikan pendidikan konsumsi berkelanjutan (PKB) di dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Publikasi ini dirancang untuk membantu murid Indonesia dengan pendidikan, kecakapan dan sikap yang diperlukan untuk berperan dalam masyarakat." (Fanny Demassieux, *Coordinator of the Resource efficiency Subprogramme and Head of the Responsible Consumption Unit, United Nations Environment Programme*).

" Buku ini menjelaskan bahwa konsumen perlu memiliki informasi yang cukup sebelum membeli, menimbang dengan matang sebelum mengkonsumsi, dan bertanggung jawab atas pola konsumsinya." (Emil Salim, Tokoh Pembangunan Berkelanjutan, Pendiri dan Anggota Pembina Yayasan Pembangunan Berkelanjutan).

"Publikasi ini mendukung pelaksanaan 10 Tahun Program Kerangka Kerja Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (2013-2023) di Indonesia, yang dicanangkan pada 5 Juni 2013. Buku ini adalah alat yang membantu pemangku kepentingan yang relevan dalam dunia pendidikan konsumsi berkelanjutan di Indonesia, merubah pola konsumsi menjadi efisien dalam penggunaan sumber alam dan ramah lingkungan." (Henri Bastaman, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Kementerian Lingkungan Hidup, *Focal Point* untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia, Anggota Dewan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

" Panduan Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan ini merupakan referensi yang sangat berguna bagi guru maupun para penulis buku teks pelajaran dan buku pengayaan dalam upaya pembentukan sikap peduli siswa sebagai konsumen maupun ketika mereka menjadi produsen di masa mendatang." (Nanik Suwaryani, Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan PAUDNI, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

ISBN 978-979-1487-30-6

9 789791 487306